

# LAPORAN PEREKONOMIAN

## Provinsi Jambi

FEBRUARI 2024



---

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.14, Telanaipura  
JAMBI

Telp : (0741) 62445

Fax : (0741) 62112

Website : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

## Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

## Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

## Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung Kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

## Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Jambi periode Februari 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Perekonomian merupakan salah satu terbitan periodik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sebagai sarana diseminasi data dan informasi, baik dengan *stakeholders* internal maupun eksternal. Selanjutnya, para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, perbankan dan terutama Pemerintah Daerah Jambi (provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan dapat memperoleh masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Laporan ini mencakup beberapa aspek seperti perkembangan ekonomi makro regional, keuangan pemerintah daerah, inflasi daerah, stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Publikasi ini juga memuat perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

Berdasarkan asesmen atas data dan informasi triwulan IV 2023, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh 4,03% (yoy), melambat setelah sebelumnya tumbuh 4,84% (yoy) pada triwulan III 2023. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai LU jasa perusahaan yang tumbuh 21,15% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi adalah Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 21,10% (yoy) seiring dengan mulainya kegiatan kampanye pemilu tahun 2024 pada bulan November.

Sementara, pada triwulan IV 2023, inflasi *year-on-year* peningkatan IHK gabungan Provinsi Jambi tercatat sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,70% (yoy). Selanjutnya, realisasi inflasi tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 2,68% (yoy).

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 16,78% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,02% (yoy). Dari sisi risiko kredit, terjadi penurunan risiko kredit korporasi yang tercermin dari NPL sebesar 0,91% (gross)

lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,09% (gross). Penurunan risiko kredit korporasi tersebut disumbangkan oleh penurunan NPL di sektor konstruksi dengan NPL sebesar 5,75% (gross) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,86% (gross). Sementara itu, NPL sektor utama di Provinsi Jambi terpantau tetap dan tidak melebihi *threshold* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 diperkirakan melanjutkan tren pertumbuhan positif didukung terjaganya permintaan domestik didukung kebijakan Pemerintah untuk menyalurkan berbagai program jaring pengaman sosial turut menopang perbaikan konsumsi masyarakat dan dunia usaha. Lebih lanjut, berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur diperkirakan akan menopang kinerja positif investasi di Provinsi Jambi.

Dalam penyusunan laporan ini kami banyak memperoleh dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah, instansi, perbankan, BUMN/BUMD, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Semoga kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Seiring dengan keterbatasan yang ada, kami mengharapkan kritik dan saran dalam meningkatkan kualitas laporan ini agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, untuk kemakmuran masyarakat Jambi.

Jambi, Februari 2024

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI JAMBI

ttd

Warsono

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>IX</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>22</b>
1.1 PERKEMBANGAN UMUM.....	23
1.2 PDRB Sisi PENGELUARAN .....	24
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga.....	25
1.2.2 Konsumsi Pemerintah.....	25
1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) .....	26
1.2.4 Perdagangan Eksternal.....	26
1.3 PDRB Sisi LAPANGAN USAHA.....	28
1.3.1 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	29
1.3.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian .....	30
1.3.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor .....	31
1.3.4 Lapangan Usaha Industri Pengolahan .....	31
1.3.5 Lapangan Usaha Lainnya .....	32
<b>BAB II KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>36</b>
2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH .....	37
2.2 KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH .....	40
2.3 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	42
<b>BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH .....</b>	<b>44</b>
3.1 KAJIAN UMUM.....	45
3.2 INFLASI KOTA JAMBI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG .....	47
3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau .....	47
3.2.2 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah.....	52
3.2.3 Kelompok Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran .....	52
3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga .....	53

3.2.5	Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya .....	53
3.2.6	Kelompok Pakaian dan Alas Kaki .....	53
3.2.7	Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya .....	53
3.2.8	Kelompok Pendidikan .....	54
3.2.9	Kelompok Kesehatan.....	54
3.2.10	Kelompok Transportasi.....	54
3.2.11	Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.....	54
3.3	INFLASI KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN KELOMPOK BARANG .....	55

**BOKS 1 SEMANGAT UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023  
BERSASAMA DENGAN TPID PROVINSI JAMBI..... 62**

**BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM . 65**

4.1	KETAHANAN SEKTOR KORPORASI .....	66
4.1.	Ketahanan Sektor Korporasi .....	66
4.1.1	Sumber Kerentanan Sektor Korporasi.....	66
4.1.2	Kinerja Korporasi dan Penilaian Risiko .....	66
4.1.3	Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi.....	66
4.2	KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA.....	68
4.2.1	Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan .....	68
4.2.2	Kredit Rumah Tangga di Perbankan .....	69
4.3	PERKEMBANGAN KREDIT UMKM .....	70
4.4	PERKEMBANGAN BANK UMUM.....	72
4.4.1	Perkembangan Aset Bank .....	72
4.4.2	Perkembangan Dana Masyarakat.....	73
4.4.3	Perkembangan Kredit/Penyaluran Dana .....	74

**BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH ..... 78**

5.1	PERKEMBANGAN TRANSAKSI TUNAI DAN NONTUNAI .....	79
5.2	PENYEDIAAN UANG LAYAK EDAR .....	81
5.3	PERKEMBANGAN TEMUAN UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA.....	82
5.4	INKLUSI KEUANGAN DAN ELEKTRONIFIKASI.....	83
5.5	PERKEMBANGAN QRIS .....	85

**BOKS 2 DORONG PROMOSI WISATA DAERAH, BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI  
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN KENDURI BUDAYO 2023 BERTAJUK  
"BERWISATA DI JAMBI AJA" ..... 87**

**BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN..... 91**

6.1	KETENAGAKERJAAN DAERAH.....	92
-----	-----------------------------	----

6.1.1	Prospek Ketenagakerjaan.....	94
6.2	KESEJAHTERAAN.....	95
6.2.1	Kemiskinan .....	95
6.2.2	Kesejahteraan Petani.....	97
<b>BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH .....</b>		<b>100</b>
7.1	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI KESELURUHAN TAHUN.....	102
7.1.1	Prospek Permintaan .....	102
7.1.2	Prospek Penawaran.....	103
7.2	PROYEKSI INFLASI.....	104
7.3	REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	105
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>108</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>		<b>111</b>
<b>TIM PENYUSUN .....</b>		<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kontribusi PDRB Sisi Penggunaan Terhadap Pertumbuhan(yoy).....	24
Tabel 1.2.	Indeks Keyakinan Konsumen .....	24
Tabel 1.3.	Realisasi Investasi.....	24
Tabel 1.4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha (yoy).....	29
Tabel 2.1.	Perkembangan Pendapatan APBD Provinsi Jambi .....	39
Tabel 2.2.	Perkembangan Belanja APBD Provinsi Jambi .....	39
Tabel 2.3.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi .....	39
Tabel 2.4.	Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi .....	42
Tabel 3.1.	Perkembangan Inflasi Kota Jambi (Tahun Dasar 2018) .....	50
Tabel 3.2.	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa .....	51
Tabel 3.3.	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Berdasarkan Komoditas .....	52
Tabel 3.4.	Perkembangan Inflasi Bungo (Tahun Dasar 2018).....	60
Tabel 3.5.	Perkembangan Inflasi Bungo Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa .....	60
Tabel 3.6.	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Bungo Berdasarkan Komoditas.....	61
Tabel 4.1.	Penghimpunan Dana Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta) .....	75
Tabel 4.2.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik (Rp Juta) .....	75
Tabel 4.3.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Lokasi Bank (Rp Juta) .....	75
Tabel 4.4.	Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta) .....	75
Tabel 4.5.	Perkembangan <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi .....	76
Tabel 5.1.	Perkembangan Sistem Pembayaran melalui KPwBI Provinsi Jambi.....	80
Tabel 5.2.	Kas Keliling dan Penukaran Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Jambi Triwulan I 2022.....	82
Tabel 5.3.	Daftar TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi Jambi.....	85
Tabel 6.1.	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (ribu orang).....	93
Tabel 6.2.	Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang) .....	93
Tabel 6.3.	Pekerja Berdasarkan Status Pendidikan (ribu orang) .....	94
Tabel 6.4.	Pekerja berdasarkan Lapangan Usaha .....	94
Tabel 6.5.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi .....	98
Tabel 6.6.	Garis Kemiskinan Provinsi Jambi.....	98
Tabel 6.7.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi .....	98
Tabel 6.8.	Gini Ratio Provinsi Jambi.....	98
Tabel 6.9.	Indeks Pembangunan Manusia menurut komponen.....	98

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi (yoy).....	23
Grafik 1.2. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran.....	24
Grafik 1.3. Perkembangan Jumlah Tamu Menginap.....	25
Grafik 1.4. Indeks Penghasilan .....	25
Grafik 1.5. Perkembangan Kredit Konsumsi.....	25
Grafik 1.6. Pangsa Penanaman Modal .....	26
Grafik 1.7. Perkembangan Kredit Investasi.....	26
Grafik 1.8. Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan.....	27
Grafik 1.9. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Asal .....	27
Grafik 1.10. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas.....	27
Grafik 1.11. Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas.....	27
Grafik 1.12. Pangsa Impor Non-Migas Berdasarkan Komoditas .....	28
Grafik 1.13. Perkembangan Impor Non-Migas Berdasarkan Komoditas .....	28
Grafik 1.14. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha.....	29
Grafik 1.15. Perkembangan Harga CPO lokal dan internasional, serta TBS 10 Tahun.....	29
Grafik 1.16. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP).....	29
Grafik 1.17. Perkembangan Harga Pupuk.....	30
Grafik 1.18. Perkembangan Harga Bokar.....	30
Grafik 1.19. Perkembangan Harga Minyak WTI .....	30
Grafik 1.20. Perkembangan Jumlah Kendaraan Baru.....	31
Grafik 1.21. Produksi Karet.....	31
Grafik 1.22. Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang .....	32
Grafik 1.23. Perkembangan Jumlah Bongkar dan Muat Barang (Cargo).....	32
Grafik 1.24. Perkembangan Konsumsi Semen.....	33
Grafik 2.1. Pangsa Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi.....	42
Grafik 2.2. Pangsa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi .....	42
Grafik 2.3. Perkembangan Simpanan Pemerintah Provinsi Jambi di Perbankan .....	42
Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi .....	45
Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Kota Jambi...48	48
Grafik 3.3. Perbandingan Inflasi Tahunan Kota Jambi dan Kota Lainnya di Pulau Sumatera .....	49
Grafik 3.4. Perkembangan Harga Aneka Cabai .....	49
Grafik 3.5. Perkembangan Harga CPO dan Minyak Goreng.....	49
Grafik 3.6. Perkembangan Harga Beras Lokal dan Internasional .....	50
Grafik 3.7. Perkembangan Harga Gandum dan Tepung Terigu.....	50
Grafik 3.8. Perkembangan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih.....	50
Grafik 3.9. Perkembangan Daging Ayam Ras dan Daging Sapi .....	50
Grafik 3.10. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kota Jambi.....	53
Grafik 3.11. Perkembangan Harga Emas Internasional.....	54
Grafik 3.12. Perkembangan Inflasi Tahunan Bungo (yoy).....	55

Grafik 3.13. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Kab. Bungo	56
Grafik 3.14. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kab. Bungo.....	57
Grafik 3.15. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan Kab. Bungo.....	58
Grafik 3.16. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Kab. Bungo .....	59
Grafik 3.17. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kab. Bungo .....	59
Grafik 4.1. Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Jambi.....	66
Grafik 4.2. Pertumbuhan Kredit Korporasi .....	67
Grafik 4.3. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi .....	67
Grafik 4.4. Proporsi Kredit Korporasi Menurut Sektor Utama Provinsi Jambi.....	67
Grafik 4.5. Proporsi Kredit Korporasi Per Jenis Penggunaan .....	67
Grafik 4.6. NPL Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi .....	68
Grafik 4.7. IKE, IEK, dan IKK Survei Konsumen Provinsi Jambi .....	68
Grafik 4.8. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga .....	68
Grafik 4.9. Komposisi Dana Pihak Ketiga .....	69
Grafik 4.10. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.....	69
Grafik 4.11. Pangsa Dana Pihak Ketiga.....	69
Grafik 4.12. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan.....	69
Grafik 4.13. Pertumbuhan KPR per Tipe .....	69
Grafik 4.14. Perkembangan NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Pengeluaran .....	70
Grafik 4.15. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi .....	70
Grafik 4.16. Pangsa Kredit Bank Umum Menurut Jenis Kredit UMKM.....	70
Grafik 4.17. Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan .....	71
Grafik 4.18. Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi .....	71
Grafik 4.19. NPL UMKM Provinsi Jambi .....	71
Grafik 4.20. NPL UMKM Menurut Sektor Ekonomi .....	72
Grafik 4.21. Perkembangan Aset Bank Umum.....	72
Grafik 4.22. Return on Asset .....	72
Grafik 4.23. BOPO .....	73
Grafik 4.24. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum.....	73
Grafik 4.25. Perkembangan <i>Loan to Deposit</i> (LDR) Bank Umum Provinsi Jambi .....	76
Grafik 4.26. Suku Bunga Rata-Rata Tertimbang Kredit dan Deposito Bank Umum di Provinsi Jambi .....	76
Grafik 5.1 Inflows, Outflows dan Netflows di Provinsi Jambi .....	80
Grafik 5.2 Perkembangan Volume dan Nilai Kliring di Provinsi Jambi .....	81
Grafik 5.3 Perkembangan Volue dan Nilai RTGS di Provinsi Jambi .....	81
Grafik 5.4 Perkembangan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debit.....	81
Grafik 5.5 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit.....	81
Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik.....	81
Grafik 5.7 Perkembangan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya di Provinsi Jambi.....	82
Grafik 5.8 Realisasi Penyaluran Program Sembako di Provinsi Jambi .....	84
Grafik 5.9 Perkembangan Merchant yang Memiliki QRIS di Provinsi Jambi .....	86
Grafik 5.10 Perkembangan QRIS-user di Provinsi Jambi.....	86
Grafik 6.1 Penyerapan Tenaga Kerja .....	94
Grafik 6.2 <i>Gini Ratio</i> Provinsi Jambi .....	96
Grafik 6.3 Distribusi Pengeluaran Penduduk .....	97

Grafik 6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	97
Grafik 6.5 Nilai Tukar Petani .....	97

# TABEL INDIKATOR MAKRO TERPILIH

## 1. INFLASI, PDRB, DAN EKSPOR IMPOR

INDIKATOR	2021	2022				2023			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>INFLASI <sup>1)</sup></b>									
Indeks Harga Konsumen Kota Jambi	108,00	109,75	114,04	114,81	114,90	115,50	116,33	116,85	118,66
Indeks Harga Konsumen Bungo <sup>2)</sup>	107,69	109,97	113,96	114,75	114,19	115,11	115,73	116,09	117,44
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Jambi	1,67	2,71	6,94	8,04	6,39	5,24	2,01	1,78	3,27
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Bungo <sup>2)</sup>	1,65	2,76	7,63	8,51	6,04	4,67	1,55	1,17	2,85
<b>PDRB - Harga Konstan (Juta Rp)<sup>3)</sup></b>									
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.138.420	10.338.005	10.756.988	11.056.376	11.116.509	10.771.075	11.107.791	11.449.557	11.416.827
Pertambangan dan Penggalian	9.212.175	9.007.648	9.709.406	10.096.224	9.716.752	9.390.687	9.649.970	9.967.713	9.049.975
Industri Pengolahan	3.903.710	3.841.446	4.152.273	4.204.120	3.992.876	4.124.732	4.260.700	4.283.740	4.380.892
Pengadaan Listrik, Gas	22.717	23.419	23.835	24.859	24.903	24.851	24.881	26.286	28.467
Pengadaan Air	55.058	53.880	54.510	56.456	54.938	55.214	57.703	58.681	53.915
Konstruksi	3.229.303	3.098.516	2.914.155	2.940.965	2.965.375	3.200.672	3.240.469	3.295.375	3.448.627
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.846.497	3.654.197	3.927.109	4.079.311	4.197.175	3.709.850	4.233.876	4.102.225	4.615.645
Transportasi dan Pergudangan	1.202.943	1.140.913	1.300.647	1.302.615	1.433.830	1.221.807	1.324.639	1.345.389	1.536.624
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	453.439	431.384	452.284	470.069	491.868	437.315	457.032	474.776	529.914
Informasi dan Komunikasi	1.615.325	1.635.840	1.710.259	1.717.613	1.730.495	1.665.780	1.740.884	1.770.381	1.898.444
Jasa Keuangan	896.769	949.222	856.092	939.076	903.440	945.229	987.846	1.004.584	900.818
Real Estate	600.996	589.861	590.929	591.816	605.585	598.586	625.574	636.173	625.377
Jasa Perusahaan	413.356	414.432	464.136	445.736	449.079	413.868	432.527	439.856	544.045
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.290.239	1.110.229	1.275.867	1.255.309	1.256.102	1.317.324	1.376.717	1.400.044	1.434.174
Jasa Pendidikan	1.368.438	1.304.769	1.315.559	1.329.727	1.371.770	1.373.386	1.435.307	1.459.626	1.479.053
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	618.617	540.641	506.736	545.760	565.626	538.969	563.269	572.813	607.830
Jasa lainnya	389.859	385.086	414.983	409.630	430.439	398.038	415.984	423.032	460.785
Pertumbuhan (y-o-y) Provinsi Jambi	3,67	4,71	5,37	5,20	5,22	5,00	4,86	4,84	4,03
Nilai Ekspor Non Migas (ribu USD) <sup>4)</sup>	312.185	313.451	389.161	431.117	422.270	351.939	288.765	315.430	285.576
Volume Ekspor Nonmigas (ton)	1.482.211	1.571.838	2.260.847	2.589.208	3.254.099	2.839.777	1.809.985	2.170.741	2.320.144
Nilai Impor Nonmigas (ribu USD) <sup>5)</sup>	6.507	10.518	5.409	8.028	9.753	14.184	19.849	21.066	16.600
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	25.438	13.954	26.720	32.433	23.834	36.545	22.512	19.741	26.072

Sumber : BPS Provinsi Jambi (diolah)

### Catatan

<sup>1)</sup> Sejak Januari 2020 perhitungan perkembangan IHK menggunakan SBH TD 2018 - 100 dan terdapat penyesuaian jumlah kelompok penyetaraan menjadi

<sup>2)</sup> Sejak Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi menjadi Kota Jambi dan Kab.Bungo

<sup>3)</sup> Tahun dasar 2010 angka sementara

<sup>4)</sup> Pengklasifikasian komoditi menggunakan 21 kelompok barang berdasarkan SITC 2 digit yang berlaku.

<sup>5)</sup> Pengklasifikasian komoditi dalam statistik impor menggunakan SITC 2 digit

## 2. PERBANKAN

INDIKATOR	2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>PERBANKAN</b>								
<b>A. Bank Umum:</b>								
Total Aset (Rp Juta)	58.322.250	60.908.462	60.922.328	61.370.272	61.673.519	62.376.893	61.936.312	84.830.802
DPK (Rp Juta)	41.202.954	41.117.819	40.804.834	41.624.154	40.261.656	39.965.295	40.347.915	43.933.570
- Tabungan	8.861.357	8.141.812	8.429.128	7.791.246	7.404.565	6.638.259	6.964.856	6.027.677
- Giro	23.592.882	24.384.224	23.902.405	25.190.415	23.646.808	22.004.013	23.852.272	24.638.785
- Deposito	8.748.715	8.591.783	8.473.301	8.642.493	9.210.283	11.323.023	9.530.786	13.267.108
<b>Kredit (Rp Juta) - berdasarkan Lokasi Proyek</b>	57.132.543	63.849.320	46.428.422	46.428.422	64.635.255	65.944.408	66.779.581	74.443.543
- Modal Kerja	19.995.485	20.192.185	14.957.278	14.957.278	20.074.916	20.300.138	20.149.010	24.991.661
- Konsumsi	15.682.905	21.312.258	11.452.231	11.452.231	21.945.452	22.766.628	23.333.927	24.940.164
- Investasi	21.454.153	22.344.877	20.018.912	20.018.912	22.614.887	22.877.642	23.296.644	24.511.718
- LDR (%)	138,66	155,28	113,78	111,54	160,54	165,00	165,51	0,00
<b>Kredit (Rp Juta) - berdasarkan Kantor Cabang</b>	45.251.650	45.930.462	46.427.200	47.271.816	47.846.412	48.789.226	48.772.867	54.810.684
- Modal Kerja	14.541.573	15.066.462	14.956.056	15.058.468	15.022.403	15.517.242	15.373.413	19.206.694
- Investasi	10.939.201	11.084.996	11.452.231	11.845.976	12.237.029	12.500.777	12.284.179	13.646.643
- Konsumsi	19.770.876	19.779.005	20.018.912	20.367.372	20.586.980	20.771.207	21.115.276	21.957.348
- LDR (%)	109,83	111,70	113,78	113,57	118,84	122,08	120,88	124,76
- NPL Gross Nominal	819.113	925.281	893.224	893.224	1.333.323	1.002.469	959.932	910.398
- NPL Gross (%)	1,81	2,01	1,92	1,89	2,79	2,05	1,97	1,56
<b>Kredit Mikro (&lt; Rp 50 juta) (Rp Juta)</b>	6.079.688	5.902.107	5.932.012	5.507.630	5.527.702	5.491.864	5.303.996	14.873.821
- Kredit Modal Kerja	3.715.022	3.754.583	3.803.388	3.562.924	3.407.587	3.290.517	3.008.200	7.544.368
- Kredit Investasi	629.804	594.301	550.061	421.342	509.304	570.123	623.656	7.329.454
- Kredit Konsumsi	1.734.862	1.553.223	1.578.563	1.523.364	1.610.811	1.631.224	1.672.140	-
<b>Kredit Kecil (Rp 50 &lt; x ≤ Rp500 juta) (Rp Juta)</b>	27.831.347	28.690.537	29.623.983	30.988.105	31.571.493	32.385.768	33.445.535	7.900.636
- Kredit Modal Kerja	4.846.465	5.028.628	5.227.555	5.472.692	5.503.146	5.654.861	5.948.350	4.476.348
- Kredit Investasi	4.971.690	5.408.222	5.865.447	6.550.234	6.892.025	7.361.749	7.779.996	3.424.288
- Kredit Konsumsi	18.013.192	18.253.687	18.530.982	18.965.179	19.176.322	19.369.158	19.717.190	-
<b>Kredit Menengah (Rp500 juta &lt; x ≤ Rp5 miliar) (Rp .)</b>	6.084.900	6.040.217	6.270.367	6.603.030	6.577.997	6.663.221	6.844.305	3.287.322
- Kredit Modal Kerja	3.164.660	3.068.328	3.293.344	3.378.267	3.326.244	3.341.350	3.346.499	2.230.919
- Kredit Investasi	1.260.426	1.275.962	1.224.239	1.393.108	1.454.048	1.472.995	1.619.952	2.230.919
- Kredit Konsumsi	1.659.815	1.695.927	1.752.785	1.831.655	1.797.704	1.848.876	1.877.854	-
<b>Total Kredit MKM (Rp Juta) *)</b>	39.995.935	40.632.862	41.826.362	43.098.764	43.677.192	44.540.853	45.593.836	26.061.780
- NPL MKM Gross (%)	1,95	2,10	2,03	1,86	2,07	2,04	2,04	1,93
- NPL MKM Gross Nominal	779.853	854.060	849.446	800.226	904.024	909.044	932.059	503.780

Sumber: LBU Bank Indonesia

\*) Kategori Kredit MKM menggunakan pendekatan nominal kredit yang disalurkan untuk seluruh jenis kredit (UMKM dan Non UMKM)

### 3. SISTEM PEMBAYARAN

URAIAN	2021	2022				2023			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>NON TUNAI</b>									
<b>KLIRING</b>									
Nilai Kliring (juta Rp)	1.069.990	979.565	996.783	938.381	939.066	852.995	732.568	798.731	808.670
Δ Nominal (yoy)	(52.232)	(55.761)	(55.960)	(66.358)	(130.924)	(126.570)	(264.215)	(139.650)	(130.396)
% (yoy)	-4,65%	-5,39%	-5,32%	-6,60%	-12,24%	-12,92%	-26,51%	-14,88%	-13,89%
Δ Nominal (qtq)	65.251	(90.425)	17.218	(58.402)	685	(86.072)	(120.426)	66.163	9.939
% (qtq)	6,49%	-8,45%	1,76%	-5,86%	0,07%	-9,17%	-14,12%	9,03%	1,24%
Volume Kliring (lembar warkat)	22.666	20.353	18.915	19.672	18.623	17.161	14.372	15.946	15.423
Δ Nominal (yoy)	(6.013)	(5.085)	(3.458)	(2.058)	(4.043)	(3.192)	(4.543)	(3.726)	(3.200)
% (yoy)	-20,97%	-19,99%	-15,46%	-9,47%	-17,84%	-15,68%	-24,02%	-18,94%	-17,18%
Δ Nominal (qtq)	936	(2.313)	(1.438)	757	(1.049)	(1.462)	(2.789)	1.574	(523)
% (qtq)	4,31%	-10,20%	-7,07%	4,00%	-5,33%	-7,85%	-16,25%	10,95%	-3,28%
<b>CEK DAN BIRO GILYET KOSONG</b>									
Nominal (juta Rp)	22.487	21.850	23.707	25.574	22.583	21.097	22.537	19.405	33.673
Δ Nominal (yoy)	(14.258)	(5.206)	3.434	(1.300)	96	(753)	(1.171)	(6.169)	11.089
% (yoy)	-38,80%	-19,24%	16,94%	-4,84%	0,43%	-3,45%	-4,94%	-24,12%	49,10%
Δ Nominal (qtq)	(4.387)	(637)	1.857	1.867	(2.991)	(1.486)	1.440	(3.132)	14.268
% (qtq)	-16,32%	-2,83%	8,50%	7,87%	-11,69%	-6,58%	6,82%	-13,90%	73,53%
Lembar	501	449	456	525	403	454	424	345	434
Δ Nominal (yoy)	(93)	(112)	(22)	(15)	(98)	5	(32)	(180)	31
% (yoy)	-15,66%	-19,96%	-4,60%	-2,78%	-19,56%	1,11%	-7,02%	-34,29%	7,69%
Δ Nominal (qtq)	(39)	(52)	7	69	(122)	51	(30)	(79)	89
% (qtq)	-7,22%	-10,38%	1,56%	15,13%	-23,24%	12,66%	-6,61%	-18,63%	25,80%
<b>RTGS</b>									
Nilai RTGS (miliar Rp)	30.987.073	25.974.928	28.613.095	21.391.160	40.546.344	29.604.324	25.902.095	27.072.937	28.877.677
Δ Nominal (yoy)	2.962.129	9.034.099	9.084.070	315.420	9.559.271	3.629.396	(2.711.001)	5.681.777	(11.668.667)
% (yoy)	10,57%	53,33%	46,52%	1,50%	30,85%	13,97%	-9,47%	26,56%	-28,78%
Δ Nominal (qtq)	9.911.334	(5.012.145)	2.638.168	(7.221.936)	19.155.184	(10.942.020)	(3.702.229)	1.170.842	1.804.740
% (qtq)	47,03%	-16,17%	10,16%	-25,24%	89,55%	-26,99%	-12,51%	4,52%	6,67%
Volume RTGS (lembar warkat)	17.012	15.112	13.974	12.999	14.518	11.647	10.250	11.777	12.189
<b>TUNAI</b>									
NET INFLOWS/OUTFLOWS (JUTA RP)	(2.183.836)	102.649	(479.186)	357.003	(1.870.157)	1.337.915	(602.073)	136.493	(2.078.518)
Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp)	976.076	1.838.612	2.427.801	1.888.055	1.000.704	2.523.683	2.119.881	1.470.873	1.143.460
Δ Nominal (yoy)	31.560	(496.064)	462.869	638.845	24.628	685.071	(307.920)	(417.183)	142.757
% (yoy)	3,34%	-21,25%	23,56%	51,14%	2,52%	37,26%	-12,68%	-22,10%	14,27%
Δ Nominal (qtq)	(273.134)	862.536	589.189	(539.745)	(887.352)	1.522.979	(403.802)	(649.008)	(327.412)
% (qtq)	-21,86%	88,37%	32,05%	-22,23%	-47,00%	152,19%	-16,00%	-30,62%	-22,26%
Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp)	3.159.912	1.735.963	2.906.987	1.531.052	2.870.860	1.185.768	2.721.953	1.334.379	3.221.979
Δ Nominal (yoy)	(478.259)	461.195	(575.132)	(370.743)	(289.052)	(550.195)	(185.034)	(196.673)	351.118
% (yoy)	-13,15%	36,18%	-16,52%	-19,49%	-9,15%	-31,69%	-6,37%	-12,85%	12,23%
Δ Nominal (qtq)	1.258.117	(1.423.949)	1.171.024	(1.375.935)	1.339.808	(1.685.093)	1.536.185	(1.387.574)	1.887.599
% (qtq)	66,15%	-45,06%	67,46%	-47,33%	87,51%	-58,70%	129,55%	-50,98%	141,46%

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



# RINGKASAN EKSEKUTIF

## I. EKONOMI MAKRO REGIONAL

**Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 4,03% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 4,84% (yoy).** Peningkatan kinerja ekonomi terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha (LU), terutama terutama ditopang oleh kinerja positif LU Pertanian seiring terjaganya kinerja positif produksi TBS Kelapa Sawit. Lebih lanjut, kinerja impresif LU Konstruksi didukung berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta juga turut menopang kinerja ekonomi Provinsi Jambi.

*Ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh 4,03% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,84% (yoy)*

Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,54%, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,04%, Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,73%, dan Industri Pengolahan sebesar 10,19%. Struktur pertumbuhan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya mengingat kebergantungan Provinsi Jambi terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama beserta kegiatan pengolahan turunannya.

Dari sisi pengeluaran, menguatnya kinerja ekonomi Provinsi Jambi ditopang berlanjutnya investasi dan tetap kuatnya permintaan domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sementara itu, net ekspor Provinsi Jambi juga tercatat tumbuh positif didorong oleh kinerja impor yang berkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan ekspor. Terkontraksinya kinerja impor disebabkan oleh penurunan signifikan impor kelompok mesin industri tertentu/khusus yang dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan distribusinya, aktivitas pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 43,02% dan diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) sebesar 23,49%. Sedangkan peranan konsumsi pemerintah dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) Pemerintah relatif kecil masing-masing 9,96% dan 0,64%. Komponen lain yang berperan besar terhadap PDRB adalah komponen net ekspor dengan komposisi sebesar 22,56%. Struktur pengeluaran tersebut juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan periode sebelumnya.

## II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan IV 2023 mencapai sebesar Rp4,49 Triliun atau 91,59% dari target APBD 2023.** Realisasi tersebut menurun sebesar 2,86% (yoy) dibandingkan realisasi pendapatan triwulan IV 2022 yaitu sebesar Rp4,63 Triliun (106,75% dari target APBD 2022). Komponen pendapatan terbesar bersumber dari pendapatan transfer yang menyumbang 53,04% dari total anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp2,38 Triliun (91,00% dari target APBD 2023) dan secara tahunan tercatat tumbuh sebesar 2,52% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

*Realisasi pendapatan triwulan IV 2023 sebesar 91,9%, sedangkan realisasi belanja terserap 91,05%*

Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 91,05% dari 2023 atau sebesar Rp5,50 Triliun. Realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan nominal belanja periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp4,50 Triliun. Berdasarkan komposisinya, serapan anggaran di triwulan IV 2023 utamanya disumbangkan oleh Belanja Operasi untuk pegawai yang tercatat sebesar Rp1,45 Triliun dengan pangsa sebesar 49,77% dari belanja operasi.

### III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

**Pada triwulan IV 2023, inflasi gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi tercatat sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,70% (yoy).** Selanjutnya, realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 2,68% (yoy). Laju inflasi Gabungan Kota di Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo yang masing-masing tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan 2,85% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan 2,85% (yoy).

*Inflasi Provinsi Jambi triwulan IV 2023 mencapai 3,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 1,70% (yoy).*

Peningkatan laju inflasi pada triwulan IV 2023 terjadi baik di Kota Jambi maupun Kabupaten Bungo, terutama didorong oleh meningkatnya inflasi pada kelompok transportasi sejalan oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, tomat, kangkung, ikan nila, bayam, beras, bawang putih, dan udang basah yang didorong oleh beberapa kondisi seperti terganggunya pasokan akibat fenomena El Nino serta adanya momentum HBKN Natal dan Tahun Baru yang meningkatkan permintaan masyarakat akan komoditas pangan.

Selanjutnya, inflasi gabungan 2 (dua) kota/kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan I 2024, diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023, didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sejalan dengan dampak banjir yang mengganggu ketersediaan pasokan serta adanya momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang umumnya meningkatkan permintaan masyarakat. Meskipun demikian, berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan akan terus dilakukan oleh TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota melalui penguatan sinergi dengan instansi terkait. Mempertimbangkan hal tersebut, inflasi triwulan I 2024 diperkirakan tetap berada di antara rentang sasaran inflasi nasional  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy) sejalan dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

### IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

**Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 16,78% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,02% (yoy).** Sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan kredit triwulan yaitu sebesar 13,46% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,65% (yoy). Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPwBI Provinsi Jambi triwulan IV 2023 kegiatan usaha sektor

Penyaluran kredit pada Triwulan IV 2023 tercatat tumbuh 16,78% (yoy) dan sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya.

industri mencatatkan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) positif sebesar 1,47 meskipun lebih rendah dibandingkan dengan SBT 2,21% pada triwulan sebelumnya.

Meski demikian, risiko kredit korporasi menunjukkan penurunan menjadi sebesar 0,91%. Hal ini membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,09%. Penurunan risiko kredit korporasi tersebut disumbangkan oleh penurunan NPL di sektor konstruksi dengan NPL sebesar 5,75% (*gross*) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,86% (*gross*).

Adapun dari sisi penghimpunan dana, pertumbuhan utama yaitu pada DPK perseorangan Jambi pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 1,01% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,48% (yoy).

## V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

**Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 mengalami *net outflow* sebesar Rp136.493 miliar dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya *net outflow* mengalami kenaikan sebesar 11,14% (yoy).** Di sisi sistem pembayaran nontunai, nilai kliring dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 terkontraksi masing-masing sebesar 13,89% (yoy) dan 17,18% (yoy). Selanjutnya, transaksi non-tunai berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) mengalami peningkatan pada triwulan IV 2023. Hingga Desember 2023 tercatat sebanyak 6.007.962 transaksi dengan nilai Rp 883,46 miliar. Selanjutnya, pada Desember 2023, terdapat penambahan 497.973 pengguna baru yang tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi.

*Aliran uang kartal triwulan IV 2023 mengalami net outflow sebesar Rp 136,493 miliar.*

## VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

**Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi per Agustus 2023 menunjukkan perbaikan, hal ini terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi yang turun menjadi 4,53%.** Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan didorong oleh pertumbuhan serapan kerja sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk bekerja tersebut turut disertai dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat sebesar 68,75% atau lebih tinggi dibandingkan posisi Agustus 2022 yaitu 67,84%.

*Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 turun menjadi 4,53%.*

Pada sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan pada Maret 2023 menunjukkan penurunan. Hal tersebut tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin yang turun sebesar hampir 3 ribu orang dibandingkan dengan September 2022. Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokan penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 2,34% (yoy) menjadi sebesar Rp599.588 per kapita per bulan.

*Penduduk miskin di Provinsi Jambi pada Maret 2023 tercatat sebanyak 280,68 ribu orang atau turun 3,14 ribu orang dibandingkan September 2022.*

Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 terpantau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data triwulan IV 2023 menunjukkan rerata NTP

Provinsi Jambi sebesar 138,60 atau naik 0,31 poin dibanding rerata triwulan IV 2022 yang sebesar 138,29.

## VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

**Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,50% sampai dengan 5,00%.** Dari sisi domestik, prakiraan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya seiring fenomena El Nino pada sepanjang tahun 2023 yang berdampak pada pergeseran periode tanam-panen komoditas tanaman pangan dan banjir di awal 2024 yang menyebabkan gangguan kelancaran distribusi komoditas unggulan Provinsi Jambi. Namun hal tersebut masih ditopang terjaganya permintaan domestik seiring terjaganya daya beli di tengah tekanan inflasi yang menurun dan diperkirakan kembali pada kisaran sasaran  $2.5\% \pm 1\%$  di sisa tahun 2024. Lebih lanjut meningkatnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja positif percepatan penyelesaian Pembangunan Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur yang lebih baik dari prakiraan awal.

Beberapa kebijakan Pemerintah diperkirakan akan menopang terjaganya konsumsi domestik di Jambi melalui beberapa program yaitu pemberian sembako kepada 334.891 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 751.152 KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 453.608 KPM, Prakerja kepada 14.383 pekerja, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 44.133 KPM / 1.397 desa. Hal tersebut diharapkan dapat menjaga kinerja konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi domestik, kegiatan investasi di Provinsi Jambi diperkirakan melanjutkan kinerja positif didukung berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur, antara lain (1) Infrastruktur Konektivitas (penyelesaian jalan tol Palembang-Jambi seksi 3 Bayung Lencir-Tempino sepanjang 15,4 km untuk jalan utama dan 1,8 km untuk jalan akses, jalan strategis di Kab. Tebo, Batanghari, Sarolangun dan Muaro Jambi sepanjang 27.3 km dan perluasan bandara Depati Parbo di Kota Sungai Penuh); (2) Infrastruktur Pendidikan (penyelesaian pembangunan sembilan Gedung Universitas Jambi, pembangunan 2 sekolah dan renovasi 38 unit sekolah); (3) Infrastruktur Kesehatan (sanitasi pembangunan pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan SPAM untuk 6.220 KK); (4) pemugaran Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi dan pengembangan Wisata Alam - Konservasi; (5) Infrastruktur Irigasi dan Pengendalian Bencana (Daerah irigasi Batang Asai sepanjang 3,6 km dan pengendali banjir Sungai Batanghari – Kab. Tebo sepanjang 500 m).

Di sisi eksternal, ketidakpastian kinerja ekspor barang dan jasa diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan risiko resesi yang membayangi perekonomian global yang berpotensi mengurangi aktivitas perdagangan dunia, terutama transaksi menuju negara maju. Harga komoditas global yang diperkirakan belum dapat kembali ke level harga tahun 2022 berisiko berdampak pada menurunnya neraca perdagangan Provinsi Jambi. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia serta dapat berisiko menahan perdagangan sepanjang tahun 2024.

*Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2024 diperkirakan melanjutkan tren pertumbuhan positif dan terakselerasi di tahun 2024.*

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



## BAB I

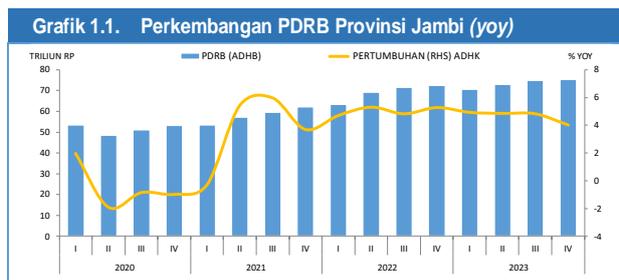
# PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

---

Perekonomian Provinsi Jambi triwulan IV 2023 tumbuh melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang kinerja positif seluruh LU Utama terutama didorong oleh terakselerasinya LU Pertanian seiring terjaganya produksi TBS Kelapa Sawit. Sementara itu, penurunan harga batubara acuan serta melemahnya permintaan global menurunkan kinerja LU Pertambangan.

## 1.1 . PERKEMBANGAN UMUM

**Realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 adalah sebesar 4,03% (yoy) atau terdeselerasi** dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,84% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan Nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut sejalan dengan kinerja LU Pertambangan sebagai salah satu LU utama yang mengalami kontraksi pada triwulan laporan dampak dari permintaan eksternal atas komoditas batubara yang masih melemah seiring dengan harga komoditas yang masih mengalami tren penurunan. Namun, perlambatan lebih jauh tertahan kinerja positif perekonomian Provinsi Jambi terutama didukung oleh terakselerasinya LU Konstruksi seiring dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera Bayunglencir-Tempino. Sementara itu, rasionalisasi penggunaan anggaran di Provinsi Jambi yang mengutamakan belanja modal mendorong akselerasi pengerjaan infrastruktur di Provinsi Jambi (**GRAFIK 1.1**).



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,66% (yoy) atau terdeselerasi** dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,12% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan Nasional yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh masih meningkatnya kinerja LU Pertanian yang tumbuh sebesar 5,61% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,00% (yoy). Kinerja positif LU Pertanian pada tahun 2022 didorong oleh masih terjaganya pola tanam dan panen raya padi serta TBS kelapa sawit seiring dengan masih terjaganya permintaan atas kedua komoditas tersebut. Selain itu, LU Konstruksi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi di tahun 2023 sebesar 7,98% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,88%(yoy). Namun, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan dan Penggalian sebagai LU dengan pangsa

terbesar kedua yang tumbuh melambat sebesar 0,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 7,76% (yoy).

**Pada sisi Pengeluaran**, PMTDB yang menunjukkan kegiatan investasi di Provinsi Jambi kembali melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun mengalami perlambatan, didukung berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur di Provinsi Jambi, antara lain PLTA Batang Merangin, Stadion Pijoan, Islamic Center dan pembangunan drainase utama di Kota Jambi. Selain itu, kinerja positif investasi sejalan dengan terakselerasinya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, air dan gas.

Sejalan dengan kinerja positif investasi, permintaan domestik tetap kuat sejalan dengan hasil survei konsumen yang berada pada level optimis. Terkendalinya laju inflasi turut berkontribusi terhadap terjaganya daya beli masyarakat yang mendorong kinerja positif konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, meningkatnya aktivitas pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) termasuk aktivitas partai politik menjelang kontestasi politik 2024 juga mendorong tetap kuatnya permintaan domestik. Konsumsi pemerintah turut tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya. Realiasi penggunaan APBD di akhir tahun ditunjukkan untuk belanja pegawai seiring dengan pola akhir tahun.

**Pada sisi Lapangan Usaha (LU)**, terjaganya produktivitas kebun kelapa sawit didukung tanaman *replanting* yang mulai memasuki usia produktif mendorong kinerja LU pertanian pada triwulan laporan. Lebih lanjut, curah hujan tinggi yang berlangsung sepanjang tahun 2023 diperkirakan masih memberikan dampak positif terhadap terjaganya produktivitas TBS Kelapa Sawit pada level tinggi untuk beberapa bulan ke depan. Namun demikian, penguatan kinerja lebih lanjut tertahan oleh belum pulihnya produksi karet alam seiring berkurangnya minat petani untuk melakukan penyadapan seiring harga jual karet alam yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Sementara itu, kinerja impresif LU Konstruksi yang kembali melanjutkan tren pertumbuhan positif didukung oleh

berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta antara lain meliputi proyek pemerintah pusat terkait pengerjaan drainase utama dan preservasi jalan nasional, rehabilitasi SD, SMP dan Madrasah, dimulainya proyek pemerintah daerah terkait Pembangunan Stadion Pijoan dan Islamic Center, serta berlanjutnya proyek swasta pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro.

Selanjutnya, HBKN Natal dan Tahun Baru mendorong berlanjutnya tren positif LU Perdagangan. Hasil survei konsumen menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap perekonomian masih berada pada level optimis. Tetap kuatnya permintaan domestik seiring dengan

berlanjutnya kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) CPO juga berdampak positif pada kinerja LU Industri Pengolahan yang ditopang terjaganya aktivitas pengolahan minyak goreng kelapa sawit untuk memenuhi permintaan domestik.

Di sisi lain, kinerja LU Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi pada periode laporan dampak dari berlanjutnya pelemahan harga batubara acuan serta isu lingkungan yang menahan permintaan atas komoditas dari negara mitra. Namun, terjaganya permintaan ekspor atas minyak dan gas juga telah menahan kontraksi LU lebih dalam.

**Tabel 1.1. Kontribusi PDRB Sisi Penggunaan Terhadap Pertumbuhan(yoy)**

JENIS PENGELUARAN	2022				TAHUN 2022	2023				TAHUN 2023
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	5,03	6,11	3,80	2,99	4,46	3,30	5,80	4,90	2,79	4,19
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA LNPRT	6,47	7,10	8,04	2,76	6,05	3,64	8,11	8,13	21,10	10,31
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	3,00	(7,02)	(0,17)	8,74	1,51	8,40	9,93	(11,50)	3,58	1,97
PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO	6,83	2,84	7,24	(5,62)	2,51	1,89	(19,61)	59,19	(11,71)	(1,14)
PERUBAHAN INVENTORI	(38,54)	31,73	(54,91)	(24,63)	(25,22)	5,20	(3,72)	4,10	1,27	1,73
EKSPOR	4,28	10,04	9,45	(4,96)	4,21	5,10	(2,81)	(2,67)	(5,47)	(1,69)
IMPOR	3,02	10,89	10,03	(14,43)	0,40	5,04	(2,23)	(7,38)	(8,71)	(3,79)
<b>PDRB</b>	<b>4,72</b>	<b>5,32</b>	<b>5,14</b>	<b>5,29</b>	<b>5,12</b>	<b>4,94</b>	<b>4,86</b>	<b>4,84</b>	<b>4,03</b>	<b>4,66</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 1.2. Indeks Keyakinan Konsumen**

INDEKS	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
INDEKS KONDISI EKONOMI	69,82	78,97	67,67	98,23	104,33	103,83	112,50	108,80	113,00	114,80	110,70	108,20
INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN	113,08	120,30	105,87	131,17	124,07	121,67	117,50	122,80	125,20	121,00	124,30	114,20
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN	91,45	99,63	86,77	114,70	114,20	112,75	115,00	115,80	119,10	117,90	117,50	111,20

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

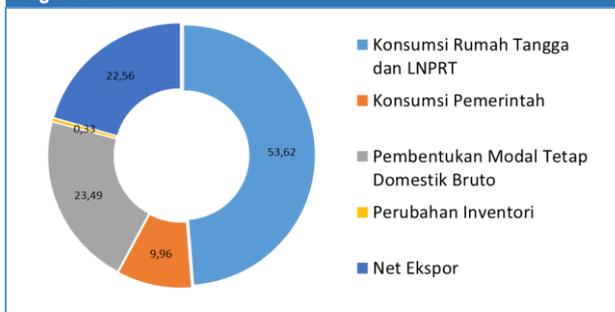
**Tabel 1.3. Realisasi Investasi**

	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PMA (USD Juta)	17,13	5,97	18,92	8,83	6,07	11,36	9,58	12,19	4,47	22,54	11,34	6,73
PMDN (RP Miliar)	2.838,97	1.165,95	676,43	1.522,81	1.739,83	2.889,91	1.388,12	2.864,80	2.118,16	2.717,44	1.539,72	25.636,69

Sumber: BKPM (diolah)

## 1.2 PDRB SISI PENGELUARAN

**Grafik 1.2. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran**



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Di sisi pengeluaran, menguatnya kinerja ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 ditopang berlanjutnya investasi dan tetap kuatnya permintaan domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Terakselerasinya kegiatan investasi di Provinsi Jambi tercermin dari peningkatan PMDN dan PMA disertai berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur di Provinsi Jambi, antara lain PLTA Batang Merangin, Stadion Pijoan, Islamic Center dan pembangunan drainase utama di Kota Jambi yang telah mendorong terakselerasinya PMTDB.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga juga turut melanjutkan tren positif seiring berlanjutnya peningkatan mobilitas dan

aktivitas ekonomi masyarakat menjelang libur HBKN Nataru. Hal ini sejalan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat berada pada level optimis. Terkendalnya laju inflasi juga turut berkontribusi terhadap terjaganya daya beli masyarakat yang mendorong kinerja positif konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan konsumsi rumah tangga, meningkatnya aktivitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan menjelang kontestasi politik di tahun 2024 turut mendorong terakselerasinya PK-LNPRT.

Di sisi eksternal, perekonomian dunia yang melambat disertai dengan meningkatnya ketidakpastian global menahan kinerja ekspor barang dan jasa yang tercatat berkontraksi seiring belum pulihnya permintaan komoditas unggulan Jambi, antara lain karet alam, CPO, batubara dan pinang (TABEL 1.1).

Berdasarkan distribusinya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada masih bersumber dari konsumsi rumah tangga dan LNPRT sebesar 53,62%. Selanjutnya, diikuti oleh PMTDB dengan pangsa sebesar 23,49%. net ekspor sebesar 22,56%, konsumsi pemerintah sebesar 9,96% dan perubahan inventori sebesar 0,33% (GRAFIK 1.2).

### 1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

**Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh 2,79% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,90% (yoy).** Pertumbuhan konsumsi rumah tangga memberikan andil tertinggi dibandingkan komponen lainnya.

Melambatnya tingkat keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang terjaga pada level optimis (indeks >100). Indeks keyakinan konsumen di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 (Desember) sebesar 111,20, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (September) sebesar 117,50 (TABEL 1.2). Lebih lanjut, melambatnya konsumsi masyarakat juga terkonfirmasi dari Indeks Penghasilan Konsumen yang menurun menjadi 107,50 pada triwulan IV 2023, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 122 (GRAFIK 1.4).



Sumber: LBU Bank Indonesia

Di sisi lain, perkembangan tingkat hunian hotel dan jumlah tamu menginap yang masing-masing tumbuh sebesar 163% (yoy) dan berkontraksi sebesar 9,85% (yoy) (GRAFIK 1.3). Disamping itu, terjaganya konsumsi masyarakat juga didukung penyaluran kredit konsumsi yang tercermin pada kinerja positif kredit rumah tangga sub sektor multiguna, kepemilikan rumah (KPR) dan pemilikan kendaraan bermotor (KKB) (GRAFIK 1.5).



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

### 1.2.2 Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 3,58% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 11,50% (yoy).**

Terjaganya tren pertumbuhan positif konsumsi pemerintah pada triwulan laporan ditopang oleh akselerasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi yang terjadi pada hampir semua komponen belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan belanja lain-lain. Meningkatnya jumlah

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendorong peningkatan realisasi komponen belanja pegawai dan barang serta berlanjutnya penyaluran berbagai jaring pengaman sosial, antara lain melalui penyaluran bansossembako, bansos non tunai, program keluarga harapan dan upaya pengendalian inflasi realisasi belanja subsidi dan belanja hibah.



Sumber: LBU Bank Indonesia

### 1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

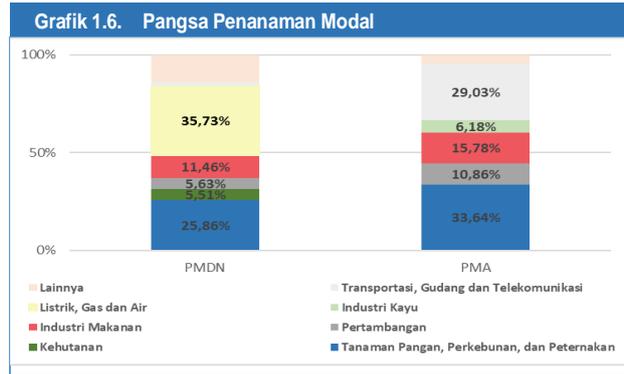
Perkembangan investasi yang terlihat dari PMTDB tercatat tumbuh sebesar 9,34% (yoy) pada triwulan IV 2023, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,75% (yoy).

Secara nominal kinerja PMTDB masih didorong oleh investasi swasta. Hal ini tercermin dari komponen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh 794,89% (yoy) menjadi sebesar Rp25,63 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, komponen Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV 2023 tercatat US\$ 6,73 juta atau berkontraksi sebesar 4,78% (yoy). Adapun kegiatan investasi didominasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, air dan gas. (TABEL 1.4)

Peningkatan investasi pada triwulan IV 2023, antara lain didorong oleh berlanjutnya pengerjaan proyek PLTA Kerinci Merangin Hidro berkapasitas 350 Megawatt di Kabupaten Kerinci yang ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Hal ini sejalan dengan data PMDN yang 35,74% diantaranya disumbangkan oleh sektor listrik, gas dan air (GRAFIK 1.6).

Selanjutnya pada triwulan laporan telah dibangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas jalan tol Jambi – Betung, pengerjaan drainase utama Kota Jambi dan preservasi jalan nasional, rehabilitasi SD, SMP dan Madrasah. Selain itu, terdapat juga proyek pemerintah daerah meliputi pembangunan Stadion Pijoan, pembangunan Islamic Center dan pengerjaan jalan Simpang Pelawan – Batang, Simpang Puduk – Suak, dan Simpang Teluk Nilau – Senyerang. Namun demikian, peningkatan laju investasi lebih lanjut tertahan oleh tersendatnya perizinan Kawasan Industri Kemingking yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, serta belum berlanjutnya pengerjaan Pelabuhan Ujung Jabung.

Sejalan dengan kinerja positif PMTDB, penyaluran pembiayaan kredit investasi pada triwulan IV 2023 masih melanjutkan tren positif dan tumbuh 15,20% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,75% (yoy) (GRAFIK 1.7).



Sumber: Kementerian Investasi/ BKPM (diolah)



Sumber: LBU Bank Indonesia

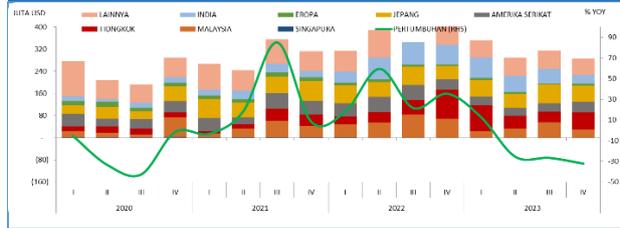
### 1.2.4 Perdagangan Eksternal

Kinerja perdagangan eksternal tercatat berkontraksi pada triwulan IV 2023 dibayangi meningkatnya ketidakpastian global. Dari sisi ekspor, kinerja ekspor pada triwulan IV 2023 berkontraksi 5,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,67 (yoy). Sementara itu, kinerja impor pada triwulan IV 2023 juga berkontraksi sebesar 8,71% (yoy) atau lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 7,38% (yoy). Kinerja impor dan ekspor yang berkontraksi lebih dalam mengakibatkan kinerja net ekspor terdeselerasi.

Secara keseluruhan dengan memperhitungkan ekspor-impor, net ekspor Provinsi Jambi tumbuh 1,27% (yoy), atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 4,10% (yoy).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, nilai ekspor non migas Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar US\$ 285,57 juta atau berkontraksi 32,37% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 26,83% (yoy). Berdasarkan tujuannya, penurunan ekspor terjadi pada hampir seluruh mitra dagang utama. Adapun penurunan lebih dalam tertahan oleh ekspor ke Jepang yang menunjukkan kinerja positif. (GRAFIK 1.6).

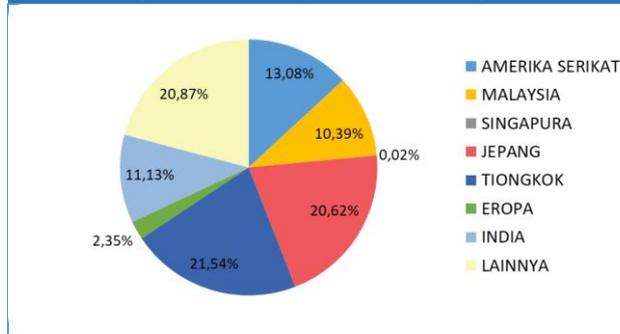
**Grafik 1.8. Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan**



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Pangsa ekspor non migas berdasarkan negara tujuan menunjukkan Jepang menjadi importir terbesar komoditas Provinsi Jambi. Nilai ekspor ke Tiongkok tercatat sebesar US\$61,50 juta (pangsa 21,54% dari total ekspor). Selanjutnya, diikuti oleh Jepang dengan nilai ekspor US\$58,87 juta (pangsa 20,62% dari total ekspor), Amerika Serikat dengan nilai ekspor US\$37,35 juta (pangsa 13,08% dari total ekspor), India dengan nilai ekspor sebesar US\$31,79 juta (pangsa 11,13% dari total ekspor), Malaysia dengan nilai ekspor US\$29,60 (pangsa 10,39% dari total ekspor) dan Singapura dengan nilai ekspor US\$70 ribu (pangsa 0,02% dari total ekspor) (GRAFIK 1.9)

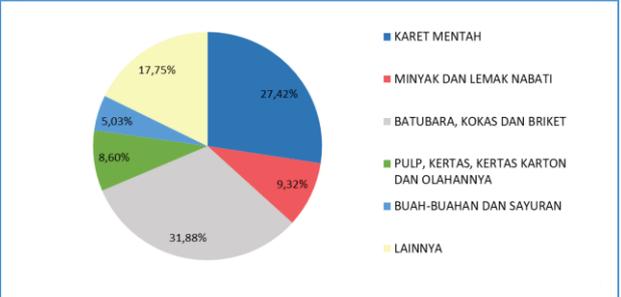
**Grafik 1.9. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Asal**



Sumber: Bea Cukai (diolah)

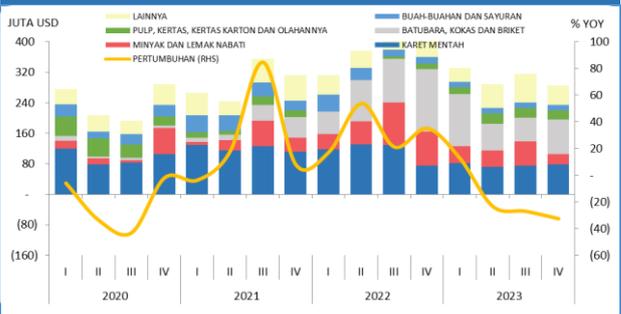
Berdasarkan komoditasnya, kontribusi ekspor non migas terbesar disumbangkan oleh kelompok komoditas batubara, kokas dan briket sebesar US\$91,04 juta atau 31,88% dari total ekspor luar negeri non migas. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok karet mentah yang tercatat sebesar US\$78,30 juta dengan pangsa 27,42%. Kemudian ekspor minyak dan lemak nabati memiliki pangsa 9,32% dengan nilai ekspor sebesar US\$26,61 juta dan diikuti oleh kelompok pulp, kertas karton dan olahannya yang tercatat sebesar US\$24,54 juta dengan pangsa 8,60%. Adapun kelompok komoditas buah-buahan dan sayuran berada di posisi terakhir dan tercatat sebesar US\$14,37 juta dengan pangsa 5,03% (GRAFIK 1.10)

**Grafik 1.10. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas**



Sumber: Bea Cukai (dioah)

**Grafik 1.11. Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas**



Sumber: Bea Cukai (dioah)

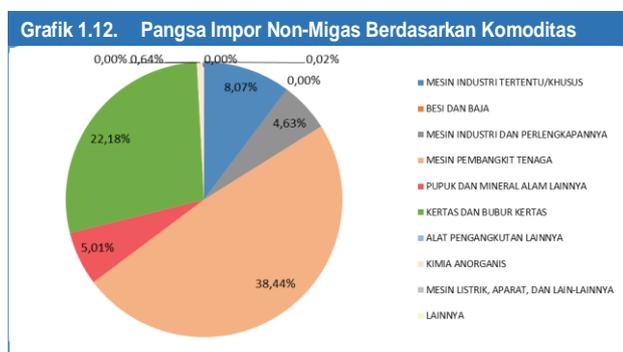
Penurunan kinerja ekspor non migas terjadi pada hampir seluruh kelompok komoditas, yaitu kelompok karet mentah, batubara, kokas dan briket dan buah-buahan dan sayuran. Namun, penurunan lebih lanjut tertahan oleh kinerja positif komoditas pulp, kertas, kertas karton dan olahannya yang pada triwulan laporan tumbuh sebesar 77,76% (yoy) lebih rendah dibandingkan tiwulan sebelumnya yang tumbuh 112.33% (yoy).

Kelompok komoditas batubara dan kelompok minyak nabati yang menopang kinerja ekspor non migas Provinsi Jambi justru terkontraksi masing-masing sebesar 44,60% (yoy) dan 70,14% (yoy), kembali terkontraksi setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi masing-masing sebesar 46,19% (yoy) dan 27,99% (yoy). Hal ini seiring pemulihan ekonomi Tiongkok yang lebih lambat dari prakiraan sebelumnya yang disertai perlambatan ekonomi di negara mitra dagang lainnya. Lebih lanjut, larangan operasional pengangkutan batubara serta pembekuan hak ekspor CPO yang masih diberlakukan selama periode laporan turut menahan kinerja ekspor kelompok komoditas tersebut.

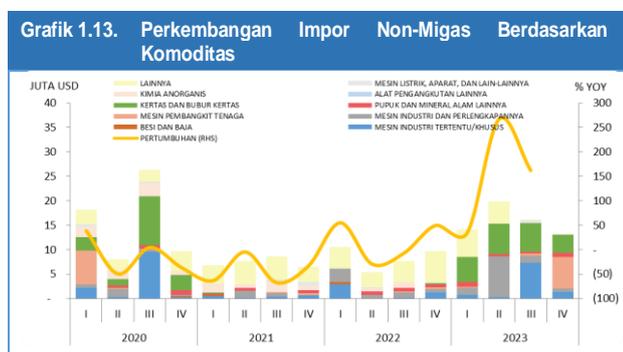
Selanjutnya, kelompok komoditas karet mentah tumbuh sebesar 4,19% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 42,14% (yoy). Belum pulihnya produktivitas karet alam seiring dengan curah hujan yang cenderung tinggi, harga pupuk yang masih tinggi dan

berkurangnya minat petani untuk melakukan penyadapan seiring harga jual karet alam yang cenderung rendah. Kinerja kelompok ekspor buah-buahan dan sayur juga kembali terkontraksi 20,53% (yoy) pada triwulan IV 2023, tidak sedalam triwulan sebelumnya yang terkontraksi 28,04% (yoy) (GRAFIK 1.11).

Sementara itu, impor non migas didominasi oleh kelompok komoditas mesin pembangkit tenaga sebesar US\$6,38 juta atau menyumbang 38,44% dari total impor non migas. Selanjutnya, kelompok komoditas kertas dan bubur kertas senilai US\$3,68 juta dengan pangsa sebesar 22,18%. Kemudian, kelompok komoditas mesin industri tertentu/khusus memiliki pangsa 8,07% dengan nilai US\$1,34 juta. (GRAFIK 1.13).



Sumber: Bea Cukai (diolah)



Sumber: Bea Cukai (Diolah)

### 1.3 . PDRB SISI LAPANGAN USAHA

Berlanjutnya kinerja positif perekonomian Provinsi Jambi ditopang oleh berlanjutnya tren pertumbuhan positif tiga sektor, yaitu LU Pertanian, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Berakhirnya musim trek disertai dengan tanaman kelapa sawit pasca *replanting* yang telah memasuki usia produktif mendorong kinerja positif produksi TBS Kelapa Sawit pada triwulan laporan. Sementara itu, berlanjutnya pelemahan harga batubara acuan serta menurunnya permintaan global atas komoditas

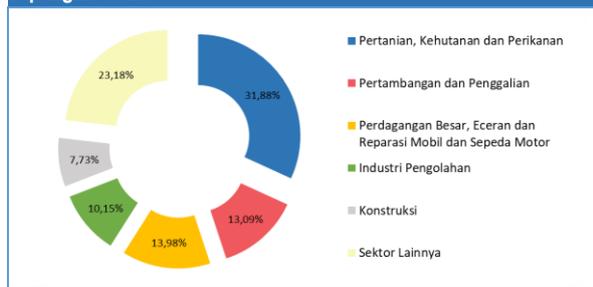
perdagangan menahan kinerja LU Pertambangan. Selanjutnya, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat seiring penyelenggaraan HBKN Natal dan Tahun Baru serta berbagai kegiatan MICE mendorong kinerja LU Perdagangan.

Selain ketiga sektor utama tersebut, LU Industri Pengolahan dan Industri Konstruksi dengan pangsa yang cukup besar di Provinsi Jambi juga turut mencatatkan pertumbuhan positif. Tetap kuatnya permintaan domestik seiring dengan berlanjutnya kebijakan DMO CPO juga berdampak positif pada kinerja LU Industri Pengolahan yang ditopang terjaganya aktivitas pengolahan minyak goreng kelapa sawit untuk memenuhi permintaan domestik. Sementara itu, kinerja impresif LU Konstruksi yang kembali melanjutkan tren pertumbuhan positif didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta antara lain meliputi proyek pemerintah pusat terkait pengerjaan drainase utama dan preservasi jalan nasional, rehabilitasi SD, SMP dan Madrasah, dimulainya proyek pemerintah daerah terkait Pembangunan Stadion Pijoan dan Islamic Center, serta berlanjutnya proyek swasta pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro.

Adapun kinerja terbaik pada triwulan IV 2023 terjadi pada LU jasa perusahaan antara lain dorong oleh penyelenggaraan umrah. LU jasa perusahaan tumbuh sebesar 21,15% (yoy). Selanjutnya, berturut-turut diikuti oleh LU pengadaan listrik, gas dan produksi es (LU pengadaan listrik) 14,31% (yoy), LU konstruksi 16,30% (yoy), LU penyediaan akomodasi makan minum (LU akmamin) 7,74% (yoy), dan LU transportasi dan pergudangan sebesar 7,07% (yoy) (TABEL 1.4).

Berdasarkan distribusi pertumbuhan triwulan IV 2023, LU pertanian menyumbangkan porsi tertinggi sebesar 16,54%. Selanjutnya, diikuti oleh LU pertambangan dengan porsi sebesar 21,04%, LU perdagangan dengan porsi sebesar 10,73%, LU industri pengolahan dengan porsi 10,19% dan LU konstruksi dengan porsi 8,02% (GRAFIK 1.14).

**Grifik 1.14. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha**



Sumber: Bea Cukai (Diolah)

**Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha (yoy)**

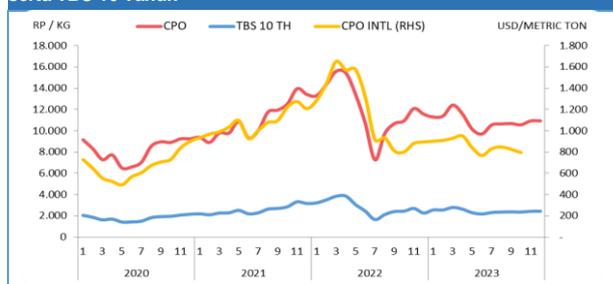
KELOMPOK	2021	TAHUN 2021	2022				TAHUN 2022	2023				TAHUN 2023
	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
<b>LAPANGAN USAHA</b>												
PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	0,00	3,67	2,62	3,09	4,69	9,65	5,00	5,15	7,42	7,23	2,70	5,61
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4,59	2,13	8,68	12,27	4,74	5,85	7,76	9,72	(1,76)	0,02	(6,99)	0,07
INDUSTRI PENGOLAHAN	(2,23)	1,27	0,86	4,21	4,62	2,70	3,12	2,57	(0,02)	5,07	9,02	4,16
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	9,05	7,08	12,31	11,81	13,00	9,62	11,66	6,51	14,65	12,92	14,31	12,15
PENGADAAN AIR	8,19	5,13	6,60	1,81	4,67	(0,22)	3,15	0,53	2,32	(0,11)	(1,86)	0,21
KONSTRUKSI	1,74	7,94	1,83	2,12	1,44	(8,17)	(0,88)	(2,45)	5,92	12,63	16,30	7,98
PERD. BESAR, ECERAN, REP. MOBIL DAN SPD MOTOR	11,30	5,92	3,93	3,89	4,94	8,55	5,37	9,68	9,24	6,66	9,97	8,87
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9,91	5,35	11,83	21,27	15,33	19,03	16,96	13,89	3,68	9,31	7,07	8,29
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	8,26	4,97	8,49	9,47	18,35	8,48	11,09	10,02	8,27	9,16	7,74	8,76
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	5,56	3,84	6,98	7,73	7,15	7,13	7,25	6,69	6,95	6,61	9,71	7,50
JASA KEUANGAN	(2,31)	5,36	4,05	(7,38)	(0,20)	0,74	(0,72)	(2,59)	9,55	(1,07)	(0,29)	1,22
REAL ESTATE	5,41	3,16	6,74	6,77	2,95	0,76	4,22	3,07	2,95	3,89	3,27	3,30
JASA PERUSAHAAN	9,16	4,03	14,74	23,20	14,57	8,64	15,13	9,87	15,86	19,98	21,15	16,84
ADM. PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAM. SOS. WAJIB	13,79	2,20	0,02	(10,37)	13,54	(2,65)	(0,65)	(9,68)	15,13	(9,40)	14,18	2,97
JASA PENDIDIKAN	5,24	1,22	3,93	(3,54)	8,21	0,24	2,02	(7,57)	9,72	(0,09)	7,82	2,54
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	22,02	15,55	13,01	(0,11)	(10,16)	(8,57)	(2,40)	(8,73)	10,66	8,20	7,46	4,34
JASA LAINNYA	3,67	0,53	5,15	7,39	8,14	10,41	7,81	6,31	11,55	9,17	7,05	8,54
<b>PDRB</b>	<b>3,67</b>	<b>3,69</b>	<b>4,72</b>	<b>5,32</b>	<b>5,14</b>	<b>5,29</b>	<b>5,12</b>	<b>4,94</b>	<b>4,86</b>	<b>4,84</b>	<b>4,03</b>	<b>4,66</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

### 1.3.1 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU pertanian pada triwulan IV 2023 kembali melanjutkan tren positif dan tercatat tumbuh sebesar **2,70% (yoy)**, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh **7,23% (yoy)**. LU pertanian berkontribusi sebesar 26,54% terhadap struktur perekonomian Provinsi Jambi.

**Grifik 1.15. Perkembangan Harga CPO lokal dan internasional, serta TBS 10 Tahun**



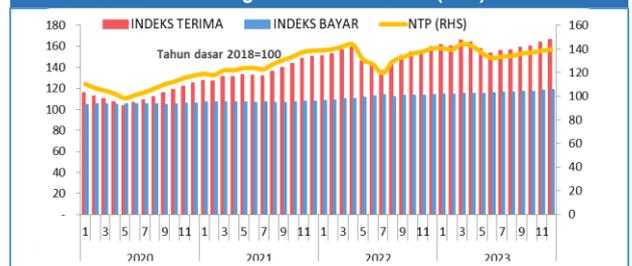
Sumber: Bloomberg Jambi (diolah)

Berlanjutnya kinerja positif LU pertanian, masih ditopang oleh terjaganya produktivitas TBS kelapa sawit seiring dengan berangsur masuknya TBS kelapa sawit yang telah di

replanting ke usia produktif yang disertai dengan berakhirnya musim trek. Selain itu, tetap tingginya produktivitas tanaman kelapa sawit juga tidak lepas dari curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun 2022.

Di sisi harga, peningkatan produksi TBS kelapa sawit belum didukung dengan pulihnya harga TBS kelapa sawit di tingkat lokal yang masih berada pada level rendah dan tercatat sebesar Rp2.396,47/kg pada triwulan laporan atau terkontraksi 2,47% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,37% (yoy). Di pasar global, harga jual CPO juga belum pulih dan tercatat sebesar US\$782,64/metric ton atau terkontraksi sebesar 8,80% (yoy) (GRAFIK 1.15).

**Grifik 1.16. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)**



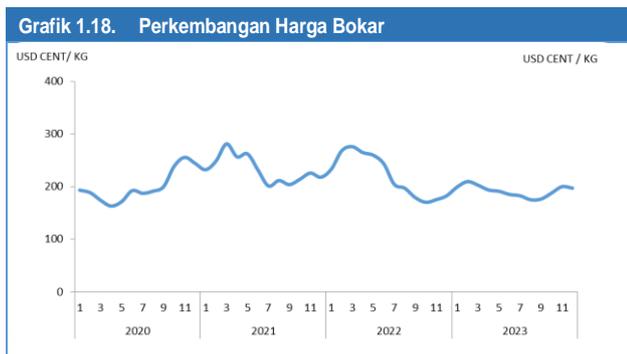
Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (diolah)

Perkembangan harga komoditas tersebut sejalan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada triwulan IV 2023, tercatat sebesar 139,77 atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 136,32. Peningkatan NTP dipengaruhi oleh peningkatan baik di sisi indeks bayar antara lain dipengaruhi peningkatan harga jual TBS Kelapa Sawit, serta peningkatan di sisi indeks bayar, antara lain berupa peningkatan biaya komponen produksi termasuk pupuk.



Sumber: Bloomberg (diolah)

Adapun rata-rata harga pupuk global pada triwulan IV 2023 berkontraksi 51,00% (yoy), lebih dalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi 39,75% (yoy) (GRAFIK 1.16) dan (GRAFIK 1.17).



Sumber: Bloomberg (diolah)

Sementara itu, kinerja positif pada komoditas sawit tidak diiringi perbaikan pada komoditas karet alam yang menahan kinerja LU pertanian seiring berkurangnya intensitas penyadapan oleh petani akibat curah hujan yang cenderung tinggi dan harga yang relatif rendah sehingga berdampak pada penurunan produksi. Rata-rata harga komoditas karet alam diperjualbelikan pada harga USD 1,94/kg atau tumbuh 10,18% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 8,09% (yoy). Melambatnya perekonomian global turut memberikan tekanan terhadap berbagai harga komoditas global termasuk karet alam. (GRAFIK 1.18).

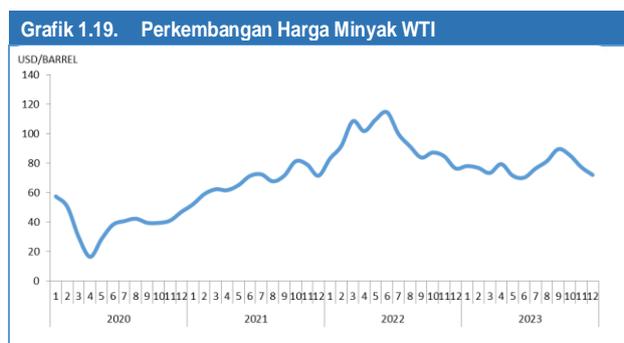
### 1.3.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU pertambangan pada triwulan IV berkontraksi -6,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,02% (yoy). LU pertambangan berkontribusi 21,04% terhadap perekonomian Provinsi Jambi.

Kinerja LU pertambangan yang berkontraksi disebabkan oleh harga batu bara acuan yang masih melemah serta permintaan atas ekspor batubara yang turut melemah dampak dari ketidakpastian ekonomi global serta isu lingkungan di berbagai negara mitra yang juga telah beralih ke energi terbarukan.

Pada komoditas migas, rata-rata harga minyak pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar US\$ 78,34/bbl atau berkontraksi 5,45% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 10,14% (yoy) dengan rata-rata harga sebesar US\$ 82,46/bbl. Berangsur pulihnya harga minyak global dipengaruhi oleh faktor *supply* yang ketat dan berdampak lebih besar dibandingkan pelemahan permintaan. (GRAFIK 1.19)



Sumber: Bloomberg (diolah)

Merujuk pada OPEC *Monthly Oil Market Report* November 2023, rata-rata permintaan minyak mentah global pada tahun 2023 diperkirakan berada pada 102,11 mb/d atau meningkat 0,05 mb/d dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada 99,66 mb/d. Peningkatan permintaan tersebut lebih tinggi 0,02 mb/d dari OPEC *Monthly Oil Market Report* Agustus 2023 yang memprakirakan peningkatan sebesar 2,3 mb/d. Peningkatan tersebut dipengaruhi permintaan dari Amerika Serikat, Tiongkok, dan Kawasan Timur Tengah didorong meningkatnya kebutuhan bahan bakar pesawat terbang dan bahan bakar kendaraan mobil seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di negara tersebut.

Sementara itu, produksi minyak mentah dunia diperkirakan berada pada kisaran 67,6 mb/d, lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi sepanjang tahun 2022 sebesar 65,8 mb/d. Peningkatan pasokan diperkirakan ditopang oleh produksi dari Amerika, Norwegia, Brazil, Kazakhstan, Guyana dan

Tiongkok namun tertahan oleh menurunnya produksi dari Rusia.

### 1.3.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU perdagangan masih melanjutkan perbaikan di triwulan IV 2023 dan tumbuh sebesar 9,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,66% (yoy). LU perdagangan berkontribusi 10,73% terhadap perekonomian Provinsi Jambi.

Berlanjutnya tren pertumbuhan positif LU perdagangan didukung oleh dukungan insentif pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat pada triwulan IV 2023, antara lain berupa penyaluran berbagai jaring pengaman sosial, antara lain melalui penyaluran bansos sembako, bansos non tunai, program keluarga harapan dan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan pokok BBNKB II, lelang dan pajak progresif pada tanggal 1 Agustus s.d 30 September 2023 dan diperpanjang hingga Maret 2024. Selain itu, kinerja positif LU perdagangan juga turut ditopang oleh terjaganya mobilitas masyarakat, sejalan dengan keyakinan konsumen yang berada pada level optimis dan meningkatnya daya beli masyarakat didukung terkendalinya laju inflasi.



Sumber: Bakeuda Provinsi Jambi

Namun demikian, peningkatan kinerja lebih lanjut tertahan berakhirnya stimulus pemerintah seperti pemberian relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) terhadap segmen kendaraan hemat energi dan harga terjangkau atau lebih dikenal dengan istilah *Low-Cost Green Car* (LCGC) dan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian properti yang sudah berakhir. Hal ini tercermin pada pertumbuhan jumlah kendaraan baru tercatat sebanyak 29,876 ribu penambahan kendaraan atau berkontraksi 21,87% atau lebih dalam

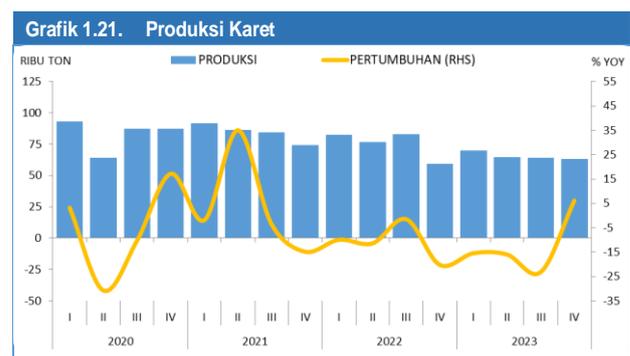
dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,64% (yoy). (GRAFIK 1.20).

### 1.3.4 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 9,02% (yoy) pada triwulan IV 2023, terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,07% (yoy). LU industri pengolahan berkontribusi sebesar 10,19% terhadap perekonomian Provinsi Jambi.

Kinerja positif industri pengolahan didorong kuatnya permintaan minyak goreng kelapa sawit goreng domestik tercermin dari berlanjutnya kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) CPO dengan rasio 1:4 (1 ton lokal mendapat kuota ekspor 4 ton) dan pembatasan penggunaan hak kuota ekspor. Hal ini mendorong peningkatan industri pengolahan makanan, khususnya pengolahan minyak goreng kelapa sawit. Lebih lanjut, momentum pertumbuhan ekonomi India yang tetap kuat masih mendorong permintaan minyak goreng dari negara tersebut. Meskipun dibayangi oleh pemulihan ekonomi Tiongkok yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

Peningkatan kinerja juga ditopang oleh konsumsi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) untuk biodiesel B30 yang tinggi dan menjaga harga komoditas di tengah termoderasinya harga bahan baku sehingga harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Jambi berkinerja lebih baik dibandingkan harga CPO internasional. Sejalan dengan permintaan domestik yang tinggi untuk kuota alokasi biodiesel yang meningkat.



Sumber: GAPKINDO Provinsi Jambi (diolah)

Sementara itu, membaiknya aktivitas industri otomotif baik domestik maupun global mendorong permintaan komponen pendukung kendaraan berbahan baku karet yang masih berkontraksi pada periode laporan. Produksi bahan baku karet alam triwulan IV yang tumbuh 6,15% (yoy), melanjutkan tren perbaikan setelah sebelumnya berkontraksi 23,15% (yoy). (GRAFIK 1.21).

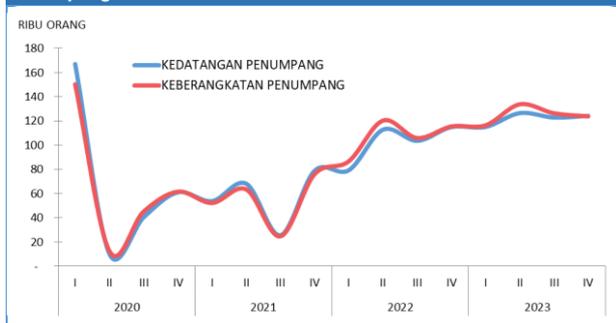
### 1.3.5 Lapangan Usaha Lainnya

Secara umum, masih terdapat LU yang melanjutkan tren pertumbuhan positif pada triwulan IV 2023 dengan **LU jasa perusahaan tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 21,15% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 19,98% (yoy)**. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan berlanjutnya tren positif kinerja LU utama turut mendorong peningkatan intensitas jasa perusahaan antara lain meliputi penyewaan kendaraan baik untuk tujuan wisata maupun truk pengangkutan komoditas primer. Lebih lanjut, terjaganya mobilitas masyarakat juga mendorong peningkatan aktivitas umrah.

Sementara itu, **LU transportasi dan pergudangan tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 7,07% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,31% (yoy)**.

Perlambatan pada sektor transportasi turut tercermin pada kinerja aktivitas penerbangan yang mengalami penurunan pada periode laporan. Kinerja transportasi udara tersebut tercermin dari jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan udara pada triwulan IV 2023. Jumlah kedatangan penumpang di Bandara Sultan Thaha Jambi tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 8,05% (yoy) dengan total penumpang 124,23 ribu, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh 18,57% (yoy). Jumlah keberangkatan penumpang juga tumbuh melambat sebesar 7,21% (yoy) dengan total penumpang sebanyak 123,67 ribu, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya tercatat tumbuh 19,30% (yoy). (GRAFIK 1.22).

**Grafik 1.22. Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang**



Sumber: PT. Angkasa Pura II (PERSERO) Sultan Thaha Jambi (diolah)

Namun demikian kinerja LU yang terjadi pada jasa transportasi udara belum tercermin pada kinerja bongkar muat barang yang justru kegiatan bongkar tercatat terkontraksi sebesar 23,95% (yoy) di triwulan IV 2023, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya terkontraksi

18,15% (yoy). Sedangkan kegiatan muat mengalami pertumbuhan sebesar 8,48 (yoy) membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 24,53% (yoy) (GRAFIK 1.23).

Sejalan dengan kinerja LU transportasi dan pergudangan, LU akmamin juga tercatat tumbuh 7,74% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,16%. Kinerja positif tersebut secara umum disebabkan oleh meningkatnya kegiatan MICE seiring terjaganya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU akmamin didorong oleh libur panjang HBKN Natal dan Tahun baru 2024.

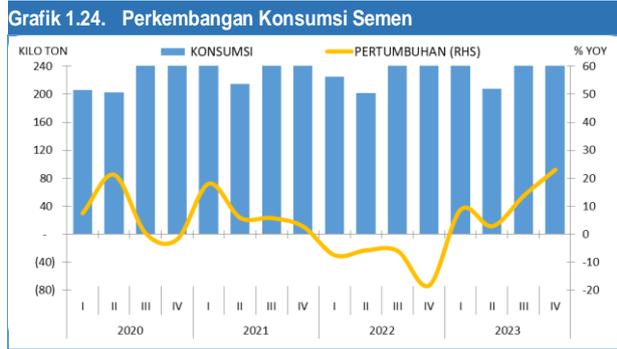
**Grafik 1.23. Perkembangan Jumlah Bongkar dan Muat Barang (Cargo)**



Sumber: PT. Angkasa Pura II (PERSERO) Sultan Thaha Jambi (diolah)

Selanjutnya, **LU konstruksi tercatat tumbuh 16,30% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,63% (yoy)**. Dimulainya pengerjaan Stadion Pijoan Kab. Muaro Jambi turut mendorong kinerja LU konstruksi. Lebih lanjut, kinerja LU konstruksi juga ditopang oleh ekspansi proyek fisik swasta terutama pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro berkapasitas 350 Megawatt di Kabupaten Kerinci yang ditargetkan selesai pada 2024 dan pengembangan kawasan terpadu Jambi Business Center masih mendorong kinerja LU konstruksi.

Selanjutnya pada triwulan laporan juga sedang dilakukan pengerjaan proyek lainnya, antara lain proyek pemerintah pusat terkait pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas jalan tol Jambi – Betung, pengerjaan drainase utama Kota Jambi dan preservasi jalan nasional, rehabilitasi SD, SMP dan Madrasah. Selain itu, terdapat juga proyek pemerintah daerah meliputi pembangunan Stadion Pijoan, pembangunan Islamic Center dan pengerjaan jalan Simpang Pelawan – Batang, Simpang Pudak – Suak, dan Simpang Teluk Nilau – Senyerang. Hal ini sejalan dengan data realisasi konsumsi semen di Provinsi Jambi yang tercatat sebesar 323.02 ton atau tumbuh 23% (yoy) melanjutkan tren pertumbuhan positif pada triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 13,76 (yoy) (GRAFIK 1.24).



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (diolah)

Selanjutnya, LU informasi dan komunikasi pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh 9,71% (yoy), terakselerasi setelah

triwulan sebelumnya tumbuh 6,61% (yoy). Terakselerasinya LU informasi dan komunikasi pada triwulan laporan didukung kebutuhan layanan data seiring beralihnya sebagian kegiatan bekerja dan belajar yang kembali diselenggarakan secara luring ataupun *hybrid* sehingga tidak dapat hanya bergantung pada jaringan wifi yang bersifat *idle*. Adapun sektor yang masih menunjukkan tren pertumbuhan positif, yaitu, LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial, LU real estate dan LU pengadaan listrik, gas dan produksi es yang masing-masing tumbuh sebesar 7,46% (yoy), 3,27% (yoy) dan 14,31% (yoy).

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



## BAB II

# Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pendapatan pemerintah daerah sampai dengan Triwulan IV 2024 secara nominal sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Sebaliknya, komponen belanja tercatat tumbuh didorong oleh peningkatan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer.

**Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan IV 2023 adalah sebesar Rp4,49 Triliun atau 91,59% dari target APBD 2023. Realisasi tersebut menurun sebesar 2,86% (yoy) dibandingkan realisasi pendapatan triwulan IV 2022 yaitu sebesar Rp4,63 Triliun (106,75% dari target APBD 2022).** Komponen yang menyumbang porsi terbesar bersumber dari komponen pendapatan transfer menyumbang 53,04% dari total pendapatan yaitu sebesar Rp2,38 Triliun (91,00% dari target APBD 2023) dan secara tahunan tercatat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 2,52% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, komponen dengan sumbangan terbesar lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (46,50% dari total pendapatan 2023) yang mencapai angka Rp2,09 Triliun (92,51% dari target APBD 2023). Pendapatan tersebut menurun sebesar 3,53% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp2,16 Triliun disebabkan oleh menurunnya pendapatan pada pos pajak daerah yang mencapai -1,40% (yoy) dan penurunan pada pos pendapatan asli daerah yang sah lain -20,93% (yoy). Selanjutnya, realisasi pos retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terpantau meningkat masing-masing sebesar 6,13% dan 1,20% dibandingkan pada Triwulan IV 2022.

Sebaliknya, sisi realisasi belanja daerah tercatat tumbuh sebesar 11,17% dibandingkan realisasi triwulan IV 2022, yaitu mencapai Rp5 Triliun atau 91,05% dari target APBD 2023. Adapun realisasi belanja pada Triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp4,50 Triliun atau 89,24% dari pagu belanja 2022. Berdasarkan komposisinya, serapan anggaran di triwulan IV 2023 utamanya disumbangkan oleh Belanja Operasi yang tercatat sebesar Rp2,92 Triliun dengan pangsa sebesar 58,21%, sejalan dengan hal tersebut belanja operasi juga meningkat sebesar 3,36% (yoy) dibandingkan pada Triwulan IV 2022. Lebih lanjut komponen lainnya adalah Belanja Transfer yang tercatat sebesar Rp1,06 Triliun atau 21,12% dari keseluruhan realisasi belanja 2023; nilai ini tumbuh sebesar 37,62% (yoy) dibandingkan pada Triwulan IV 2022. Selain itu, terdapat belanja Modal yang tercatat sebesar Rp1,03 Triliun atau 20,64% dari keseluruhan realisasi belanja 2023; nilai ini tumbuh sebesar 13,97% (yoy) dibandingkan pada Triwulan IV 2022. Kenaikan serapan belanja modal utamanya disebabkan oleh peningkatan realisasi beberapa komponen belanja seperti belanja

peralatan dan mesin dan belanja bangunan dan gedung seiring dengan pola historis peningkatan sejumlah proyek internal dan eksternal pemerintah pada Triwulan III dan IV tahun berjalan.

## 2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

**Hingga akhir Triwulan IV 2023, pendapatan Provinsi Jambi terealisasi sebesar Rp4,49 Triliun atau mencapai 91,59% dari target APBD tahun 2023 sebesar Rp4,91 Triliun.** Realisasi pendapatan tersebut menurun sebesar 2,86% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar Rp4,63 Triliun. Penurunan realisasi pendapatan daerah tersebut didorong oleh penurunan keseluruhan komponen pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Di sisi lain, kontraksi yang lebih dalam tetahan oleh pertumbuhan pos Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Penurunan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan IV 2023 utamanya disumbang oleh Pajak Daerah yang mencapai Rp1,84 Triliun (96,25% dari target APBD 2023) terpantau menurun sebesar 1,40% (yoy) dari Triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp1,87 Triliun. Adapun sub komponen penyusun pendapatan pada pos pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Lebih lanjut, penurunan realisasi PAD juga dikontribusikan oleh penurunan pendapatan pada pos Lain-lain PAD yang Sah yang tercatat sebesar Rp195,88 Miliar, menurun sebesar 20,93% dibandingkan Triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 247,72 Miliar. Selain itu, penurunan PAD tertahan oleh peningkatan pendapatan Retribusi Daerah yang tercatat sebesar Rp17,93 Miliar, tumbuh sebesar 6,13% (yoy) dibandingkan Triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp16,89 Miliar. Kemudian, pos pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercatat sebesar Rp30,98 Miliar, meningkat 1,20% (yoy) dibandingkan pada Triwulan IV 2022; Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp30,61 Miliar.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan di luar pajak. Upaya tersebut misalnya dilakukan melalui peningkatan pembiayaan pada BPD, optimalisasi kontribusi BUMD dan utilisasi aset daerah. Namun demikian, untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal maka perlu dilakukan langkah-langkah menyeluruh yaitu identifikasi mendalam

terhadap potensi sumber pendapatan dan perluasan basis pajak, perbaikan administrasi pajak/retribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem yang terintegrasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, perbaikan layanan, serta *law enforcement*, dan perbaikan aturan pajak/retribusi. Dengan demikian, basis pendapatan utama daerah (pajak dan retribusi) dapat terus tumbuh serta berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah (TABEL 2.1).

Lebih lanjut, pendapatan transfer pemerintah pusat masih memberikan andil terbesar dengan pangsa sebesar 53,04% dari total pendapatan. Hingga akhir Triwulan IV 2023, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp2,38 Triliun, dengan realisasi sebesar 91,00% dari target APBD 2023. Komponen ini mengalami penurunan sebesar 2,52% dibandingkan dengan Triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp2,44 Triliun atau 103,38% dari pagu 2022.

Sementara itu, sampai dengan Triwulan IV 2023, Pemerintah Provinsi Jambi menerima sebesar Rp20,64 Miliar Pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada Triwulan IV 2022, terdapat penerimaan dari pos tersebut sebesar Rp14,72 Miliar (40,22% yoy).

### Realisasi Belanja Daerah

**Hingga Triwulan IV 2023, realisasi belanja Provinsi Jambi mencapai Rp5,01 Triliun atau terealisasi 91,05% dari pagu Anggaran Belanja Daerah 2023 sebesar Rp5,50 Triliun.** Realisasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan nominal belanja periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp4,50 Triliun. Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja didominasi oleh Belanja Operasi yang tercatat sebesar Rp2,91 Triliun. Realisasi belanja operasi pada Triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,36% (yoy) dibandingkan Triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp2,82 Triliun (90,50% terhadap pagu APBD 2022).

Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja Operasi didominasi oleh Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp1,45 Triliun (pangsa sebesar 49,77% terhadap belanja operasional) atau terserap 93,01% terhadap pagu APBD 2023 namun terkontraksi sebesar 3,92% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Dominasi komponen belanja pegawai tersebut sesuai dengan pola di setiap tahunnya dan terbatas pada pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

Penurunan besaran realisasi belanja pegawai ini terjadi seiring dengan penurunan alokasi belanja pegawai tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1,56 Triliun, mengalami penurunan sebesar 12,52% dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai pada tahun 2022 yang mencapai Rp1,78 Triliun (TABEL 2.2).

Adapun komponen penyumbang realisasi belanja operasional selanjutnya adalah belanja barang dan jasa yang hingga akhir Triwulan IV 2023 tercatat telah terealisasi sebesar Rp1,28 Triliun (pangsa sebesar 44,03% terhadap belanja operasional), atau tumbuh sebesar 15,31% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan positif realisasi belanja barang dan jasa tersebut dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu utamanya didorong oleh kegiatan perjalanan dinas juga pasca penetapan kebijakan pelonggaran mobilitas perjalanan sebagai kelanjutan dari diresmikannya pencabutan PPKM pada Desember 2022 lalu.

Selanjutnya, terdapat komponen belanja Hibah sebesar Rp171,23 Miliar dengan pangsa sebesar 5,87% dari Belanja Operasional, menurun sebesar 4,24% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp178,81 Miliar pada periode yang sama di tahun 2022. Di sisi lain, komponen belanja selanjutnya adalah belanja subsidi yang tercatat sebesar Rp5,74 Miliar (pangsa sebesar 0,20% belanja operasional) menunjukkan angka realisasi yang meningkat sebesar 149,09% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (yoy) yang tercatat sebesar Rp1,22 Miliar serta belanja bantuan sosial yang tercatat sebesar Rp3,76 Miliar (pangsa sebesar 0,13% belanja operasional) menunjukkan angka realisasi yang terkontraksi sebesar 78,16% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (yoy) yang tercatat sebesar Rp17,21 Miliar.

Dilanjutkan oleh pos Belanja Transfer yang tercatat sebesar Rp1,06 Triliun (pangsa 21,12% terhadap Total Belanja). Realisasi belanja transfer pada Triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 37,62% (yoy) dibandingkan Triwulan IV 2022 yang tercatat hanya sebesar Rp768,62 Miliar. Adapun realisasi belanja transfer pada Triwulan IV 2023 terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan/Pajak yang terealisasi sebesar Rp899,99 Miliar dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah yang terealisasi sebesar Rp157,75 Miliar.

Pada triwulan laporan, belanja modal tercatat Rp1,03 Triliun atau terserap 82,52% terhadap pagu APBD tahun 2023. Serapan belanja modal tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 13,97% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terserap sebesar Rp907,33 Miliar. Adapun komponen belanja modal yang terealisasi di triwulan laporan terdiri dari belanja tanah (Rp7,90 Miliar), peralatan dan mesin (Rp242,98 Miliar), bangunan dan gedung (Rp381,57 Miliar); jalan irigasi dan jaringan (Rp400,55 Miliar), serta aset lainnya (Rp1,07 Miliar).

Rendahnya tingkat penyerapan khususnya pada aspek jalan, irigasi, dan jaringan, serta pertumbuhan realisasi belanja modal pada Triwulan IV 2023 mengindikasikan bahwa pengerjaan proyek fisik sebagian besar dilakukan dan terealisasi pada kuartal terakhir dalam tahun berjalan. Beberapa kendala yang mengemuka antara lain terkait

proses pengajuan rencana umum pengadaan dan proses lelang serta adanya gangguan cuaca.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah di Triwulan IV 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya meskipun belum optimal. Hal tersebut menjadi penopang pemulihan ekonomi Jambi di tengah belum kuatnya kinerja konsumsi dan investasi, terutama belanja modal yang dapat memberikan dampak *multiplier* terhadap perekonomian. Selanjutnya, realisasi sebagian komponen belanja yang mengalami belum maksimal menandakan bahwa daya ungkit fiskal masih sangat terbatas. Hal tersebut berpengaruh terhadap penyesuaian beberapa kegiatan dan program kerja yang memengaruhi realisasi anggaran pemerintah secara keseluruhan. Namun secara umum terdapat pertumbuhan pada belanja pemerintah Provinsi Jambi apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022.

**Tabel 2.1. Perkembangan Pendapatan APBD Provinsi Jambi**

URAIAN	S.D. TW I-2022		APBD 2023	S.D. TW II-2023		S.D. TW III-2023		S.D. TW IV-2023			
	NOM NAL (Rp. M. Saat)	Persen (thd APBD 2022)		NOM NAL (Rp. M. Saat)	Persen (thd APBD 2023)	NOM NAL (Rp. M. Saat)	Persen (thd APBD 2023)	NOM NAL (Rp. M. Saat)	Persen (thd APBD 2023)		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4,628.19</b>	<b>104.75</b>	<b>4,908.83</b>	<b>859.35</b>	<b>17.51</b>	<b>2,044.80</b>	<b>42.06</b>	<b>2,891.04</b>	<b>58.89</b>	<b>4,495.86</b>	<b>91.59</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,167.06</b>	<b>112.01</b>	<b>2,259.69</b>	<b>401.53</b>	<b>17.77</b>	<b>985.54</b>	<b>43.61</b>	<b>1,338.65</b>	<b>59.24</b>	<b>2,090.50</b>	<b>92.51</b>
PAJAK DAERAH	1,871.84	112.11	1,917.53	400.44	20.88	920.38	48.00	1,232.57	64.28	1,845.71	96.25
RETRIBUSI DAERAH	16.89	92.54	25.88	1.09	4.22	6.40	24.73	9.38	36.24	17.93	69.27
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	30.61	100.63	35.18	-	-	-	-	-	-	30.98	88.06
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	247.72	114.48	281.09	-	-	58.76	20.90	96.70	34.40	195.88	69.68
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,444.42</b>	<b>103.38</b>	<b>2,620.44</b>	<b>457.81</b>	<b>17.47</b>	<b>1,079.26</b>	<b>41.18</b>	<b>1,551.97</b>	<b>59.22</b>	<b>2,384.72</b>	<b>91.00</b>
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2,446.42	103.38	2,620.44	457.81	17.47	1,079.26	41.18	1,551.97	59.22	2,384.72	91.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>14.72</b>	<b>42.83</b>	<b>28.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.42</b>	<b>1.47</b>	<b>20.64</b>	<b>72.41</b>
PENDAPATAN HIBAH	14.72	42.83	28.51	-	-	-	-	0.42	1.47	20.64	72.41
PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Unaudited, (diolah)

**Tabel 2.2. Perkembangan Belanja APBD Provinsi Jambi**

URAIAN	S.D. TW I-2022		APBD 2023	S.D. TW II-2023		S.D. TW III-2023		S.D. TW IV-2023			
	NOM NAL (Rp. M. Saat)	Persen (thd APBD 2022)		NOM NAL (Rp. M. Saat)	Persen (thd APBD 2022)	NOM NAL (Rp. M. Saat)	Persen (thd APBD 2022)	NOM NAL (Rp. M. Saat)	Persen (thd APBD 2022)		
<b>BELANJA</b>	<b>4,505.80</b>	<b>89.24</b>	<b>5,501.44</b>	<b>496.58</b>	<b>9.03</b>	<b>1,693.36</b>	<b>30.78</b>	<b>3,030.98</b>	<b>55.09</b>	<b>5,009.09</b>	<b>91.05</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,820.76</b>	<b>90.50</b>	<b>3,107.37</b>	<b>154.49</b>	<b>4.97</b>	<b>914.53</b>	<b>29.43</b>	<b>1,672.47</b>	<b>53.82</b>	<b>2,915.55</b>	<b>93.83</b>
BELANJA PEGAWAI	1,510.17	95.80	1,560.06	94.78	6.08	577.85	37.04	999.32	64.06	1,450.98	93.01
BELANJA BARANG DAN JASA	1,113.35	84.64	1,428.61	58.27	4.08	314.23	22.00	626.49	43.85	1,283.84	89.87
BELANJA SUBSIDI	1.22	14.92	3.85	-	-	1.29	33.51	2.32	60.26	5.74	149.09
BELANJA HIBAH	178.81	90.05	109.06	1.40	1.28	21.12	19.37	44.30	40.62	171.23	157.01
BELANJA BANTUAN SOSIAL	17.21	3.00	5.79	0.05	0.78	0.04	0.69	0.04	0.69	3.76	64.94
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>907.33</b>	<b>93.02</b>	<b>1,253.06</b>	<b>53.25</b>	<b>4.25</b>	<b>236.96</b>	<b>18.91</b>	<b>556.12</b>	<b>44.38</b>	<b>1,034.07</b>	<b>82.52</b>
BELANJA TANAH	28.37	99.43	8.76	-	-	0.12	1.37	5.62	64.16	7.90	90.18
BELANJA PERALATAN DAN MESIN	212.51	90.22	256.50	2.25	0.88	12.69	4.95	44.84	17.48	242.98	94.73
BELANJA BANGUNAN DAN GEDUNG	209.84	86.92	438.68	27.65	6.30	79.76	18.18	199.14	45.40	381.57	86.98
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	455.29	97.24	540.02	23.35	4.32	144.20	26.70	306.10	56.68	400.55	74.17
BELANJA ASET LAINNYA	3.32	89.88	-	-	-	0.19	2.09	0.42	4.63	1.07	11.76
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>9.09</b>	<b>31.47</b>	<b>31.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.61</b>	<b>1.97</b>	<b>0.61</b>	<b>1.97</b>	<b>1.73</b>	<b>5.58</b>
BELANJA TAK TERDUGA	9.09	31.47	31.01	-	-	0.61	1.97	0.61	1.97	1.73	5.58
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>768.62</b>	<b>82.85</b>	<b>1,100.00</b>	<b>288.84</b>	<b>26.02</b>	<b>541.26</b>	<b>48.76</b>	<b>801.78</b>	<b>72.23</b>	<b>1,057.74</b>	<b>95.29</b>
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	768.62	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGI HASIL PAJAK	768.62	100.00	899.99	288.84	32.09	541.26	60.14	756.50	84.06	899.99	100.00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	156.60	98.43	210.01	-	-	-	-	45.28	21.56	157.75	75.12

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Unaudited, (diolah)

**Tabel 2.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi**

REALISASI PENDAPATAN	2022				2023			
	TW I (Rp. Juta)	TW II (Rp. Juta)	TW III (Rp. Juta)	TW IV (Rp. Juta)	TW I (Rp. Juta)	TW II (Rp. Juta)	TW III (Rp. Juta)	TW IV (Rp. Juta)
<b>I PAJAK DALAM NEGERI</b>	<b>877,247</b>	<b>2,502,205</b>	<b>1,474,173</b>	<b>1,824,215</b>	<b>1,491,822</b>	<b>3,340,400</b>	<b>1,897,478</b>	<b>2,043,828</b>
PPH	502,378	1,296,399	676,212	760,221	682,068	1,649,095	713,440	744,489
PPN	89,782	1,183,703	687,815	989,160	790,587	1,651,224	996,840	1,225,071
PBB	1,927	5,372	90,787	-	925	4,661	108,746	54,972
PENDAPATAN BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	-
CUKAI	-	-	-	410	103	312	403	362
LAINNYA	13,180	16,731	19,259	20,460	18,140	35,108	18,228	18,615
PENGEMBALIAN PENDAPATAN PAJAK DAN CUKAI	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL</b>	<b>82,101</b>	<b>89,941</b>	<b>142,248</b>	<b>84,249</b>	<b>84,249</b>	<b>113,947</b>	<b>82,739</b>	<b>16,808</b>
Pendapatan Bea Masuk	1,987	1,444	2,395	2,483	2,980	5,001	12,392	4,654
Pendapatan Bea Keluar/Pungutan Ekspor	80,115	88,496	139,853	51,584	53,289	108,944	39,947	13,851
Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III PENERIMAAN SDA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pertambangan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV PNBP LAINNYA</b>	<b>81,876</b>	<b>65,404</b>	<b>84,169</b>	<b>89,689</b>	<b>275,238</b>	<b>416,256</b>	<b>267,748</b>	<b>290,634</b>
<b>V PENDAPATAN HIBAH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM</b>	<b>60,157</b>	<b>124,380</b>	<b>193,484</b>	<b>84,390</b>	-	-	-	-
<b>VIII PENDAPATAN PENYESUAIAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL REALISASI PENDAPATAN</b>	<b>801,401</b>	<b>2,792,132</b>	<b>1,894,273</b>	<b>2,092,543</b>	<b>1,823,329</b>	<b>3,876,603</b>	<b>2,198,165</b>	<b>2,352,670</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil V Jambi, Laporan Realisasi Pendapatan Wilayah Jambi. Unaudited, (diolah)

## 2.2 KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

**Realisasi pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Jambi pada Triwulan IV 2023 mencapai Rp2,35 Triliun atau tumbuh sebesar 14,62% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp2,05 Triliun) (TABEL 2.3).**

Meningkatnya realisasi pendapatan tersebut didorong oleh peningkatan realisasi komponen Pajak Dalam Negeri serta Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Dalam Negeri yang memegang andil terbesar yaitu 86,86% dari total pendapatan tercatat, yaitu senilai Rp2,04 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu senilai Rp1,49 Triliun atau tumbuh 12,02% (yoy).

Adapun peningkatan realisasi Pajak Dalam Negeri tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada beberapa komponennya seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi Bangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat tumbuh sebesar 23,85% (yoy) dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan PPN berjalan seiring penetapan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sejak tahun 2022. Selain itu, peningkatan pendapatan juga ditopang oleh peningkatan realisasi pendapatan di sub komponen Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang pada Triwulan IV 2023 tercatat menyumbangkan Rp54,99 Miliar atau tumbuh sebesar 1,90% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp53,96 Miliar. Di sisi lain, terdapat penurunan pada beberapa komponen pajak dalam negeri seperti Pajak Penghasilan, Cukai, dan Pajak Dalam Negeri Lainnya. Komponen Pajak Penghasilan (PPH) tercatat menurun sebesar 2,07% (yoy).

Kenaikan PPh utamanya berasal dari komponen PPh Pasal 21 (pajak penghasilan perseorangan). Perbaikan tersebut juga didorong oleh peningkatan gaji pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 9,04% sesuai UMP Jambi menjadi sebesar Rp2,94 juta di tahun 2023. Selain itu, kurang stabilnya harga komoditas batubara dan sawit turut berpengaruh terhadap kenaikan PPh Badan. Lalu, penurunan juga terjadi pada realisasi pendapatan di sub komponen Pajak Dalam Negeri Lainnya yang pada Triwulan IV 2023 yang tercatat menyumbangkan Rp18,62 Miliar atau mengalami penurunan sebesar 9,02% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp20,46 Miliar.

Komponen Realisasi Pendapatan Pemerintah yang turut tumbuh positif adalah komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang tercatat meningkat menjadi Rp290,64 Miliar pada Triwulan IV 2023 atau tumbuh positif 224,05% (yoy). Realisasi pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp89,69 Miliar. Adapun sumber pendapatan PNBP lainnya berasal dari pendapatan Jasa Layanan Umum yang pada periode pelaporan tidak terdapat realisasi pendapatan. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi pada tahun 2022 dimana terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp84,39 Miliar.

Di sisi lain, pertumbuhan lebih lanjut juga tertahan oleh terkontraksinya pertumbuhan komponen Pajak Perdagangan Internasional. Adapun realisasi pos pendapatan ini pada Triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp18,50 Miliar atau terkontraksi sebesar 65,90% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan IV 2022 yaitu Rp54,27 Miliar. Penurunan pendapatan dari komponen pajak perdagangan internasional utamanya didorong oleh menurunnya ekspor beberapa komoditas utama seperti CPO dan turunannya serta batu bara, sehingga penerimaan bea keluar pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan bea keluar pada Triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp13,85 Miliar atau turun sebesar 73,15% (yoy) dibandingkan dengan realisasi Triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp51,59 Miliar. Sebaliknya, realisasi pendapatan bea masuk terpantau tumbuh sebesar 73,43% (yoy) menjadi Rp4,65 Miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV 2022 sebesar Rp2,68 Miliar. Penurunan pendapatan bea masuk dan bea keluar berjalan searah dengan penurunan pada kinerja ekspor dan peningkatan impor Provinsi Jambi pada triwulan laporan yang terkontraksi.

Berdasarkan kontribusinya, penerimaan pendapatan terbesar bersumber dari pendapatan Pajak Dalam Negeri yang mencapai Rp2,04 Triliun (pangsa 86,86%), dilanjutkan dengan Pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp290,64 Miliar (pangsa 12,35%), dan Pendapatan Perdagangan Internasional sebesar Rp18,50 Miliar (pangsa 0,79%) (GRAFIK 2.1).

Sementara itu, belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi hingga Triwulan IV 2023 terealisasi sebesar Rp9,06 Triliun atau tumbuh sebesar 100,99% (yoy) dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu

sebesar Rp4,51 Triliun (TABEL 2.4). Kenaikan angka realisasi belanja disebabkan oleh pertumbuhan yang terjadi pada semua komponen kecuali pada komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pos belanja lain-lain sebagai komponen dengan pangsa terbesar mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya di mana pada Triwulan IV 2023, belum terdapat realisasi pada pos belanja tersebut. Adapun nominal yang terealisasi adalah sebesar Rp1,77 Triliun (44,11% dari keseluruhan belanja pemerintah pusat). Adapun kenaikan realisasi komponen belanja lain-lain didorong oleh adanya transfer Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Insentif Fiskal yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan pangsanya, Belanja Lain-Lain disumbang oleh Transfer Dana Alokasi umum sebesar 45,40% atau Rp1,81 Triliun ; Dana Bagi Hasil sebesar 52,13% atau Rp2,08 Triliun; dan Dana Insentif Daerah sebesar 2,47% atau Rp98,64 Miliar.

Selain itu, pos belanja pegawai dan barang juga mengalami pertumbuhan terakselerasi masing-masing di angka 2,19% (yoy) dan 39,38% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun masing-masing pos terealisasi sebesar Rp686,74 Miliar dan Rp1,20 Triliun. Adapun realisasi belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya kenaikan realisasi komponen belanja barang disebabkan oleh penerapan pola kerja baru dalam pengoptimalan kebutuhan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sehubungan dengan era digitalisasi dan pola kerja baru.

Lebih lanjut, pertumbuhan belanja juga ditopang oleh komponen DAK Fisik yang terealisasi sebesar Rp667,44 Miliar, tumbuh sebesar 27,83% (yoy) dari triwulan IV 2022 yang tercatat senilai Rp522,15 Miliar. Sementara itu, DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp481 Miliar atau mengalami kontraksi sebesar 60,88% (yoy) dari triwulan IV 2022 yang tercatat senilai Rp1,23 Triliun. Adapun realisasi belanja DAK Fisik difokuskan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang sempat tertahan selama masa pandemi tahun 2022 lalu meliputi program reguler, afirmasi dan penugasan

sedangkan realisasi belanja DAK Non Fisik didominasi oleh realisasi dana penyaluran BOS, BOP PAUD dan BOP kesetaraan.

Selanjutnya, pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat di daerah juga didorong oleh komponen bantuan sosial yang tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Triwulan IV 2023, pos ini terealisasi sebesar Rp14,54 Miliar atau tumbuh 19,28% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp12,19 Miliar. Peningkatan realisasi belanja tersebut juga didorong oleh peningkatan alokasi anggaran yang mengindikasikan komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jambi.

Selain itu, komponen belanja modal juga tercatat mengalami pertumbuhan dengan realisasi sebesar Rp1,78 Triliun atau meningkat sebesar 82,18% (yoy) dibandingkan angka realisasi belanja triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp975,67 Miliar. Peningkatan belanja modal tersebut diindikasikan terjadi seiring dengan peningkatan realisasi pemerintah dalam perbaikan infrastruktur serta sarana prasarana publik seperti pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung, bangunan air, alat kedokteran dan kesehatan, serta peralatan dan mesin.

Komponen Dana Desa juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,26% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Komponen ini terealisasi sebesar Rp233,82 Miliar dan disalurkan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, keberhasilan monitoring penyampaian laporan dana desa dan APBDes oleh masing-masing pemerintah Kab/Kota kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Provinsi Jambi turut mendukung realisasi pos ini.

Berdasarkan pangsanya, realisasi belanja pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk belanja lain-lain (44,11%), belanja modal (19,61%), belanja barang (13,28%), belanja pegawai (7,58%), DAK fisik (7,36%), DAK non fisik (5,31%), dana desa (2,58%) dan belanja bantuan sosial (0,16%).(GRAFIK 2.2).

Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

REALISASI BELANJA	2022				2023			
	TW I (Rp. Juta)	TW II (Rp. Juta)	TW III (Rp. Juta)	TW IV (Rp. Juta)	TW I (Rp. Juta)	TW II (Rp. Juta)	TW III (Rp. Juta)	TW IV (Rp. Juta)
I BELANJA PEGAWAI	490,145	719,179	497,004	472,010	506,433	1,360,085	574,131	486,736
II BELANJA BARANG	282,492	559,031	411,914	863,773	486,060	1,176,923	743,834	1,203,956
III BELANJA DENDA DAN SUBSIDI PERUSAHAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
IV BELANJA BANTUAN SOSIAL	72	7,982	231	12,196	1,420	11,437	402	14,547
V BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-	-	2,250,342	4,459,282	2,514,394	3,998,230
VI BELANJA MODAL	196,204	241,672	335,367	975,674	153,918	464,913	874,921	1,777,484
VII DANA DESA	139,777	474,631	272,030	233,211	248,122	644,980	308,660	233,817
VIII DAK FISIK	-	92,249	378,339	522,152	4,732	144,224	275,725	467,445
VIII DAK NON FISIK	245,307	218,230	94,941	1,230,462	393,339	988,526	478,090	481,356
<b>TOTAL REALISASI BELANJA</b>	<b>1,383,999</b>	<b>2,312,994</b>	<b>2,389,828</b>	<b>4,509,479</b>	<b>4,044,366</b>	<b>9,250,380</b>	<b>5,770,358</b>	<b>9,063,573</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil V Jambi, Laporan Realisasi Pendapatan Wilayah Jambi. Unaudited, (diolah)

### 2.3 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

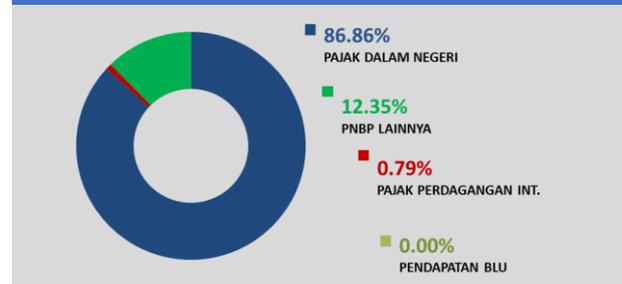
Jumlah simpanan Pemerintah Daerah di perbankan Jambi pada Triwulan IV 2023 adalah sebesar Rp3,00 Triliun, meningkat sebesar 18,19% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,54 Triliun (GRAFIK 2.3).

Pertumbuhan simpanan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi didorong oleh peningkatan simpanan Deposito dan Tabungan, sementara itu simpanan Giro mengalami pertumbuhan negatif pada periode laporan. Simpanan Giro pada Triwulan IV 2023 turun sebesar 24,45% menjadi Rp1,90 Triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai Rp2,51 Triliun. Secara keseluruhan, total simpanan Pemerintah Daerah di perbankan pada Triwulan laporan terpantau lebih tinggi.

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan simpanan tersebut sejalan dengan akselerasi realisasi belanja pemerintah dibandingkan periode sebelumnya.

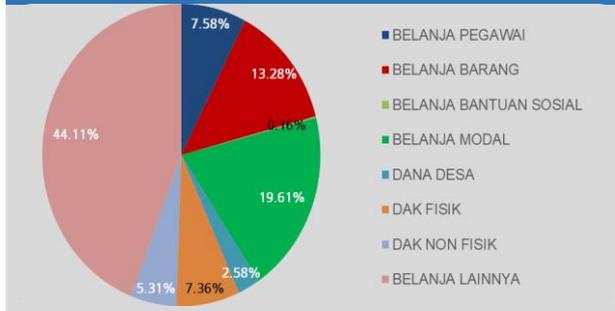
Berdasarkan komposisinya, simpanan pemerintah lebih banyak ditempatkan dalam bentuk giro sebesar 63,25% dan diikuti oleh deposito dan tabungan dengan komposisi masing-masing sebesar 31,09% dan 5,66%.

Grifik 2.1. Pangsa Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi



Sumber: Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Kanwil Provinsi Jambi (diolah)

Grifik 2.2. Pangsa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi



Sumber: Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Kanwil Provinsi Jambi (diolah)

Grifik 2.3. Perkembangan Simpanan Pemerintah Provinsi Jambi di Perbankan



Sumber: LBU Bank Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



### BAB III

## PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan IV 2023, IHK Gabungan 2 (dua) Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 3,22% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

### 3.1 KAJIAN UMUM



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Pada triwulan IV 2023, inflasi<sup>1</sup> *year-on-year* gabungan 2 (dua) Kota di Provinsi Jambi<sup>2</sup> tercatat sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,70% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 2,68% (yoy) (GRAFIK 3.1). Laju inflasi Gabungan Kota di Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo yang masing-masing tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan 2,85% (yoy)<sup>3</sup>, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan 2,85% (yoy). (GRAFIK 3.2).

Secara triwulanan, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Kota di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 mengalami inflasi sebesar 1,51% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,43% (qtq). Selanjutnya, secara kumulatif, pergerakan IHK Gabungan Kota di Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2023 tercatat inflasi sebesar 3,22% (ytd), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,69% (ytd).

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahun ke tahun (yoy) gabungan Kota di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok transportasi, serta kelompok perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga. Selanjutnya,

perkembangan inflasi gabungan pada periode Januari 2024 sebesar 2,99% (yoy), relatif lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, seiring dengan berlalunya momentum HBKN Natal dan Tahun Baru pada Desember 2023.

Pada Desember 2023, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm) yang terutama disumbangkan oleh kenaikan level IHK pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar pada inflasi di Kota Jambi yang didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan level IHK pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT serta perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin RT sejalan dengan penurunan harga minyak dunia dan penurunan kinerja sektor konstruksi serta harga bahan bangunan di tengah musim hujan.

Sejalan dengan Kota Jambi, pada Desember 2023, Kabupaten Bungo mengalami inflasi *month-to-month* sebesar 0,31%. Inflasi tersebut disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, serta dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi *month-to-month* yang terjadi di Kabupaten Bungo, didorong oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti bawang merah dan daging ayam ras.

Pada Triwulan I 2024, inflasi gabungan kota di Provinsi diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023, didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sejalan dengan dampak banjir yang mengganggu ketersediaan pasokan serta adanya momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang umumnya meningkatkan permintaan masyarakat. Meskipun demikian, berbagai upaya

<sup>1</sup> Sejak Januari 2020, perhitungan inflasi di seluruh wilayah Indonesia telah menggunakan Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen (IHK) Tahun Dasar 2018. Dengan adanya pemutakhiran IHK Tahun Dasar 2018 serta penyempurnaan metodologi penghitungan IHK maupun inflasi, terdapat beberapa penyesuaian dalam jumlah keranjang komoditas IHK yang disurvei, pembobotan kota sampel berdasarkan Nilai Konsumsi (NK), serta data inflasi yang disajikan dalam 11 kelompok pengeluaran (sebelumnya 7 kelompok pengeluaran) dengan nomenklatur yang disesuaikan.

<sup>2</sup> Inflasi Provinsi Jambi merupakan agregat dari dua kota sampel perhitungan IHK yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo

<sup>3</sup> Sejak Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi menjadi Kota Jambi dan Muara Bungo; Sementara dengan TD 2018 terdapat penambahan kota sampel inflasi di tingkat nasional dari 82 kota menjadi 90 kota.

stabilisasi harga dan pasokan akan terus dilakukan oleh TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota melalui penguatan sinergi dengan instansi terkait. Mempertimbangkan hal tersebut, inflasi triwulan I 2024 diperkirakan tetap berada di antara rentang sasaran inflasi nasional  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy) sejalan dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat respon koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah serta mitra strategis lainnya melalui penguatan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menyelenggarakan berbagai kegiatan Pencanangan GNPIP Provinsi Jambi sejak 23 September 2022. Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen dan sinergi KPwBI Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah dalam menjaga terkendalinya inflasi di Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, FORKOPIMDA Provinsi Jambi, Kepala Instansi Vertikal, serta OPD terkait.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) merupakan bentuk aksi nyata yang bersifat *nation-wide*, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 lalu yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi serta komitmen Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam mengoptimalkan upaya dan langkah pengendalian inflasi pangan guna menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan *road to* GNPIP Provinsi Jambi, Bank Indonesia beserta seluruh anggota TPID Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program, di antaranya penyelenggaraan pasar murah dan penyerahan bantuan berupa bibit cabai dan saprodi budidaya ikan nila, serta alsintan kepada beberapa kelompok tani dan instansi sejak 13 Agustus 2022.

Sebagai wujud komitmen dan sinergi antar pihak dalam menyukseskan GNPIP dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi dan mendukung digitalisasi pertanian, pada kegiatan ini, dilakukan beberapa komitmen/kerjasama di antaranya Penandatanganan Komitmen Dukungan GNPIP oleh KPwBI Provinsi Jambi dengan seluruh Walikota/Bupati se-Provinsi Jambi, Penandatanganan kerja sama Digitalisasi Pertanian Provinsi Jambi, Pencanangan Gerakan Menanam Cabai, dan Pencanangan Gerakan Konsumsi Cabai Olah. Pada kegiatan tersebut, KPwBI Provinsi Jambi juga memberikan bantuan, yaitu bibit cabai merah kepada tiga pondok pesantren; Penyerahan bantuan alsintan dan saprodi kepada SMKPP Negeri Jambi; dan Penyerahan Subsidi Ongkos Angkut dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis kepada TPID Provinsi Jambi.

Selanjutnya, sebagai upaya pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga selama 2023 melalui kerangka 4K di antaranya:

- a) Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) di tingkat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh kepala daerah.
- b) KPwBI Provinsi Jambi bersama dengan TPID Provinsi Jambi melakukan studi tiru Upaya Pengendalian Inflasi TPID Provinsi Gorontalo pada tanggal 16-17 Maret 2023 dan ke TPID Provinsi DKI Jakarta pada 25-26 September 2023 yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi.
- c) Pelaksanaan Rapat Koordinasi TPID Provinsi Jambi dan kab/kota dalam rangka perumusan strategi pengendalian inflasi, evaluasi program, serta perumusan materi *championship program* TPID 2023.
- d) Pelaksanaan sidak pasar dan operasi pasar murah oleh TPID bersama Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi untuk memastikan kestabilan harga serta ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, baik secara rutin maupun menjelang HBKN.
- e) Pertemuan koordinasi TPID Provinsi Jambi dengan distributor komoditas pangan strategis serta Organisasi Angkatan Darat dan Udara yang dipimpin langsung oleh

Gubernur Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota TPID, BPS, Bulog, serta 35 distributor pangan (beras, gula, minyak goreng, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras). Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga.

- f) KPwBI Provinsi Jambi melakukan sosialisasi Program Kampung BANTAR (Bersih, Aman, dan Pintar) dan Kampung Peduli Inflasi tahun 2023 pada tanggal 8 Maret 2023. Program ini merupakan salah satu upaya edukasi inflasi kepada masyarakat tingkat RT dalam bentuk kegiatan *urban farming* hasil sinergi BI dan Pemkot Jambi.
- g) Panen cabai merah pada tanggal 11 April 2023 berlokasi di lahan milik Kelompok Tani Sumber Makmur, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, yang dipimpin langsung oleh Walikota Jambi. Panen tersebut merupakan tindak lanjut program gerakan "Payo Menanam Cabai" yang digagas oleh Pemkot Jambi sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi. Kegiatan panen juga dilakukan serentak di 3 kecamatan lainnya yaitu Telanaipura, Alambarajo, dan Danau Teluk. Total panen cabai merah di 4 kecamatan tersebut diperkirakan mencapai 4 ton dan diharapkan mampu menambah pasokan cabai menjelang Idul Fitri.
- h) Pelaksanaan *kick off* Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 yang ditindaklanjuti dengan safari GNPIP ke Kab/Kota di Provinsi Jambi.
- i) Penandatanganan MoU KAD antara pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 8 Juni 2023 untuk komoditas beras dan Penandatanganan MoU KAD antara pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Brebes pada tanggal 21 Juli 2023 untuk komoditas bawang merah.
- j) Gerakan Bersama Pembelian Beras Lokal (Bulog) oleh ASN, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan lembaga keuangan.

Lebih Lanjut, untuk mengantisipasi inflasi pada triwulan I 2024, TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota akan tetap melakukan upaya stabilisasi harga melalui berbagai upaya intervensi seperti sidak pasar dan operasi pasar secara rutin

untuk memantau keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, penguatan sinergi TPID se-Provinsi Jambi dengan instansi terkait, melanjutkan program subsidi angkut, dan pelaksanaan HLM serta Rakor TPID di seluruh Provinsi Jambi.

### 3.2 INFLASI KOTA JAMBI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG

**Inflasi Kota Jambi triwulan IV 2023 tercatat sebesar 3,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,78% (yoy).** Peningkatan laju inflasi pada triwulan IV 2023 tersebut terutama didorong oleh meningkatnya inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring penurunan pasokan komoditas pangan di tengah musim kemarau panjang yang diakibatkan oleh fenomena El Nino serta adanya momentum HBKN Natal dan Tahun Baru yang umumnya meningkatkan permintaan masyarakat akan komoditas pangan.

**3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Pada triwulan IV 2023, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 7,97% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,86% (yoy).** Kelompok ini menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kota Jambi pada triwulan IV 2023 dengan sumbangan sebesar 0,89%.

Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2023 terutama disumbangkan oleh sub kelompok makanan sebesar 7,58% (yoy) dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 1,86%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,83% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,21%. Inflasi pada sub kelompok makanan tersebut didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, tomat, kangkung, ikan nila, bayam, beras, bawang putih, dan udang basah yang didorong oleh beberapa kondisi seperti terganggunya pasokan akibat fenomena El Nino serta adanya momentum HBKN Natal dan Tahun Baru yang meningkatkan permintaan masyarakat akan komoditas pangan.

Selain itu, inflasi kelompok ini juga disumbangkan oleh inflasi pada sub kelompok rokok dan tembakau sebesar 10,42% (yoy) dengan andil 0,46% atau tercatat mengalami deselerasi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 12,38% (yoy) dengan andil sebesar 0,53% yang disebabkan oleh masih tertransmisinya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang ditetapkan sejak awal tahun 2023 dengan besaran kenaikan rata-rata 10% sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

Selanjutnya, kelompok minuman yang tidak beralkohol juga terpantau mengalami inflasi pada triwulan IV 2023 sebesar 7,25% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,13% (yoy). Secara keseluruhan, berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama disumbangkan oleh komoditas beras (16,18%, yoy), cabai merah (52,66%, yoy), rokok kretek filter (12,55%, yoy), bawang putih (54,33%, yoy), ikan nila (10,42%, yoy), kopi bubuk (23,11%, yoy), ikan patin (33,21%, yoy), rokok putih (8,84%, yoy).

**Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Kota Jambi**



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Harga beras, sebagai komoditas yang memiliki bobot cukup tinggi pada perhitungan inflasi, pada triwulan IV 2023 terus menunjukkan tren peningkatan harga. Berdasarkan rilis BPS, harga komoditas beras, tercatat meningkat sebesar 16,18% (yoy) dengan andil sebesar 0,62%. Hal serupa juga ditunjukkan pada hasil SPH dimana rerata harga cabai merah pada Desember 2023 tercatat sebesar Rp15.012/kg atau naik sebesar 14,52% dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya. Lebih lanjut, data PIHPS menunjukkan rerata harga beras pada Desember 2023 mengalami peningkatan 6,19% (yoy). (GRAFIK 3.3). Peningkatan harga beras tersebut didorong oleh kondisi pasokan pada triwulan berjalan yang mengalami gangguan akibat fenomena El Nino yang menyebabkan inoptimalisasi panen di tengah meningkatnya permintaan masyarakat pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, kenaikan harga cabai merah pada triwulan IV 2023 didorong oleh adanya penurunan pasokan di masa panen gadu dan musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Sejalan dengan hal tersebut, Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan arah yang sejalan dengan hasil rilis inflasi tersebut. Rerata harga cabai merah di Kota Jambi pada Desember 2023 Rp60.221/kg atau meningkat sebesar 22,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun rerata harga tersebut juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp41.283/kg. Selanjutnya, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rerata harga cabai pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar Rp51.752/kg atau meningkat sebesar 59,20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun rerata harga tersebut juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp31.783/kg.

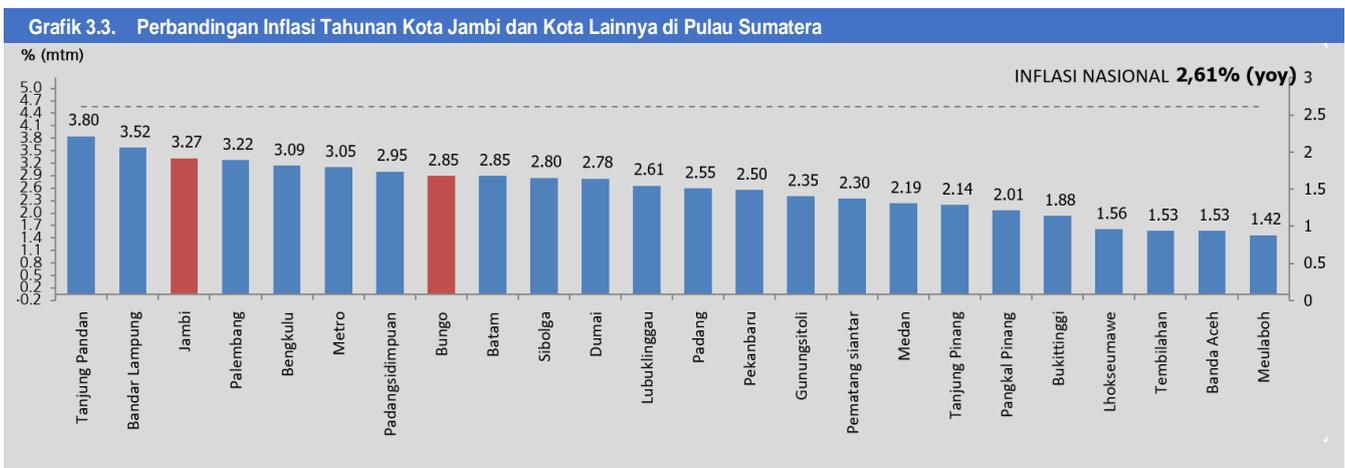
Selanjutnya, kenaikan harga komoditas bawang putih pada triwulan berjalan terpantau meningkat dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 56,39% (yoy) yang didorong oleh adanya penurunan realisasi impor sehubungan dengan adanya retriksi kuota impor bawang putih. Berdasarkan data PIHPS, pada bulan Desember 2023, rerata harga bawang putih tercatat sebesar Rp32.274/kg atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp20.636/kg. (GRAFIK 3.7).

Lebih lanjut, kenaikan harga komoditas kopi bubuk didorong oleh kondisi perubahan cuaca yang menyebabkan kondisi produksi panen tidak setinggi sebelumnya. Penurunan produksi di beberapa negara produsen turut mendorong kenaikan harga kopi di pasar global, khususnya kopi jenis

robusta, di tengah peningkatan permintaan global dan juga domestik mengingat semakin banyaknya usaha kedai kopi seiring membaiknya kondisi perekonomian dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti minyak goreng (-8,43%, yoy), daging ayam ras (-7,51%, yoy), dan udang basah (-15,15%, yoy) dengan sumbangan masing-masing sebesar -0,15%; -0,12%; dan -0,08%. Penurunan harga minyak goreng sejalan dengan melandainya harga *Crude Palm Oil* (CPO) global. Pada triwulan laporan, harga CPO mencapai 685 USD, atau lebih rendah dibandingkan 7894 USD pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penurunan harga minyak goreng turut didukung oleh ketersediaan pasokan domestik sejalan dengan kebijakan pengetatan *Domestic Market Obligation* (DMO) dari 1:6 pada periode sebelumnya menjadi 1:4. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya menjaga stabilisasi permintaan minyak goreng di dalam negeri. Berdasarkan data PIHPS, rerata harga minyak goreng

di Kota Jambi pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar Rp17.600/kg, lebih rendah dibandingkan Rp17.450/kg pada Desember 2022 (GRAFIK 3.4).



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)



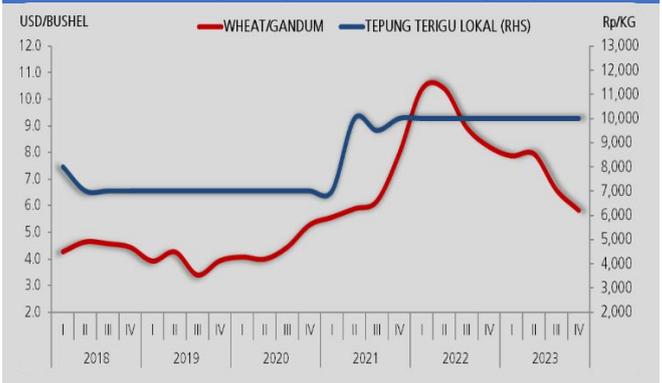
Sumber: PIHPS Nasional (diolah)



Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

**Grifik 3.6. Perkembangan Harga Beras Lokal dan Internasional**

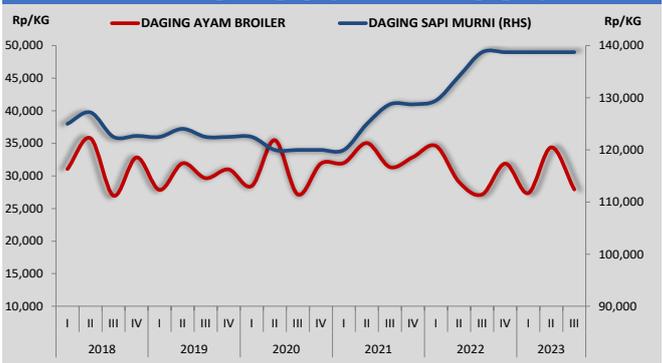

Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

**Grifik 3.7. Perkembangan Harga Gandum dan Tepung Terigu**


Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

**Grifik 3.8. Perkembangan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih**


Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

**Grifik 3.9. Perkembangan Daging Ayam Ras dan Daging Sapi**


Sumber: Bloomberg dan PIHPS Nasional (diolah)

**Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Jambi (Tahun Dasar 2018)**

KELOMPOK	TRIWULAN IV-2022				TRIWULAN I-2023				TRIWULAN II-2023				TRIWULAN III-		TRIWULAN IV-2023			
	INFLASI (QIQ %)	SMBGN	INFLASI (YOY %)	SMBGN	INFLASI (QIQ %)	SMBGN	INFLASI (YOY %)	SMBGN	INFLASI (QIQ %)	SMBGN	INFLASI (YOY %)	SMBGN	INFLASI (YOY %)	SMBGN	INFLASI (QIQ %)	SMBGN	INFLASI (YOY %)	SMBGN
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	-0.95	-0.29	5.90	1.82	2.03	0.62	5.52	1.72	1.35	0.42	-0.86	-0.28	2.86	0.89	3.98	1.25	7.97	2.45
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0.00	0.00	0.84	0.06	0.03	0.00	0.95	0.06	0.27	0.02	0.51	0.03	0.39	0.02	0.03	0.00	0.42	0.03
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.02	0.00	4.55	0.84	0.12	0.02	2.77	0.51	0.65	0.12	2.39	0.43	0.57	0.10	-0.29	-0.05	0.25	0.05
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	1.03	0.06	6.33	0.38	1.15	0.07	5.28	0.32	0.17	0.01	3.54	0.21	2.60	0.15	0.10	0.01	1.66	0.10
KESEHATAN	-0.48	-0.01	1.15	0.01	0.66	0.01	1.11	0.02	0.42	0.01	0.62	0.01	0.67	0.01	0.69	0.01	1.86	0.03
TRANSPORTASI	1.33	0.18	21.25	2.48	-2.58	-0.34	16.50	1.92	0.31	0.04	8.61	1.04	1.09	0.14	1.91	0.25	1.66	0.22
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.00	0.00	-0.63	-0.03	-0.25	-0.01	-0.68	-0.03	0.00	0.00	-0.46	-0.02	-0.01	0.00	-0.32	-0.01	-0.33	-0.02
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0.00	0.00	0.27	0.01	0.00	0.00	0.19	0.00	0.02	0.00	0.24	0.005	0.02	0.0003	0.29	0.01	0.31	0.01
PENDIDIKAN	0.00	0.00	0.54	0.02	0.13	0.01	0.68	0.03	0.00	0.00	0.51	0.02	0.82	0.03	0.00	0.00	0.82	0.03
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0.06	0.00	4.16	0.29	0.15	0.01	3.28	0.23	0.63	0.04	1.94	0.13	1.18	0.08	0.00	0.00	1.11	0.08
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	2.21	0.14	8.38	0.52	2.15	0.13	7.50	0.47	0.95	0.06	7.08	0.43	5.46	0.34	1.48	0.09	4.70	0.30
<b>UMUM</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	<b>5.24</b>	<b>5.24</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>	<b>1.78</b>	<b>1.78</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>3.27</b>	<b>3.27</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa (TD 2018)**

KELOMPOK	TW IV-2022		TW E2023		TW I-2023		TW II-2023		TW IV-2023	
	qtt	yoy	qtt	yoy	qtt	yoy	qtt	yoy	qtt	yoy
<b>I. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU</b>	<b>-0.95</b>	<b>5.90</b>	<b>2.03</b>	<b>5.52</b>	<b>1.35</b>	<b>-0.86</b>	<b>0.42</b>	<b>2.86</b>	<b>3.98</b>	<b>7.97</b>
a. MAKANAN	-1.93	4.63	1.81	4.25	0.88	-3.74	0.10	0.83	4.64	7.58
b. MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	0.54	8.12	4.18	9.83	1.80	10.99	1.71	8.45	-0.58	7.25
c. ROKAK DAN TEMBAKAU	4.14	12.49	2.40	11.15	3.72	12.17	1.60	12.38	2.33	10.42
<b>II. PAKAIAN DAN ALAS KAKI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>	<b>0.03</b>	<b>0.95</b>	<b>0.27</b>	<b>0.51</b>	<b>0.09</b>	<b>0.39</b>	<b>0.03</b>	<b>0.42</b>
a. PAKAIAN	0.00	1.03	0.04	1.17	0.32	0.62	0.12	0.48	0.00	0.48
b. ALAS KAKI	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.20
<b>III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA</b>	<b>0.02</b>	<b>4.55</b>	<b>0.12</b>	<b>2.77</b>	<b>0.65</b>	<b>2.39</b>	<b>-0.21</b>	<b>0.57</b>	<b>-0.29</b>	<b>0.25</b>
a. SEWA DAN KONTRAK RUMAH	0.00	0.57	0.24	0.54	0.00	0.36	0.00	0.24	0.00	0.24
b. PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	0.06	2.44	0.25	1.60	-1.57	-1.77	-0.54	-1.80	-1.12	-2.96
c. PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31	9.31	0.00	9.31	0.00	9.31
d. LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.00	12.77	-0.04	7.28	-0.06	5.52	-0.25	-0.36	0.00	-0.36
<b>IV. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA</b>	<b>1.03</b>	<b>6.33</b>	<b>1.15</b>	<b>5.28</b>	<b>0.17</b>	<b>3.54</b>	<b>0.23</b>	<b>2.60</b>	<b>0.10</b>	<b>1.66</b>
a. FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	-0.06	5.77	-0.58	3.78	2.71	2.97	0.84	2.90	0.00	2.96
b. TEKSTIL RUMAH TANGGA	0.00	2.16	-0.12	1.22	0.00	0.38	0.06	0.19	0.00	-0.05
c. PERALATAN RUMAH TANGGA	0.15	1.07	2.88	4.28	0.15	3.43	0.24	3.44	0.00	3.28
d. BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	1.42	2.19	0.00	2.93	1.09	2.10	-0.07	2.46	0.00	1.02
e. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	0.40	3.15	2.36	3.49	0.08	3.15	0.00	2.86	0.00	2.45
f. BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	1.55	9.38	1.40	6.92	-0.56	4.35	0.18	2.58	0.20	1.21
<b>V. KESEHATAN</b>	<b>-0.48</b>	<b>0.47</b>	<b>0.66</b>	<b>1.11</b>	<b>0.42</b>	<b>0.62</b>	<b>0.07</b>	<b>0.67</b>	<b>0.69</b>	<b>1.86</b>
a. OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	-1.13	1.15	1.57	2.69	1.00	1.46	0.18	1.61	1.62	4.43
b. JASA RAWAT JALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. JASA RAWAT INAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI. TRANSPORTASI</b>	<b>1.33</b>	<b>21.25</b>	<b>-2.58</b>	<b>16.50</b>	<b>0.31</b>	<b>8.61</b>	<b>2.09</b>	<b>1.09</b>	<b>1.91</b>	<b>1.66</b>
a. PEMBELIAN KENDARAAN	0.17	9.41	1.27	6.02	0.55	2.77	0.43	2.43	0.05	2.32
b. PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	1.37	21.27	-0.29	20.55	-0.68	17.51	0.85	1.24	0.66	0.54
c. JASA ANGKUTAN PENUMPANG	2.91	42.51	-13.41	24.63	2.69	-2.51	8.06	-1.11	7.73	3.51
d. JASA PENGIRIMAN BARANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	2.12	2.54
<b>VII. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.63</b>	<b>-0.25</b>	<b>-0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.46</b>	<b>0.24</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.32</b>	<b>-0.33</b>
a. PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	-0.01	-2.31	-1.04	-2.90	-0.01	-1.95	0.00	-1.06	-1.72	-2.75
b. LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.10	0.44
c. ASURANSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. JASA KEUANGAN	0.00	-2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VIII. REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.02</b>	<b>0.24</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>0.29</b>	<b>0.31</b>
a. BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. LAYANAN KEBUDAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	0.00	0.49	0.00	0.34	0.04	0.43	-0.02	0.02	0.54	0.56
<b>IX. PENDIDIKAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.54</b>	<b>0.13</b>	<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>	<b>0.68</b>	<b>0.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.82</b>
a. PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	2.45	2.45	0.00	2.45
b. PENDIDIKAN MENENGAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. PENDIDIKAN TINGGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26
d. PENDIDIKAN LAINNYA	0.00	1.18	0.96	2.15	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96
<b>X. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN</b>	<b>0.06</b>	<b>4.16</b>	<b>0.15</b>	<b>3.28</b>	<b>0.63</b>	<b>1.94</b>	<b>0.33</b>	<b>1.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1.11</b>
a. JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	0.06	4.16	0.15	3.28	0.63	1.94	0.33	1.18	0.00	1.11
<b>XI. PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA</b>	<b>2.21</b>	<b>8.38</b>	<b>2.15</b>	<b>7.50</b>	<b>0.95</b>	<b>7.08</b>	<b>0.06</b>	<b>5.46</b>	<b>1.48</b>	<b>4.70</b>
a. PERAWATAN PRIBADI	1.39	8.23	2.49	7.82	0.78	6.84	0.41	5.16	0.83	4.58
b. PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	3.80	27.55	1.54	6.11	1.42	6.97	-0.74	5.34	3.15	5.45
c. PERLINDUNGAN SOSIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. JASA LAINNYA	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>UMUM</b>	<b>0.08</b>	<b>6.39</b>	<b>0.52</b>	<b>5.24</b>	<b>0.72</b>	<b>2.01</b>	<b>0.45</b>	<b>1.78</b>	<b>1.55</b>	<b>3.27</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 3.3. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Berdasarkan Komoditas**

10 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI		TW IV-2023 SUMBANGAN	10 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI		TW IV-2023 SUMBANGAN
<b>OKTOBER</b>					
1.	DAGING AYAM RAS	0.1260	1.	IKAN NILA	-0.0551
2.	CABAI MERAH	0.1112	2.	TOMAT	-0.0395
3.	ANGKUTAN UDARA	0.0727	3.	KENTANG	-0.0211
4.	BERAS	0.0555	4.	CUMI-CUMI	-0.0152
5.	ROTI MANIS	0.0446	5.	UDANG BASAH	-0.0120
6.	BENSIN	0.0364	6.	KOL PUTIH/KUBIS	-0.0108
7.	TEMPE	0.0354	7.	SAWI PUTIH	-0.0087
8.	ROKOK KRETEK FILTER	0.0345	8.	IKAN TONGKOL	-0.0070
9.	KANGKUNG	0.0286	9.	BAWANG PUTIH	-0.0070
10.	CABAI RAWIT	0.0243	10.	TERONG	-0.0056
<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>		<b>0.5692</b>	<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>		<b>-0.1820</b>
<b>NOVEMBER</b>					
1.	CABAI MERAH	0.5226	1.	DAGING AYAM RAS	-0.1598
2.	IKAN NILA	0.0960	2.	SEMEN	-0.0257
3.	ANGKUTAN UDARA	0.0710	3.	BENSIN	-0.0195
4.	CABAI RAWIT	0.0668	4.	AIR KEMASAN	-0.0154
5.	BAWANG MERAH	0.0617	5.	TELEPON SELULER	-0.0145
6.	EMAS PERHIASAN	0.0471	6.	APEL	-0.0125
7.	GULA PASIR	0.0286	7.	BAWANG PUTIH	-0.0125
8.	CABAI HIJAU	0.0277	8.	JENGKOL	-0.0117
9.	PEMELIHARAAN/SERVICE	0.0237	9.	WORTEL	-0.0108
10.	KETIMUN	0.0197	10.	TOMAT	-0.0101
<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>		<b>0.9649</b>	<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>		<b>-0.2925</b>
<b>DESEMBER</b>					
1.	BAWANG MERAH	0.1119	1.	CABAI MERAH	-0.1087
2.	DAGING AYAM RAS	0.0904	2.	CABAI RAWIT	-0.0779
3.	ANGKUTAN UDARA	0.0574	3.	MINYAK GORENG	-0.0470
4.	TOMAT	0.0537	4.	JENGKOL	-0.0240
5.	KANGKUNG	0.0297	5.	CABAI HIJAU	-0.0152
6.	IKAN NILA	0.0281	6.	IKAN TONGKOL	-0.0121
7.	BAYAM	0.0275	7.	KERANG	-0.0076
8.	BERAS	0.0228	8.	SEMEN	-0.0074
9.	BAWANG PUTIH	0.0223	9.	JERUK	-0.0052
10.	UDANG BASAH	0.0207	10.	IKAN DENCIS	-0.0051
<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>		<b>0.4645</b>	<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>		<b>-0.3102</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

### 3.2.2 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah

Pada triwulan IV 2023, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,25% (yoy) dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 0,05%. Inflasi pada kelompok ini terpantau mengalami deselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,57% (yoy) dengan andil sebesar 0,10%. Inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga terutama didorong oleh inflasi pada sub kelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya yang tercatat inflasi sebesar 9,31% (yoy) dengan andil 0,20%, disebabkan oleh kenaikan tarif air minum PAM sebesar 9,51% sejalan dengan penyesuaian tarif baru PDAM sebesar 10%-15% per 1 April 2023 sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Jambi No. 7 tahun 2023. Selanjutnya, sub kelompok sewa dan

kontrak rumah juga terpantau mengalami inflasi sebesar 0,24% (yoy) dengan andil 0,01%. Hal tersebut terutama didorong oleh kenaikan tarif kontrak rumah sejalan dengan penyesuaian rutin tahunan. Sementara itu, sub kelompok Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/Perumahan pada Triwulan IV 2023 tercatat mengalami deflasi sebesar 2,96% (yoy) dengan andil sebesar -0,14% serta sub kelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga yang turut tercatat deflasi sebesar -0,36% dengan andil sebesar -0,02 diindikasikan oleh penurunan harga LPG non-subsidi sejalan dengan tren *liquid petroleum gas (LPG) price contract* di pasar global yang mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir.

### 3.2.3 Kelompok Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada triwulan IV 2023 mengalami inflasi sebesar 1,11% (yoy)

dengan andil sebesar 0,08%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat naik sebesar 1,18% (yoy) dengan andil sebesar 0,08%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas pizza, bubur dan ayam goreng dengan kenaikan harga masing-masing sebesar 32,82% (yoy), 20,00% (yoy), dan 2,02% (yoy). Inflasi pada komoditas tersebut sejalan dengan inflasi pada bahan utama dan pendukungnya yaitu beras, tepung terigu, dan daging ayam ras yang masing-masing mengalami kenaikan harga sebesar 15,49% (yoy), 2,38% (yoy), dan 4,94% (yoy).

### 3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2023, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tercatat inflasi sebesar 1,66% (yoy) dengan andil 0,10%. Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,60% (yoy) dengan andil sebesar 0,15%. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh inflasi pada sub kelompok peralatan rumah tangga sebesar 3,28% (yoy) dengan andil 0,03%. Sementara itu, sub kelompok furniture, perlengkapan, dan karpet juga mengalami inflasi sebesar 2,96% (yoy) dengan andil sebesar 0,02%. Secara umum, komoditas pendorong inflasi pada kelompok ini antara lain pembasmi nyamuk bakar, pemutih, karpet, kompor, dan pompa air yang masing-masing naik sebesar 21,11% (yoy), 17,06% (yoy), 11,08% (yoy), 10,68% (yoy), dan 7,85% (yoy). Kenaikan harga pada komoditas tersebut didorong adanya penyesuaian tarif PPN 11% sejak April 2023 dan penyesuaian upah tahunan.

### 3.2.5 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

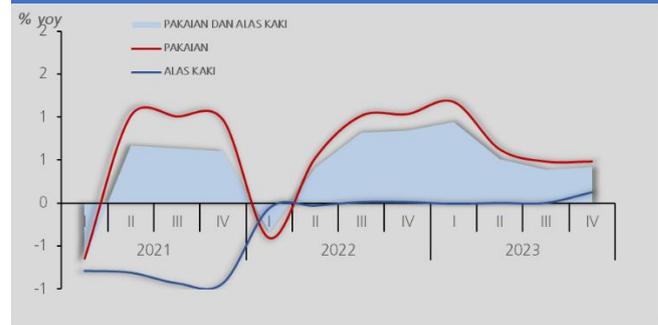
Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi tahunan sebesar 0,31% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,01%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,02% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,00%. Inflasi kelompok ini terutama disumbangkan oleh sub kelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah yang tercatat inflasi sebesar 0,56% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%. Inflasi tersebut ditopang oleh kenaikan harga buku tulis bergaris dan kertas HVS masing-masing sebesar 0,49% (yoy) dan 0,30% (yoy) sejalan dengan

kenaikan harga bahan baku produksi yakni kertas dan tinta. Sementara itu, inflasi sub kelompok lainnya terpantau stabil.

### 3.2.6 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,42% (yoy) dengan sumbangan 0,03% terhadap inflasi umum di Kota Jambi. Realisasi inflasi tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,39% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,02%. Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh peningkatan harga pada sub kelompok pakaian sebesar 0,48% (yoy) dengan andil sebesar 0,02%. Berdasarkan komoditasnya, inflasi sub kelompok tersebut didorong oleh kenaikan harga pada komoditas seragam sekolah anak sebesar 5,72% (yoy), sejak masuknya periode tahun ajaran baru 2023/2024 pada Juli 2023.

Grafik 3.10. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kota Jambi



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

### 3.2.7 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Pada triwulan IV 2023, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 4,70% (yoy) dengan andil 0,30% atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,46% (yoy) dengan andil sebesar 0,34%. Inflasi kelompok tersebut utamanya disumbangkan oleh sub kelompok perawatan pribadi yang terpantau mengalami inflasi sebesar 4,58% (yoy) dengan andil 0,19, yang didorong oleh kenaikan harga pada komoditas sabun mandi (16,43%, yoy), sabun mandi cair (9,71%, yoy), dan pasta gigi (6,18%, yoy). Lebih lanjut, sub kelompok perawatan pribadi lainnya juga terpantau mengalami inflasi sebesar 5,45% (yoy) dengan andil sebesar 0,10%, didorong oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan sebesar 8,90% (yoy), dengan andil 0,08%. Peningkatan harga emas perhiasan didorong oleh penguatan harga emas global di triwulan IV 2023. Berdasarkan data

Bloomberg, harga emas internasional pada Desember 2023 tercatat sebesar 1.951 USD/Troy Ounce, lebih tinggi dibandingkan 1796 USD/Troy Ounce pada Desember 2022. (GRAFIK 3.9). Sejalan dengan hal tersebut, data SPH menunjukkan bahwa rerata harga emas perhiasan 24 karat pada Desember 2023 sebesar Rp937.500/gram, lebih tinggi dibandingkan Rp853.000/gram pada Desember 2022.

### 3.2.8 Kelompok Pendidikan

Secara tahunan, kelompok pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar **0,82% (yoy)** dengan andil **0,03%**. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini serta pendidikan lainnya yang masing-masing tercatat sebesar 2,45% (yoy) dan 0,96% (yoy). Inflasi pada sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas sekolah dasar sebesar 3,84% (yoy). Sementara itu, inflasi pada sub pendidikan lainnya didorong oleh kenaikan harga kursus komputer sebesar 16,66% (yoy). Inflasi tersebut diindikasikan oleh penyesuaian gaji tenaga pendidik seiring masuknya periode tahun ajaran baru 2023/2024 serta kenaikan tarif kursus rutin tahunan.



Sumber: Bloomberg (diolah)

### 3.2.9 Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan pada triwulan IV 2023 mengalami inflasi **1,86% (yoy)** dengan kontribusi inflasi sebesar **0,03%**. Inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 4,43% (yoy). Inflasi sub kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas obat dengan resep sebesar 10,07% (yoy). Kenaikan harga obat-obatan diindikasikan didorong oleh masih tertransmisinya kenaikan harga bahan baku dan tambahan biaya di rantai produksi.

### 3.2.10 Kelompok Transportasi

Selanjutnya, kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar **1,66% (yoy)** dengan andil **0,22%**. Inflasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,09% (yoy) dengan andil sebesar 0,14%. Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh inflasi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang sebesar 3,51% (yoy) dengan andil sebesar 0,10%. Selain itu, sub kelompok pembelian kendaraan turut menyumbang inflasi pada kelompok ini dengan kenaikan sebesar 2,32% (yoy) dan andil sebesar 0,09%. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi pada kelompok ini di antaranya angkutan udara, pembelian mobil dan pemeliharaan/service kendaraan yang masing-masing memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,10%, 0,08%, dan 0,04%. Kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, kenaikan harga mobil disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seiring harga bahan baku yang meningkat serta adanya peningkatan fitur dan teknologi dalam mobil. Lebih lanjut, adanya kenaikan harga pemeliharaan/service kendaraan sejalan dengan peningkatan harga impor suku cadang seiring dengan pelemahan nilai tukar Rupiah.

### 3.2.11 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang berkontraksi sebesar **0,33% (yoy)** dengan andil sebesar **-0,02%** terhadap inflasi secara umum di Kota Jambi. Deflasi didorong oleh penurunan harga pada sub kelompok peralatan informasi dan komunikasi dengan sebesar -2,75% (yoy) dengan andil sebesar -0,03% terhadap inflasi pada kelompok ini. Adapun komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga adalah telepon seluler dan komputer tablet yang masing-masing turun sebesar 4,19% (yoy), dan 4,00 (yoy). Penurunan harga pada komoditas tersebut sejalan dengan berlanjutnya penurunan permintaan sejalan dengan telah berlangsung penuhnya kegiatan belajar secara tatap muka selama tahun 2023.

Lebih lanjut, perkembangan inflasi di Kota Jambi sampai dengan Januari 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,68% (mtm) atau inflasi 2,65% (yoy). Secara bulanan, inflasi di Kota Jambi utamanya disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok pendidikan yang masing-masing inflasi sebesar 2,31% (mtm) dan 0,84% (mtm) dengan andil masing-masing sebesar 0,65% dan 0,05%. Di sisi lain, kelompok transportasi serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami deflasi dengan andil masing-masing sebesar -0,03%, dan -0,01%.

Kenaikan andil inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti daging ayam ras (andil 0,27%), cabai merah (andil 0,11%), tomat (andil 0,08%), tahu mentah (andil 0,04%), dan kentang (andil 0,04%). Peningkatan harga daging ayam ras didorong oleh normalisasi harga pasca deflasi yang terjadi pada beberapa periode sebelumnya dan juga didorong oleh peningkatan permintaan pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kenaikan harga cabai merah, tomat, dan kentang didorong oleh penurunan pasokan seiring dengan tertahannya produksi selama periode musim kemarau panjang di tengah fenomena El Nino. Lebih lanjut, kenaikan harga tahu mentah diindikasikan oleh adanya peningkatan harga bahan baku utama pembuatan komoditas yaitu kedelai yang juga mengalami penurunan pasokan akibat inoptimalisasi panen komoditas pada musim kemarau.

Berdasarkan perkembangan inflasi bulanan tersebut, inflasi tahunan Kota Jambi pada Januari 2024 tercatat sebesar 2,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan Desember 2024 sebesar 3,27% (yoy). Meskipun demikian, inflasi tahunan Kota Jambi masih berada di rentang sasaran inflasi Nasional sebagai dampak penguatan berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan yang dilakukan oleh TPID Kota Jambi bersinergi dengan instansi/lembaga terkait. Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dan berada di sekitar titik tengah kisaran target 2,5%±1% (yoy) seiring dengan berbagai upaya yang akan ditempuh TPID untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan koridor 4K.

### 3.3 INFLASI KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN KELOMPOK BARANG

Kabupaten Bungo pada triwulan IV 2023 tercatat inflasi sebesar 0,31% (qtd) atau inflasi sebesar 2,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan III 2023 sebesar 1,17% (yoy). (GRAFIK 3.10). Berdasarkan realisasi tersebut, Kabupaten Bungo berada pada urutan ke-8 dari 24 kota di Sumatera yang dijadikan sampel perhitungan inflasi.

Melandainya inflasi tahunan Kabupaten Bungo pada triwulan IV 2023 terutama didorong oleh lebih rendahnya inflasi pada kelompok transportasi sejalan dengan lebih rendahnya harga avtur pada periode laporan serta adanya isu penurunan harga BBM oleh Pertamina. Di sisi lain, terjadi peningkatan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring penurunan pasokan komoditas pangan di tengah musim kemarau panjang yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. Meskipun demikian, berbagai upaya yang dilakukan dalam stabilisasi harga dan pasokan komoditas hortikultura dan peternakan di Kabupaten Bungo melalui sinergi yang baik antara TPID dan mitra strategis lainnya menjaga inflasi bergerak di antara rentang sasaran target inflasi.



#### 3.3.1. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada triwulan IV 2023, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 7,15% (yoy) dengan andil sebesar 2,26%, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,96% (yoy) dengan andil sebesar 0,31%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok sub kelompok makanan yang tercatat mengalami inflasi sebesar 6,39% (yoy)

dengan sumbangan 1,49%. Selanjutnya, sub kelompok rokok dan tembakau juga terpantau mengalami inflasi sebesar 10,52% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,71%. Inflasi tersebut didorong oleh transmisi kebijakan penyesuaian tarif cukai rokok rata-rata 10% pada tahun 2023 yang menyebabkan peningkatan harga aneka rokok. Terakhir, sub kelompok minuman yang tidak beralkohol turut mengalami inflasi sebesar 3,84% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,06%. Secara keseluruhan, berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh kenaikan harga pada komoditas cabai merah, beras, rokok kretek filter, bawang merah, dan rokok kretek masing-masing sebesar 49,73% (yoy), 16,53% (yoy), 13,04, 46,04% (yoy), dan 9,25% (yoy).

Kenaikan beras didorong oleh beberapa faktor di antaranya penurunan pasokan domestik seiring dengan dampak kemarau panjang di tengah fenomena El Nino moderat, tertutupnya keran impor dari beberapa negara sebagai dampak antisipatif penurunan produksi di periode El Nino, serta masih berdampak peningkatan HPP gabah di tingkat petani dan penggilingan, dan peningkatan HET beras beras medium dan beras premium yang ditetapkan berdasarkan zonasi. Berdasarkan data PIHPS, rata-rata harga beras pada bulan Desember 2023 sebesar Rp14.608/kg lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga pada periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp13.225/kg atau sebesar 10,46% (yoy).

Lebih lanjut, harga cabai merah dan bawang merah juga terpantau meningkat diindikasikan oleh inoptimalisasi panen pada musim kemarau. Berdasarkan data PIHPS, rata-rata harga cabai merah pada bulan Desember 2023 sebesar Rp63.771/kg lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga pada periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp33.402/kg atau sebesar 90,92% (yoy); serta rata-rata harga bawang merah pada bulan Desember 2023 sebesar Rp34.934/kg lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga pada periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp29.500/kg atau sebesar 18,42% (yoy).

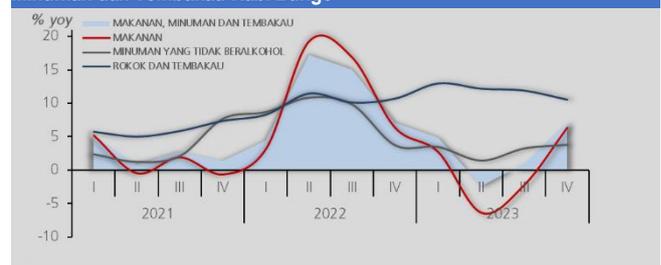
Selanjutnya, hasil SPH menunjukkan bahwa rerata harga rokok kretek dan rokok kretek filter pada Desember 2023 masing-masing sebesar Rp17.158/bungkus dan Rp30.470/bungkus

atau meningkat masing-masing sebesar 1,55% (yoy) dan 19,76% (yoy).

Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga yang terjadi pada komoditas daging ayam ras (-9,84, yoy), ikan nila (-7,81%, yoy), minyak goreng (-4,65%, yoy), ikan tongkol (-22,01%, yoy) dan ikan serai (11,45%, yoy) dengan andil masing-masing sebesar -0,15%, -0,10%, -0,09%, -0,08%, dan -0,06% pada September 2023.

Berdasarkan data PIHPS, rerata harga komoditas daging ayam ras di Kabupaten Bungo pada Desember 2023 tercatat sebesar Rp33.105/kg atau lebih rendah 8,34% dibandingkan Desember 2022 Selanjutnya, harga minyak goreng pada Desember 2023 tercatat sebesar Rp17.500/kg, lebih rendah 0,53% dibandingkan Desember 2022. Sementara itu, berdasarkan hasil SPH, rerata harga Ikan Tongkol dan Ikan Nila pada Desember 2023 tercatat masing-masing sebesar Rp24.417/kg dan Rp33,813/Kg atau turun sebesar 36,30% dan 5,91% dibandingkan Desember 2022. Penurunan harga sejumlah komoditas pangan tersebut ditopang oleh kondisi persediaan pasokan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya intervensi TPID dalam melakukan stabilisasi harga melalui berbagai program di antaranya operasi pasar, pasar murah, penguatan GNPIP, dan pelaksanaan GPM.

**Grafik 3.13. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Kab. Bungo**



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

### 3.3.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terpantau mengalami deflasi sebesar 0,03% (yoy) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,00% atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 0,92%

(yoy) dengan sumbangan sebesar 0,16%. Deflasi didorong oleh penurunan harga pada sub kelompok listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,73% (yoy) dengan andil -0,05%. Adapun komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga adalah bahan bakar rumah tangga yang tercatat deflasi sebesar 1,56% (yoy) dengan andil sebesar -0,05% sebagai dampak penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG. Selanjutnya, deflasi juga didorong oleh penurunan harga pada sub kelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan yang tercatat sebesar -0,97 dengan andil sebesar -0,04%. Adapun komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga adalah batu bata/batu tela, besi beton, dan seng yang masing-masing turun sebesar 12,50% (yoy), 5,48% (yoy), dan 3,55% (yoy). Penurunan harga pada komoditas-komoditas tersebut diindikasikan oleh penurunan permintaan sejalan dengan kontraksi pada sektor konstruksi.

### 3.3.3. Kelompok Transportasi

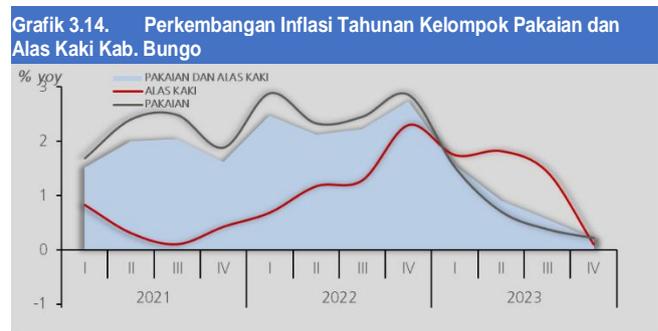
Selanjutnya, kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,39% (yoy) dengan andil sebesar -0,05%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 0,18% (yoy) dengan andil 0,02%. Adapun deflasi pada kelompok ini didorong oleh penurunan harga yang terjadi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang sebesar 4,58% (yoy) dengan andil sebesar -0,10%. Deflasi tersebut didorong oleh adanya penurunan tarif angkutan antar kota (10,00%, yoy) dan angkutan udara (3,96%, yoy) sejalan dengan penurunan dampak penyesuaian harga avtur global dan BBM domestik yang ditetapkan pemerintah. Meskipun demikian, sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi dan sub kelompok pembelian kendaraan yang tercatat mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,64% (yoy) dengan andil sebesar 0,05% dan 0,15% (yoy) dengan andil 0,01% yang didorong oleh kenaikan harga suku cadang dan harga mobil segmen LCGC sejalan dengan penghapusan insentif PPnBM sejak akhir 2022.

### 3.3.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan rutin Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 0,10% (yoy) dengan sumbangan inflasi 0,01%. Inflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh sub kelompok furnitur, perlengkapan dan karpet yang mengalami inflasi sebesar 1,07% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%. Kenaikan level IHK pada sub kelompok ini didorong oleh kenaikan harga komoditas karpet sebesar 4,35% (yoy). Di sisi lain, inflasi tertahan oleh sub kelompok barang pemeliharaan rumah tangga rutin yang mengalami deflasi sebesar 0,54% (yoy) dengan andil sebesar -0,01%. Deflasi pada sub kelompok ini disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas sabun detergen bubuk/cair sebesar -1,39% (yoy).

### 3.3.5. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami inflasi 0,19% (yoy) dengan kontribusi sebesar 0,01%. Inflasi pada kelompok ini disumbangkan oleh sub kelompok pakaian (0,22%, yoy) dengan andil sebesar 0,01% dan sub kelompok alas kaki (0,11%, yoy) dengan andil sebesar 0,00%. Peningkatan harga pada sub kelompok pakaian didorong oleh inflasi pada komoditas kemeja panjang katun pria, sarung, dan seragam sekolah anak masing-masing sebesar 3,27% (yoy), 2,08% (yoy), dan 0,63% (yoy). Kenaikan harga pada komoditas tersebut sebagai dampak peningkatan konsumsi masyarakat di tengah perbaikan kondisi ekonomi.



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

### 3.3.6. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, tercatat inflasi 5,84% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,40%. Realisasi tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 5,72% (yoy) dengan andil 0,38%. Inflasi pada kelompok pengeluaran ini didorong oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 10,30% (yoy) dengan sumbangan 0,30%. Kenaikan harga pada sub kelompok tersebut didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sebesar 12,88% (yoy) dengan andil sebesar 0,30% sejalan dengan peningkatan harga emas global. Berdasarkan data Bloomberg, harga komoditas emas pada Desember 2023 tercatat sebesar 1.951 USD/Troy Ounce, atau meningkat sebesar 8,63% (yoy) (GRAFIK 3.9).

### 3.3.7. Kelompok Kesehatan

Pada riwulan IV 2023, kelompok Kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 2,73% (yoy) dengan sumbangan terhadap total inflasi pada kelompok kesehatan sebesar 0,05%. Realisasi tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang sebesar 3,30% (yoy) dengan andil sebesar 0,06%. Inflasi kelompok ini terutama disumbangkan oleh sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan serta jasa rawat inap yang tercatat masing-masing sebesar 2,40% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,02% dan 3,93% (yoy) dengan andil sebesar 0,02%.



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif rumah sakit (3,93%, yoy) dengan andil sebesar 0,02%, obat dengan resep (2,05%, yoy) dengan

andil sebesar 0,01%, dan obat gosok (4,48%, yoy) dengan andil sebesar 0,01%.

### 3.3.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Secara tahunan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat mengalami inflasi sebesar 0,48% (yoy) dengan andil 0,01%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh sub kelompok layanan rekreasi dan olahraga serta koran, buku, dan perlengkapan sekolah yang tercatat inflasi masing-masing sebesar 1,15% (yoy) dan andil 0,00% serta 0,49% (yoy) dan andil 0,00%. Adapun komoditas yang mendorong inflasi pada sub kelompok layanan rekreasi dan olahraga yaitu kolam renang yang naik sebesar 11,87% (yoy) dengan andil 0,00%, sedangkan pada sub kelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah yaitu buku pelajaran SLTA yang naik sebesar 4,90% (yoy) dengan andil 0,00%

### 3.3.9. Kelompok Pendidikan

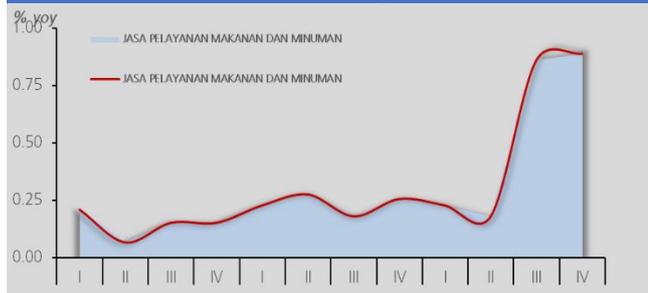
Kelompok pendidikan mencatatkan inflasi pada triwulan IV 2023 sebesar 3,21% (yoy) dengan andil sebesar 0,09%. Inflasi pada kelompok tersebut didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok pendidikan tinggi serta pendidikan dasar dan anak usia dini dengan inflasi masing-masing sebesar 4,26% (yoy) dengan andil sebesar 0,05% serta 5,49% (yoy) dengan andil sebesar 0,03%. Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada sub kelompok pendidikan tinggi didorong oleh kenaikan harga komoditas akademi/ perguruan tinggi sebesar 4,26% (yoy) dengan andil sebesar 0,05%. Selanjutnya, inflasi pada sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas taman kanak-kanak yang tercatat sebesar 8,98% (yoy) dengan andil sebesar 0,02% sejalan dengan penyesuaian gaji tenaga pendidik mengikuti UMP dan tingkat kenaikan harga secara umum.

### 3.3.10. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minum/Restoran

Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada Triwulan IV 2023 mengalami inflasi sebesar 0,89% (yoy), dengan sumbangan 0,06% terhadap

**total inflasi di Kabupaten Bungo.** Sub kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman menjadi pendorong utama inflasi di kelompok ini dengan kenaikan level IHK sebesar 0,89% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, kenaikan harga pada kelompok ini didorong oleh komoditas nasi dengan lauk, sate, dan ketoprak yang masing-masing naik sebesar 1,20% (yoy), 2,42% (yoy), dan 4,09% (yoy) dengan andil masing-masing sebesar 0,03%, 0,01%, dan 0,01% seiring dengan kenaikan harga bahan baku utama antara yaitu beras/lontong.

**Grafik 3.16. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Kab. Bungo**



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

### 3.3.11. Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

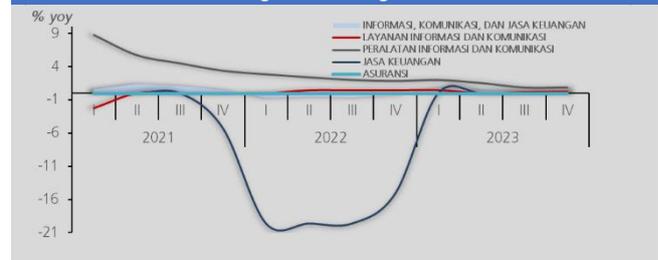
Pada triwulan IV 2023, inflasi kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat sebesar 0,36% (yoy) dengan andil sebesar 0,02%. Sub kelompok yang memberikan andil terbesar pada inflasi di kelompok ini adalah sub kelompok peralatan informasi dan komunikasi serta sub kelompok layanan informasi dan komunikasi yang tercatat masing-masing sebesar 0,88% (yoy) dengan andil sebesar 0,01% dan 0,21% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%. Adapun komoditas yang mendorong kenaikan harga pada sub kelompok peralatan informasi dan ko adalah laptop/notebook yang tercatat naik sebesar 6,54% (yoy) dengan andil 0,01% sejalan dengan kebutuhan peserta didik/siswa seiring masuknya tahun ajaran baru serta pada sub kelompok layanan informasi dan komunikasi adalah biaya pulsa ponsel yang tercatat sebesar 0,26% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%.

Selanjutnya, secara bulanan, pada Januari 2024, perkembangan IHK di Kabupaten Bungo tercatat inflasi sebesar 0,54% (mtm). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi

pada Januari 2024 di antaranya adalah daging ayam ras (andil 01,2%, mtm), tomat (andil 0,11%, mtm), jengkol (andil 0,10%, mtm), emas perhiasan (andil 0,06%, mtm), dan ikan cakalang/ikan sisik (andil 0,05%, mtm). Sementara itu, secara tahunan, inflasi Kabupaten Bungo pada Januari 2024 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menurun dibandingkan dengan Desember 2023 yang tercatat sebesar 2,85% (yoy) seiring berakhirnya momentum HBKN Natal dan Tahun Baru.

Inflasi tahunan di Kabupaten Bungo pada triwulan I 2024 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 namun masih berada di sekitar titik tengah kisaran target 2,5%±1% (yoy). Hal tersebut didorong oleh prakiraan peningkatan permintaan masyarakat di tengah HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta adanya Pemilu Tahun 2024. Selain itu, musim kemarau di tengah fenomena El Nino moderat diperkirakan berdampak pada kualitas produksi komoditas pangan. Namun demikian, berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan akan terus dilakukan oleh TPID Kabupaten Bungo untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga melalui berbagai program strategis daerah sesuai dengan koridor 4K.

**Grafik 3.17. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kab. Bungo**



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Bungo (Tahun Dasar 2018)**

KELOMPOK	TRIWULAN IV-2022				TRIWULAN I-2023				TRIWULAN II-2023				TRIWULAN III-2023				TRIWULAN IV-2023			
	(QTO %)		(YOY %)		(QTO %)		(YOY %)		(QTO %)		(YOY %)		(QTO %)		(YOY %)		(QTO %)		(YOY %)	
	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN	INFLASI	SMBGN
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	-2.83	-0.92	7.15	2.24	2.09	0.44	4.88	1.54	1.23	0.39	-2.34	-0.78	0.52	0.17	0.96	0.31	3.13	1.01	7.15	2.24
a. MAKANAN	0.34	0.02	2.74	0.20	0.17	0.01	1.54	0.11	0.04	0.00	0.91	0.04	-0.01	0.00	0.57	0.04	-0.01	0.00	0.19	0.01
b. MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	0.49	0.09	3.54	0.45	0.00	0.00	2.50	0.45	0.38	0.07	1.52	0.27	0.05	0.01	0.92	0.16	-0.44	-0.08	-0.03	0.00
c. ROKOK DAN TEMBAKAU	0.17	0.01	5.03	0.30	0.07	0.00	3.69	0.22	-0.04	0.00	1.02	0.04	0.12	0.01	0.31	0.02	-0.05	0.00	0.10	0.01
KESEHATAN	0.71	0.01	8.12	0.02	0.30	0.01	1.32	0.02	0.68	0.01	1.84	0.03	1.58	0.03	3.30	0.04	0.16	0.00	2.73	0.05
TRANSPORTASI	-0.02	0.12	14.44	1.80	-0.33	-0.04	13.97	1.69	-0.24	-0.04	11.94	1.42	-0.11	-0.01	0.18	0.02	0.32	0.04	-0.39	-0.05
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	0.00	0.00	-0.27	-0.02	0.32	0.02	0.82	0.04	-0.10	-0.01	0.40	0.02	0.10	0.01	0.32	0.02	0.04	0.00	0.34	0.02
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0.80	0.01	2.74	0.05	0.26	0.00	2.05	0.04	-0.04	0.00	1.71	0.03	0.00	0.00	1.03	0.02	0.25	0.00	0.48	0.01
PENDIDIKAN	0.00	0.00	0.95	0.03	0.00	0.00	0.82	0.02	0.89	0.02	1.59	0.04	2.29	0.04	3.21	0.09	0.00	0.00	3.21	0.09
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	0.08	0.00	0.26	0.02	0.05	0.00	0.23	0.01	0.00	0.00	0.18	0.01	0.74	0.05	0.84	0.05	0.10	0.01	0.89	0.04
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	2.40	0.16	11.45	0.75	1.94	0.14	7.39	0.50	1.28	0.09	5.87	0.40	-0.02	0.00	5.72	0.38	2.52	0.18	5.84	0.40
<b>UMUM</b>	<b>-0.49</b>	<b>-0.49</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	<b>4.67</b>	<b>4.67</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>0.31</b>	<b>0.31</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	<b>1.16</b>	<b>1.16</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Bungo Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa (Tahun Dasar 2018)**

KELOMPOK	TW IV-2022		TW I-2023		TW II-2023		TW III-2023		TW IV-2023	
	qtr	yoY	qtr	yoY	qtr	yoY	qtr	yoY	qtr	yoY
<b>I. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU</b>	<b>-2.83</b>	<b>7.15</b>	<b>2.09</b>	<b>4.88</b>	<b>1.23</b>	<b>-2.34</b>	<b>0.52</b>	<b>0.96</b>	<b>3.13</b>	<b>7.15</b>
a. MAKANAN	-4.34	6.39	1.34	2.75	0.67	-6.33	0.22	-2.19	4.05	6.39
b. MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	0.04	3.77	1.49	3.52	-0.03	1.48	1.77	3.30	0.57	3.84
c. ROKOK DAN TEMBAKAU	2.01	10.68	4.84	12.95	3.34	12.17	1.23	11.88	0.77	10.52
<b>II. PAKAIAN DAN ALAS KAKI</b>	<b>0.36</b>	<b>2.74</b>	<b>0.17</b>	<b>1.56</b>	<b>0.04</b>	<b>0.91</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.57</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.19</b>
a. PAKAIAN	0.16	2.86	0.15	1.52	0.01	0.70	0.05	0.38	0.00	0.22
b. ALAS KAKI	1.30	2.30	0.24	1.75	0.16	1.82	-0.27	1.43	-0.02	0.11
<b>III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA</b>	<b>0.49</b>	<b>3.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>	<b>0.38</b>	<b>1.52</b>	<b>0.05</b>	<b>0.92</b>	<b>-0.46</b>	<b>-0.03</b>
a. SEWA DAN KONTRAK RUMAH	0.41	0.74	0.29	0.70	0.90	1.61	0.00	1.61	0.00	1.19
b. PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	1.19	6.03	-0.11	5.20	-0.46	0.83	-0.04	0.57	-0.36	-0.97
c. PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.27	5.75	-0.25	3.28	0.40	2.08	0.14	0.56	-1.03	-0.73
<b>IV. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA</b>	<b>0.17</b>	<b>5.03</b>	<b>0.07</b>	<b>3.69</b>	<b>-0.04</b>	<b>1.02</b>	<b>0.12</b>	<b>0.31</b>	<b>-0.05</b>	<b>0.10</b>
a. FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	0.24	3.22	0.00	3.07	0.59	1.47	0.00	0.83	0.48	1.07
b. TEKSTIL RUMAH TANGGA	0.63	3.73	1.14	4.84	0.00	3.81	0.00	1.78	0.00	1.14
c. PERALATAN RUMAH TANGGA	0.03	1.78	0.13	1.75	-0.08	0.79	0.00	0.08	0.00	0.05
d. BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	0.00	0.71	0.00	1.58	0.45	2.04	0.00	0.45	0.00	0.45
e. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
f. BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	0.14	8.49	-0.07	5.13	-0.41	0.34	0.27	-0.06	-0.33	-0.54
<b>V. KESEHATAN</b>	<b>0.71</b>	<b>1.13</b>	<b>0.30</b>	<b>1.32</b>	<b>0.68</b>	<b>1.84</b>	<b>1.58</b>	<b>3.30</b>	<b>0.16</b>	<b>2.73</b>
a. OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	1.83	2.94	0.78	3.43	0.09	3.08	1.57	4.32	-0.05	2.40
b. JASA RAWAT JALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.48	2.28
c. JASA RAWAT INAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	3.93	0.00	3.93
<b>VI. TRANSPORTASI</b>	<b>0.89</b>	<b>14.64</b>	<b>-0.33</b>	<b>13.97</b>	<b>-0.26</b>	<b>11.94</b>	<b>-0.11</b>	<b>0.18</b>	<b>0.32</b>	<b>-0.39</b>
a. PEMBELIAN KENDARAAN	0.08	4.38	0.02	1.97	0.13	1.90	0.00	0.23	0.00	0.15
b. PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	0.86	19.10	-0.07	18.86	-0.50	17.87	1.06	1.35	0.16	0.64
c. JASA ANGKUTAN PENUMPANG	2.45	21.53	-1.76	24.00	-0.22	14.01	-4.04	-3.63	1.44	-4.58
d. JASA PENGIRIMAN BARANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VII. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.27</b>	<b>0.32</b>	<b>0.82</b>	<b>-0.10</b>	<b>0.40</b>	<b>0.10</b>	<b>0.32</b>	<b>0.04</b>	<b>0.36</b>
a. PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	0.00	1.83	1.24	1.99	-0.36	1.54	0.00	0.86	0.00	0.88
b. LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	-0.02	0.43	0.00	0.46	0.00	0.01	0.15	0.15	0.06	0.21
c. ASURANSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. JASA KEUANGAN	0.00	-15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA</b>	<b>0.80</b>	<b>2.74</b>	<b>0.26</b>	<b>2.05</b>	<b>-0.04</b>	<b>1.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1.03</b>	<b>0.25</b>	<b>0.48</b>
a. BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	2.37	2.68	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.37	0.00	0.00
b. LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15
c. KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	0.12	4.21	0.57	2.75	-0.08	1.99	0.00	0.61	0.00	0.49
<b>IX. PENDIDIKAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.82</b>	<b>0.89</b>	<b>1.59</b>	<b>2.29</b>	<b>3.21</b>	<b>0.00</b>	<b>3.21</b>
a. PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	0.00	1.56	0.00	1.56	4.36	5.99	1.08	5.49	0.00	5.49
b. PENDIDIKAN MENENGAH	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	1.13	1.13	0.00	1.13
c. PENDIDIKAN TINGGI	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	4.26	4.26	0.00	4.26
d. PENDIDIKAN LAINNYA	0.00	2.47	0.00	1.26	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07
<b>X. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN</b>	<b>0.08</b>	<b>0.26</b>	<b>0.05</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>	<b>0.74</b>	<b>0.86</b>	<b>0.10</b>	<b>0.89</b>
a. JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	0.08	0.26	0.05	0.23	0.00	0.18	0.74	0.86	0.10	0.89
<b>XI. PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA</b>	<b>2.40</b>	<b>11.45</b>	<b>1.96</b>	<b>7.39</b>	<b>1.28</b>	<b>5.87</b>	<b>-0.02</b>	<b>5.72</b>	<b>2.52</b>	<b>5.84</b>
a. PERAWATAN PRIBADI	1.46	16.12	0.51	9.10	1.16	6.16	0.61	3.79	0.32	2.62
b. PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	2.77	5.59	3.93	4.78	1.48	4.87	-0.80	7.52	5.42	10.30
c. JASA LAINNYA	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>UMUM</b>	<b>-0.49</b>	<b>6.04</b>	<b>0.81</b>	<b>4.67</b>	<b>0.54</b>	<b>1.55</b>	<b>0.54</b>	<b>1.55</b>	<b>1.16</b>	<b>2.85</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 3.6. Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Bungo Berdasarkan Komoditas**

10 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI	TW IV-2023 SUMBANGAN	10 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI	TW IV-2023 SUMBANGAN
<b>OKTOBER</b>		<b>OKTOBER</b>	
1. CABAI MERAH	0.1998	1. KENTANG	-0.0804
2. EMAS PERHIASAN	0.0381	2. TELUR AYAM RAS	-0.0424
3. BENSIN	0.0301	3. JENGKOL	-0.0288
4. ROKOK PUTIH	0.0253	4. PETAI	-0.0286
5. DAGING AYAM RAS	0.0169	5. IKAN SERAI	-0.0284
6. CABAI RAWIT	0.0154	6. IKAN TONGKOL	-0.0207
7. BERAS	0.0110	7. TOMAT	-0.0202
8. SEMANGKA	0.0077	8. WORTEL	-0.0164
9. BESI BETON	0.0074	9. JERUK	-0.0145
10. KARPET	0.0065	10. IKAN NILA	-0.0126
<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>	<b>0.358</b>	<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>	<b>-0.2930</b>
<b>NOVEMBER</b>		<b>NOVEMBER</b>	
1. CABAI MERAH	0.4942	1. DAGING AYAM RAS	-0.0766
2. BAWANG MERAH	0.1613	2. BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-0.0729
3. CABAI RAWIT	0.1394	3. TELUR AYAM RAS	-0.0401
4. BERAS	0.1391	4. MINYAK GORENG	-0.0258
5. EMAS PERHIASAN	0.1040	5. BESI BETON	-0.0219
6. PETAI	0.0271	6. IKAN SERAI	-0.0218
7. GULA PASIR	0.0176	7. BAWANG PUTIH	-0.0204
8. ROKOK KRETEK FILTER	0.0136	8. BENSIN	-0.0191
9. ROKOK PUTIH	0.0090	9. JENGKOL	-0.0186
10. KACANG PANJANG	0.0085	10. WORTEL	-0.0099
<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>	<b>1.114</b>	<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>	<b>-0.327</b>
<b>DESEMBER</b>		<b>DESEMBER</b>	
1. BAWANG MERAH	0.8169	1. CABAI MERAH	-0.1536
2. BERAS	0.7703	2. CABAI RAWIT	-0.1027
3. DAGING AYAM RAS	0.4190	3. KENTANG	-0.0872
4. ANGKUTAN UDARA	0.2995	4. TAHU MENTAH	-0.0824
5. PETAI	0.2151	5. MINYAK GORENG	-0.0567
6. TOMAT	0.1707	6. KETIMUN	-0.0520
7. JENGKOL	0.1250	7. IKAN ASIN TERI	-0.5080
8. TELUR AYAM RAS	0.0822	8. IKAN TONGKOL	-0.0507
9. IKAN NILA	0.0770	9. KACANG PANJANG	-0.0481
10. EMAS PERHIASAN	0.0649	10. PEPAYA	-0.0309
<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>	<b>3.041</b>	<b>SUMBANGAN 10 KOMODITAS</b>	<b>-1.1723</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

## **SEMANGAT UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023 BERSASAMA DENGAN TPID PROVINSI JAMBI**

Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia Provinsi Jambi Bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah telah menjalankan pelaksanaan Operasi Pasar, Gelar Pangan Murah, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan dilakukan dengan sinergi yang kuat antara anggota TPID Provinsi dan Kab/Kota dengan Bulog didukung Satgas Pangan. Selama tahun 2023 telah dilakukan 400 kegiatan SPHP dan GPM di beberapa tempat seperti pasar tradisional, area *Car Free Day* (CFD), pemukiman masyarakat, kantor dan lainnya dengan menyediakan berbagai komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi di wilayah Jambi. Selain itu juga untuk mendorong ketersediaan bahan pangan strategis atas inflasi adalah melalui penyaluran Subsidi Ongkos Angkut untuk perbaikan efisiensi dan manajemen stok pangan. Komoditas diprioritaskan dari daerah yang telah menjalin kerjasama antar daerah. Selama tahun 2023 penyaluran subsidi ongkos angkut telah dilakukan untuk komoditas cabai merah, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau yang rentan sebagai komoditas penyumbang inflasi.



Foto 1. Sidak Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Bahan Pangan di Pasar Angso Duo

Penguatan pasokan pangan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) berupa penandatanganan MoU atau PKS Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan 8 wilayah di luar Provinsi Jambi dengan mengutamakan komoditas yang rentan

penyumbang inflasi. Tujuan KAD ini diantaranya mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan kebutuhan masing masing daerah. Beberapa KAD yang diinisiasi dan yang masih berlaku selama tahun 2023 adalah:

No	MOU KAD	Komoditas
1	Provinsi Jawa Timur - Provinsi Jambi	Cabai rawit
2	Kab. Indragiri Hilir-Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Beras
3	Kabupaten Banyuasin-Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Beras
4	Kabupaten Tanah Datar-Kabupaten Bungo	Beras
5	Kabupaten Tanah Datar-Kabupaten Sarolangun	Beras
6	Kabupaten Sleman-Kota Jambi	Beras
7	Kabupaten Brebes-Kota Jambi	Bawang Merah
8	Kabupaten Banyuasin-Kota Jambi	Beras

Kampung Peduli Inflasi merupakan salah satu program GNPIP di Kota Jambi tahun 2023 yang disinergikan dengan Program Kampung Bantar (Bersih Aman dan Pintar). Program Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar) merupakan inisiatif dan inovasi dari Pemerintah Kota Jambi untuk mengakselerasi percepatan dan pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di kelompok Rukun Tetangga (RT) dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, aman dan pintar.



Foto 2. Budidaya Pangan Mandiri Kampung Inflasi

Program Kampung Bantar ini diikuti ratusan RT yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Jambi. Kegiatan Program Kampung Peduli Inflasi yaitu 50 RT akan bercocok tanam atas bibit cabai merah yang dibagikan hingga bibit

cabai tersebut siap panen. Petugas penyuluh melakukan pendampingan atas proses bercocok tanam tersebut sehingga RT yang terlibat akan secara tidak langsung mengalami “praktek *urban farming* cabai”. Sinergi kedua program ini untuk mengedukasi masyarakat khususnya RT di Kota Jambi mengenai inflasi, pengetahuan budidaya melalui *urban farming*, dan mempengaruhi ekspektasi keputusan belanja kebutuhan rumah tangga.

Setiap hari beberapa anggota TPID melakukan survei pemantauan harga atas komoditas bahan pangan strategis. Data yang dihasilkan berupa harga akan menjadi indikator *early warning* dalam menentukan rekomendasi strategi pengendalian inflasi. Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman yang sama akan survei perkembangan harga bahan pangan strategis melalui *capacity building* metode survei kepada surveyor Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan BI, dengan BPS sebagai narasumber pada 15 Maret 2023. Dampak *capacity building* ini adalah sebagian besar arah survei cenderung memiliki arah yang sama sehingga mendukung pengambil keputusan terkait pengendalian inflasi.

**Pelaksanaan rapat koordinasi TPID** dalam rangka memastikan kesiapan upaya pengendalian inflasi, khususnya menjelang HBKN termasuk memastikan kelancaran distribusi komoditas. Rapat koordinasi ini juga dipimpin langsung oleh kepala daerah melalui High Level Meeting (HLM) TPID. Selanjutnya, untuk memperkuat koordinasi, TPID Provinsi serta TPID Kota/Kab di wilayah Jambi secara rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Selama tahun 2023 TPID se-Provinsi Jambi telah menyelenggarakan 10 HLM TPID dan beberapa kali rapat koordinasi yang menunjukkan upaya sinergi program inflasi antar dinas dan instansi vertikal.

*Kick off* GNPIP Provinsi Jambi dilakukan pada 15 Agustus 2023 yang diikuti dengan kegiatan safari GNPIP di Kab.

Bungo, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Safari GNPIP ini juga dilakukan bersinergi dengan kegiatan Pemkab/Pemkot seperti pasar murah, bazaar UMKM, senam bersama, HUT RI dan lainnya.

Edukasi inflasi pada Safari GNPIP, berbagai event publik, media sosial, media cetak dan Iklan Layanan Masyarakat di TV Jambi melibatkan influencer lokal Jambi. Selain itu, dilakukan demo masak oleh chef menggunakan bahan bumbu olahan. Harapannya melalui edukasi ini akan membentuk mindset yang bersifat jangka panjang mengenai inflasi dan bumbu olahan sebagai salah satu mitigasi inflasi. Selama tahun 2023, kegiatan edukasi inflasi yang dilakukan di beberapa event khususnya pada saat GNPIP dan iklan TV swasta di Provinsi Jambi.



Foto 3. High Level Meeting dan Capacity Building TPID Provinsi Jambi



Foto 4. Kick Off GNPIP Provinsi Jambi Tahun 2023

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



#### BAB IV

# STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Jambi pada triwulan III 2023 tetap terjaga, tercermin dari tingkat ROA bank dan rasio LDR yang tercatat tetap terjaga pada triwulan berjalan. Kinerja positif juga tercermin pada sisi penghimpunan dana yang masih tercatat tumbuh yang utamanya didominasi oleh peningkatan tabungan. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit korporasi yang tercatat tumbuh 18,02% (*yoy*) pada triwulan III 2023, pertumbuhan tersebut tumbuh signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaannya, meningkatnya pertumbuhan kredit terjadi pada jenis kriteria kredit bagian investasi.

## 4.1 KETAHANAN SEKTOR KORPORASI

### 4.1. Ketahanan Sektor Korporasi

**Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 16,78% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,02% (yoy).** Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh sektor pertambangan yang tumbuh sebesar 335,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 175,37% (yoy). Selanjutnya, sektor industri juga mengalami pertumbuhan sebesar 13,46% (yoy) di triwulan IV 2023, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,65% (yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas industri menyambut kegiatan HBKN Nataru. Meski demikian, kredit pada sektor pertanian dan perdagangan tumbuh terkontraksi di triwulan IV 2023 masing-masing sebesar 13,77% (yoy) dan 18,25% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh harga komoditas unggulan yang masih melemah sehingga menyebabkan terganggunya bahan baku dan juga produksi.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPwBI Provinsi Jambi triwulan IV 2023, kegiatan usaha sektor industri mencatatkan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) positif sebesar 1,47 meskipun lebih rendah dibandingkan dengan SBT 2,21% pada triwulan III 2023. Selanjutnya, kegiatan usaha sektor pertanian dan pertambangan tercatat masih mengalami kontraksi dengan SBT di triwulan IV 2023 masing-masing sebesar -6,01% dan -2,81%. Hal tersebut direspon oleh pelaku usaha yang tercermin dari pertumbuhan kredit yang juga mengalami kontraksi. Lebih lanjut, pelaku usaha memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan I 2024 akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan konsumsi pemerintah, rumah tangga, dan LNPRT di tengah masuknya momen pemilu.

Selanjutnya, indeks keyakinan konsumen pada triwulan laporan tetap kuat dan berapa pada level optimis, dengan indeks sebesar 112,20. Hal tersebut didorong oleh tetap kuatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi kinerja ekonomi saat ini dan enam bulan ke depan.

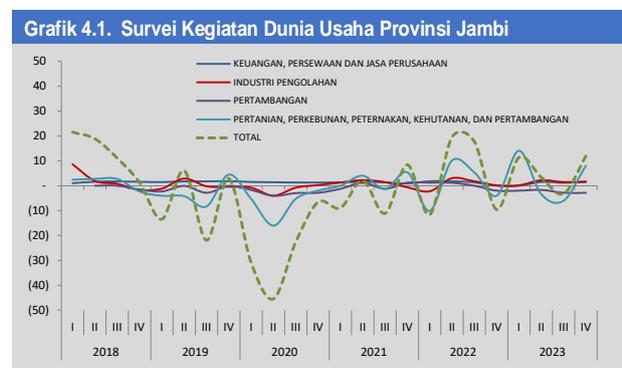
#### 4.1.1 Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

**Kinerja korporasi di Provinsi Jambi sangat dipengaruhi perkembangan komoditas perkebunan dan komoditas energi primer.** Hal tersebut disebabkan oleh sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang lebih dari 50%-

nya disumbangkan oleh LU pertanian, LU pertambangan, dan LU industri pengolahan. Secara umum, pada triwulan IV 2023 pelaku usaha menyatakan bahwa saat ini akses kredit masih relatif sama dengan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan data SKDU yang menunjukkan bahwa akses kredit perbankan dirasakan masih cukup baik oleh responden. Sebanyak 98% responden menyatakan akses kredit yang masih membaik dan relatif sama dengan periode sebelumnya dan 1,67% lainnya menyatakan terjadi penurunan akses kredit/jangkauan pembiayaan untuk diperoleh.

#### 4.1.2 Kinerja Korporasi dan Penilaian Risiko

**Kegiatan usaha domestik pada triwulan IV 2023 tercatat meningkat, tercermin dari hasil SKDU oleh KPwBI Provinsi Jambi yang menunjukkan nilai SBT sebesar 11,95%.** Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -3,23%. Peningkatan kinerja kegiatan usaha terjadi pada beberapa sektor yakni Industri Pengolahan (SBT 1,65%), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (SBT 8,06%), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor (SBT 3,45%), Jasa Keuangan (SBT 1,53%), dan Jasa Lainnya (SBT -0,54%) (GRAFIK 4.1). Peningkatan kinerja beberapa sektor tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas usaha menjelang HBKN Nataru dan periode libur sekolah.



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Jambi

#### 4.1.3 Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

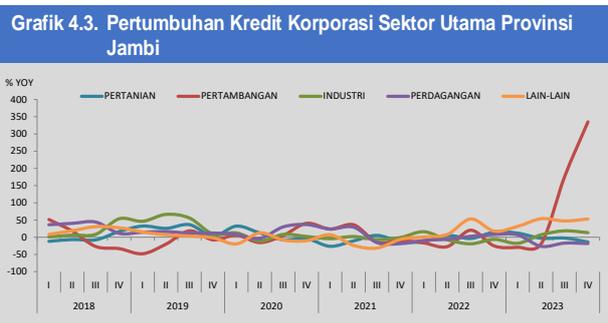
**Kredit korporasi yang disalurkan di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp16,72 triliun atau tumbuh sebesar 16,78% (yoy), masih tercatat tumbuh positif setelah triwulan sebelumnya tumbuh 18,02% (yoy).**

(GRAFIK 4.2).



Sumber: LBU Bank Indonesia

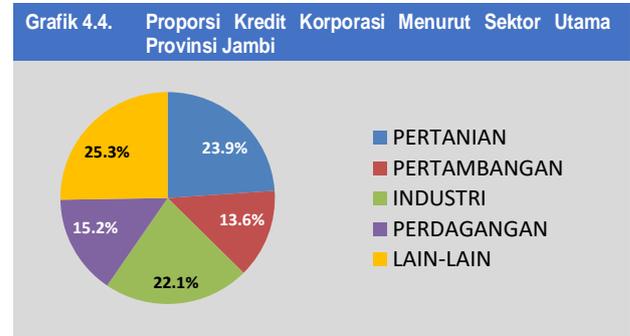
Di sisi lain, suku bunga tertimbang rata-rata untuk nasabah korporasi tercatat sebesar 9,61%, meningkat dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya yang sebesar 9,69%. Meski demikian, suku bunga kredit yang ditetapkan masih jauh di atas suku bunga BI Rate yang ditetapkan sebesar 6,00%. Pertumbuhan positif pada penyaluran kredit korporasi di antaranya didorong oleh sektor pertambangan (335,07%, yoy), sektor industri (11,65%, yoy) dan sektor lain-lain (53,16%, yoy). Meski demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi terhambat oleh sejumlah sektor yang masih tercatat kontraksi a.l sektor pertanian (13,77%, yoy) dan sektor perdagangan (18,25%, yoy). Adapun kontraksi yang terjadi pada sektor pertanian masih disebabkan oleh tertahannya kinerja sektor tersebut akibat dampak dari anomali cuaca yang menyebabkan panen komoditas yang kurang optimal. Selain itu, pada sektor pertanian, penurunan luas lahan serta intensifitas pemupukan memberikan dampak signifikan terhadap produksi sektor terkait yang juga mempengaruhi penurunan tingkat penjualan di triwulan laporan (GRAFIK 4.3).



Sumber: LBU Bank Indonesia

Berdasarkan pangsaanya, kredit korporasi triwulan IV 2023 didominasi oleh sektor pertanian (23,90%), sektor industri pengolahan (22,10%), dan sektor perdagangan (15,20%), sejalan dengan tiga lapangan usaha utama di Provinsi Jambi. (GRAFIK 4.4). Selanjutnya, berdasarkan jenis penggunaan,

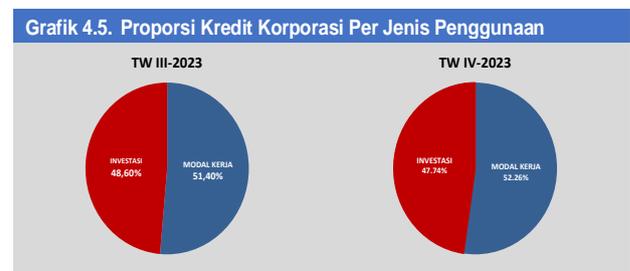
kredit korporasi pada triwulan IV 2023 didominasi untuk kebutuhan modal kerja sebesar Rp8,79 triliun (pangsa 52,26%), kredit untuk investasi sebesar Rp7,97 triliun (pangsa 47,74%), dan kredit untuk konsumsi sebesar Rp25 miliar (pangsa 0,02%)(GRAFIK 4.5).



Sumber: LBU Bank Indonesia

Kredit modal kerja tumbuh sebesar 8,56% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,15% (yoy). Selanjutnya, kredit investasi tumbuh sebesar 27,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 41,59% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi masih berkontraksi sebesar 19,83% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 29,08% (yoy) Pertumbuhan kredit korporasi yang masih menunjukkan tren pertumbuhan positif merupakan cermin kondisi usaha yang masih baik serta meningkatnya peran intermediasi perbankan.

Secara umum kontak liason menunjukkan konsistensi pertumbuhan investasi yang positif yang didasari oleh strategi perusahaan dalam melakukan ekspansi sejumlah aset bisnis terutama pada masa pemulihan ekonomi. Adapun peningkatan investasi ditunjukkan pada beberapa sektor utama di Provinsi Jambi. Selain itu, sektor industri pengolahan turut melakukan investasi berupa pengadaan mesin untuk meningkatkan kualitas produksi dan olahan.

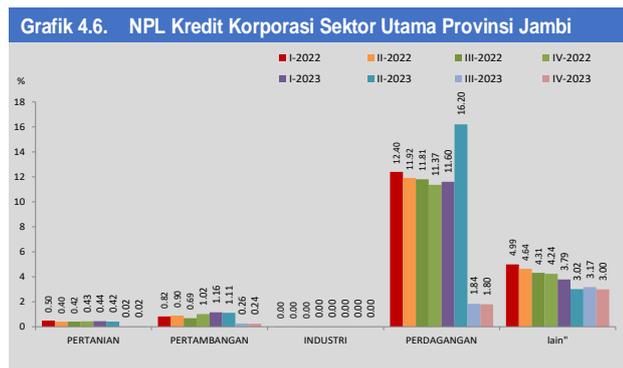


Sumber: LBU Bank Indonesia

Selanjutnya, pada triwulan IV 2023 terjadi penurunan risiko kredit korporasi yang tercermin dari NPL sebesar 0,91% (gross) lebih kecil dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 1,09% (*gross*). (GRAFIK 4.6). Adapun *threshold* NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar adalah 5%.

Penurunan risiko kredit korporasi tersebut disumbangkan oleh penurunan NPL di sektor konstruksi dengan NPL sebesar 5,75% (*gross*) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,86% (*gross*). Sementara itu, NPL sektor utama di Provinsi Jambi terpantau tetap dan tidak melebihi *threshold* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Sumber: LBU Bank Indonesia

## 4.2 KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA

**Simpanan perseorangan pada perbankan di triwulan IV 2023 sebesar Rp31,44 triliun, atau berkontraksi sebesar 1,02% (yoy).** Kontraksi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan simpanan perseorangan dalam bentuk tabungan dan giro yang tumbuh berkontraksi masing-masing sebesar 2,57% (yoy) dan 2,47% (yoy). Berdasarkan komposisinya, sebagian besar DPK perseorangan disimpan dalam bentuk tabungan (75,32%), sementara sisanya disimpan dalam bentuk deposito (22,33%), dan giro (2,35%).

Penurunan tersebut dapat mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan pada triwulan IV 2023 yang tercermin dari peningkatan kredit yang disalurkan ke rumah tangga. Pertumbuhan kredit Rumah Tangga (RT) Jambi pada triwulan IV 2023 sebesar 9,70% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2023 6,36% (yoy).



Sumber: SK Bank Indonesia

Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen KPwBI Provinsi Jambi menunjukkan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2023 tercatat sebesar 111,20. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) Desember 2023 juga berada pada area optimis dengan indeks sebesar 108,20. (GRAFIK 4.7).

### 4.2.1 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan

**Pertumbuhan DPK perseorangan Jambi pada triwulan IV 2023 tercatat berkontraksi sebesar 1,02% (yoy)** (GRAFIK 4.8), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya sebesar 1,48% (yoy) sejalan dengan penurunan proporsi penyaluran kredit perbankan ke perseorangan (GRAFIK 4.9). Berdasarkan pangsaanya, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan pada triwulan laporan didominasi DPK perseorangan dengan pangsa sebesar 70,68%, sedangkan sisanya sebesar 29,32% merupakan DPK non perseorangan. (GRAFIK 4.9).

Sesuai dengan karakteristiknya, preferensi RT dalam menyimpan kelebihan dananya mayoritas disimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka (deposito) masing-masing sebesar 75,32% dan 22,33%, sementara pangsa giro hanya sebesar 2,35% (GRAFIK 4.11).



Sumber: LBU Bank Indonesia

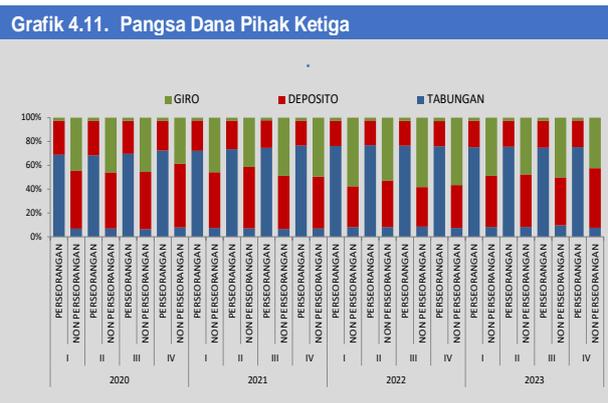


Sumber: LBU Bank Indonesia

Pada triwulan IV 2023, deposito tumbuh sebesar 4,55% (yoy), tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 10,05% (yoy). Selanjutnya, giro tercatat berkontraksi sebesar 2,57% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan berkontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,63% (yoy). Sementara itu, tabungan juga masih berkontraksi sebesar -2,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -0,75% (yoy) (GRAFIK 4.10).



Sumber: LBU Bank Indonesia

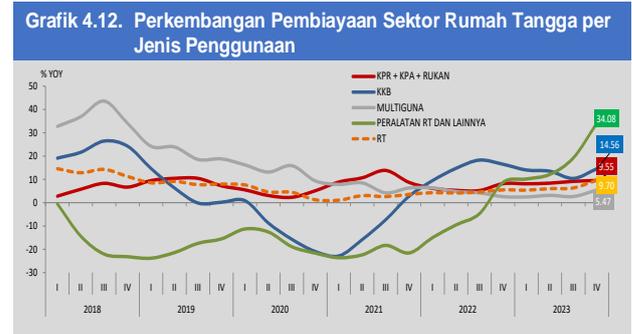


Sumber: LBU Bank Indonesia

## 4.2.2 Kredit Rumah Tangga di Perbankan

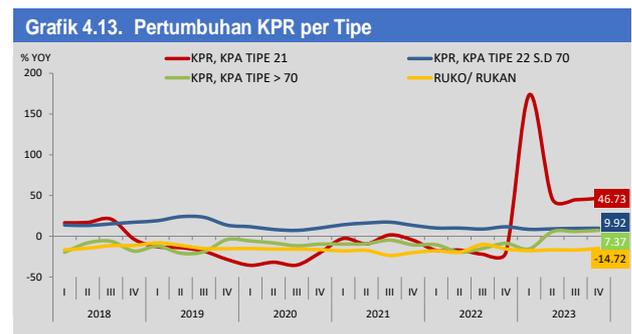
Kredit rumah tangga (RT) mencapai sebesar Rp24,51 triliun atau tumbuh sebesar 9,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,36% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh

laju pertumbuhan kredit rumah tangga untuk kategori multiguna; kepemilikan rumah (KPR); dan pemilikan kendaraan bermotor (KKB) yang masing-masing memiliki andil sebesar 55,1%; 26,5%; dan 7,9%. Pada triwulan laporan, kredit rumah tangga untuk kategori multiguna mencapai Rp13,51 triliun atau tumbuh sebesar 5,47% (yoy), tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,68% (yoy).



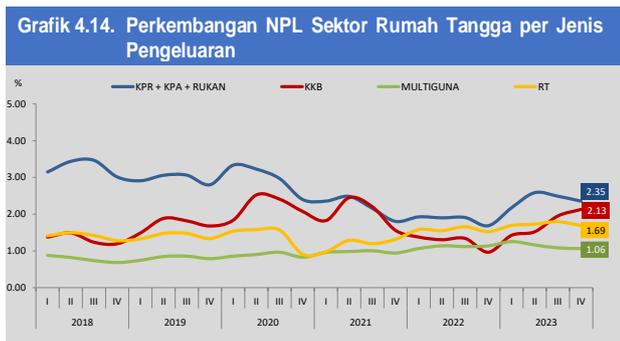
Sumber: LBU Bank Indonesia

Sementara itu, kredit KPR/KPA/rukan mencapai Rp6,49 triliun atau tumbuh sebesar 9,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,16% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit tersebut terjadi pada seluruh tipe KPR/KPA. KPR tipe 21 m<sup>2</sup> tumbuh sebesar 46,73% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 44,73% (yoy). Selanjutnya, KPR tipe 22-70 m<sup>2</sup> masih tumbuh positif sebesar 9,92% (yoy), melanjutkan tren peningkatan sejak triwulan I 2023. Sementara itu, kredit rukan masih berkontraksi sebesar 14,72% (yoy) (GRAFIK 4.13).



Sumber: LBU Bank Indonesia

Sejalan dengan kredit multiguna dan KPR/KPA/Rukan, kredit rumah tangga pada kategori KKB juga meningkat pada triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar Rp 1,93 triliun, tumbuh sebesar 14,56% (yoy) lebih tinggi dibandingkan 10,40% (yoy) pada triwulan sebelumnya (GRAFIK 4.12)

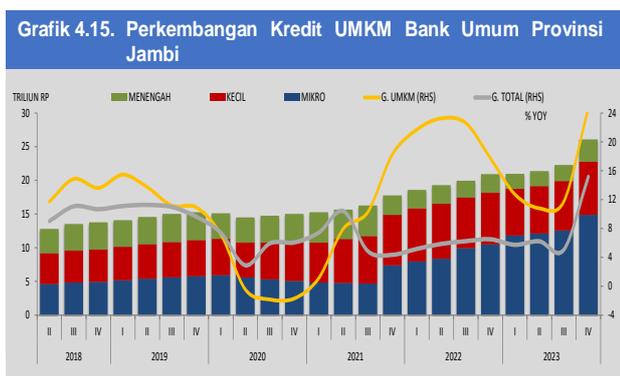


Sumber: LBU Bank Indonesia

Secara umum, risiko di sektor rumah tangga relatif terkendali tercermin dari rasio NPL yang masih terjaga di bawah batas 5% (*gross*). Saat ini NPL rumah tangga tercatat sebesar 1,56%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2023 yaitu 1,60%. Sementara itu, NPL KPR juga tercatat menurun yaitu sebesar 2,35%. Kemudian, NPL KKB dan multiguna masing-masing sebesar 2,13% dan 1,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja kredit yang disalurkan kepada rumah tangga sangat potensial untuk dibiayai dalam rangka meningkatkan peran intermediasi perbankan. (GRAFIK 4.14).

### 4.3 PERKEMBANGAN KREDIT UMKM

**Kredit UMKM Jambi pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp22,26 triliun, tumbuh sebesar 24,66% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,74% (yoy).** Pertumbuhan kredit UMKM tersebut sejalan dengan pertumbuhan total kredit keseluruhan yang tumbuh sebesar 15,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2023 yaitu sebesar 5,05% (yoy). (GRAFIK 4.15).



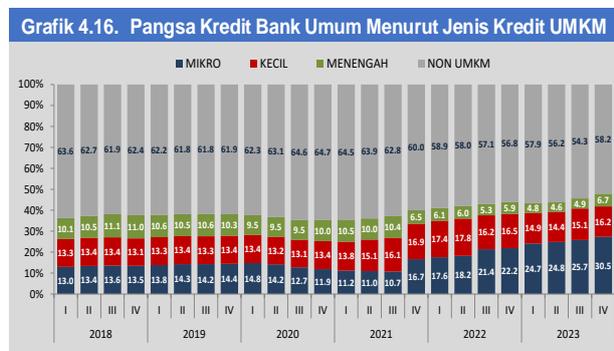
Sumber: LBU Bank Indonesia

Porsi kredit UMKM terhadap total kredit sudah menunjukkan tren peningkatan sejak triwulan IV 2022 dan masih meningkat sampai triwulan IV 2023, menunjukkan recovery pasca pandemi Covid-19. (GRAFIK 4.16). Penurunan pangsa kredit UMKM selama tahun 2020 terutama

dipengaruhi oleh kebijakan perbankan dalam menyalurkan kreditnya secara selektif dan lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudent*) ditengah pandemi COVID-19. Meski demikian, saat ini pemerintah melakukan restriksi kebijakan penyaluran KUR dari yang sebelumnya melekat kepada individu menjadi melekat kepada keluarga. Hal tersebut terkonfirmasi dengan hasil *liaison* yang dilakukan terhadap responden penyedia jasa keuangan khususnya perbankan. Kontak mengungkapkan bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit perusahaan ke depan. Namun kontak menilai bahwa kebijakan ini sudah tepat guna memitigasi risiko.

Perbankan masih mengedepankan pendampingan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan sehingga para pelaku usaha diharapkan dapat memahami manajemen keuangan serta mengelola keuangan yang lebih baik terutama di masa pemulihan ekonomi. Meski demikian, saat ini perbankan semakin *confident* dalam penyaluran kredit kepada sektor rill sebab sektor keuangan sangat bergantung dengan kondisi ekonomi pada sektor rill. Kontak juga menyampaikan bahwa kedepan perbankan memperkirakan pertumbuhan kredit akan dipengaruhi oleh pertumbuhan digitalisasi pembayaran sebab akses penyaluran kredit akan semakin mudah dan juga implementasi pembiayaan hijau.

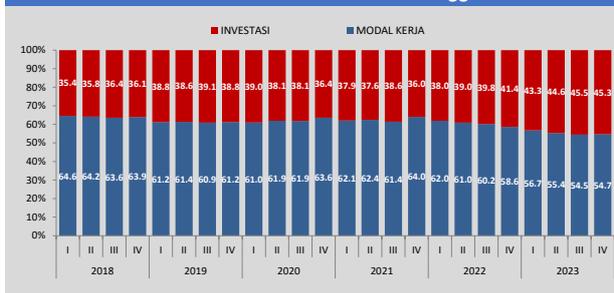
Pada triwulan IV 2023 porsi kredit UMKM di Provinsi Jambi menjadi 47,87%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 45,66%. perbaikan penyaluran kredit tersebut dipengaruhi oleh sentimen positif masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin baik pasca pandemi dan pemulihan perekonomian yang mendorong peningkatan kinerja pelaku usaha.



Sumber: LBU Bank Indonesia

Sementara itu, menurut jenis penggunaannya, kredit UMKM mayoritas digunakan untuk mendukung kegiatan operasional berupa modal kerja sebesar Rp14,25 triliun (pangsa 54,68% terhadap total kredit UMKM) dan sisanya digunakan untuk keperluan investasi sebesar Rp11,81 triliun (pangsa 45,32% terhadap total kredit UMKM). Distribusi penggunaan kredit tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Provinsi Jambi masih mengandalkan kredit untuk menjaga perputaran usaha. Namun demikian, rencana pengembangan usaha atau ekspansi bisnis tetap kuat tercermin pada pangsa kredit investasi yang relatif konsisten (GRAFIK 4.17).

**Grafik 4.17. Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan**

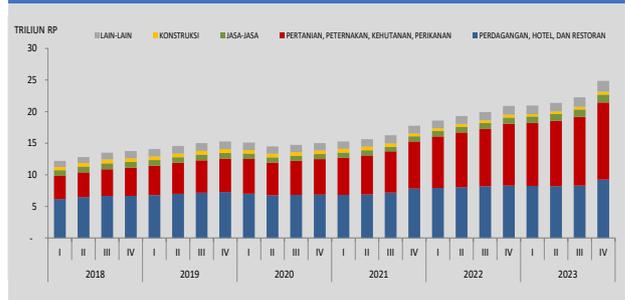


Sumber: LBU Bank Indonesia

Secara sektoral, sebagian besar kredit UMKM di triwulan IV 2023 disalurkan untuk sektor pertanian (pangsa 49,03%) dan sektor perdagangan (pangsa 37,21%). Kondisi tersebut sejalan dengan struktur UMKM di Provinsi Jambi yang mayoritas berada di sektor pertanian serta sektor perdagangan dan eceran (GRAFIK 4.18).

Kredit UMKM sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan IV 2023 sebesar Rp9,25 triliun, tumbuh sebesar 12,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,88% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM sektor pertanian sebesar Rp12,18 triliun atau tumbuh sebesar 34,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 25,89% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

**Grafik 4.18. Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi**



Sumber: LBU Bank Indonesia

Terdapat perbaikan risiko kredit yang tercermin dari rasio NPL UMKM terpantau turun menjadi sebesar 1,93% (gross) pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,40% (gross). Walaupun risiko tersebut tergolong baik, namun masih diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk menjaga risiko kredit senantiasa berada pada *threshold* ditengah pemulihan ekonomi. Perbaikan NPL UMKM sejalan dengan perbaikan NPL kredit secara umum baik kredit investasi maupun kredit modal kerja (GRAFIK 4.19).

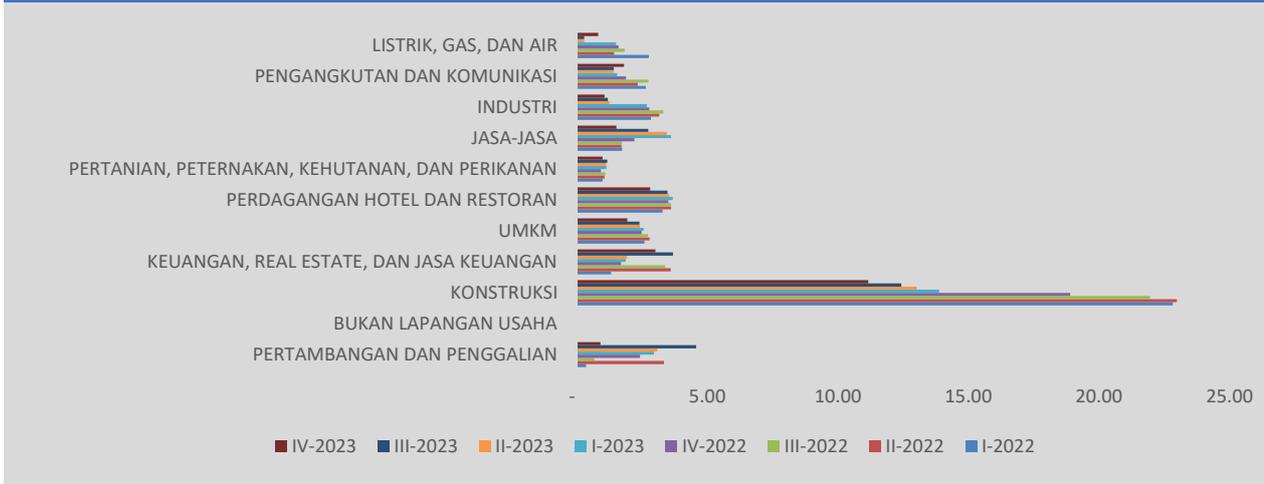
Apabila dilihat secara sektoral, penurunan risiko NPL pada triwulan laporan didorong oleh penurunan rasio NPL hampir di seluruh sektor, khususnya sektor utama yaitu sektor pertanian (NPL 2,81%), pertambangan dan penggalian (NPL 0,90%), dan industri (NPL 1,06%). (GRAFIK 4.20).

**Grafik 4.19. NPL UMKM Provinsi Jambi**



Sumber: LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.20. NPL UMKM Menurut Sektor Ekonomi**



Sumber: LBU Bank Indonesia

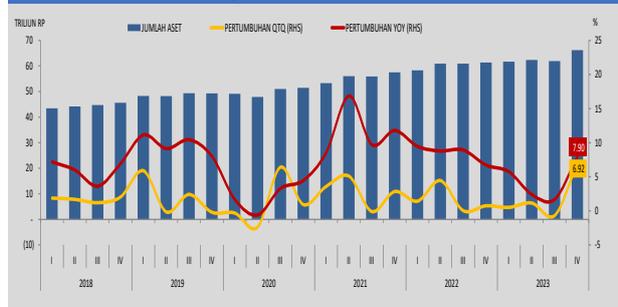
## 4.4 PERKEMBANGAN BANK UMUM

### 4.4.1 Perkembangan Aset Bank

Aset perbankan pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp62,22 triliun atau tumbuh sebesar 7,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,66% (yoy) (GRAFIK 4.21). Berdasarkan jenis bank, andil terbesar pada aset perbankan disumbangkan oleh bank persero sebesar 51,07% kemudian diikuti oleh bank pemerintah dan daerah serta bank swasta nasional masing-masing sebesar 29,30% dan 26,55%.

Aset bank persero tumbuh sebesar 7,56% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,88% (yoy). Selanjutnya, aset bank pemerintah dan daerah tumbuh sebesar 10,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 10,14% (yoy). Sementara itu, aset bank swasta nasional tumbuh 6,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,20% (yoy).

**Grafik 4.21. Perkembangan Aset Bank Umum**



Sumber: LBU Bank Indonesia

Dari sisi pendapatan, kemampuan perbankan di Jambi untuk mencetak laba dari aset, yang ditunjukkan oleh nilai Return on Assets (ROA), pada triwulan IV 2023 sebesar 3,77% (annualized), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,45% (annualized). Sementara itu, average total asset perbankan tercatat meningkat dari Rp74,04 triliun menjadi Rp75,70 triliun pada triwulan laporan (GRAFIK 4.22).

**Grafik 4.22. Return on Asset**



Sumber: LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.23. BOPO**


Sumber: LBU Bank Indonesia

Di sisi lain, kinerja perbankan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. BOPO pada triwulan IV 2023 sebesar 58,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2023 sebesar 57,70% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan operasional. Semakin rendah nilai rasio BOPO, maka semakin baik kinerja perusahaan (GRAFIK 4.23).

#### 4.4.2 Perkembangan Dana Masyarakat

Pada triwulan laporan, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp43,23 triliun atau terkontraksi sebesar 2,64% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,66% (yoy). Pertumbuhan DPK yang terkontraksi disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada giro sebesar 5,96% (yoy) dan tabungan sebesar 4,87% (yoy). Kontraksi ini disebabkan oleh meningkatnya belanja terutama bagi pelaku usaha seiring dengan momentum pemulihan perekonomian daerah. Kemudian, konsumsi masyarakat kelas menengah juga sudah mulai normal kembali seperti tahun-tahun sebelum pandemi.

Berdasarkan pangsa, dana pihak ketiga pada triwulan laporan masih didominasi tabungan sebesar 55,45%, deposito sebesar 27,54%, serta giro sebesar 17,01%. Komposisi DPK ini cenderung tidak mengalami perubahan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. (GRAFIK 4.24)

**Grafik 4.24. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum**


Sumber: LBU Bank Indonesia

Berdasarkan kelompok bank, penghimpunan DPK mayoritas berasal dari bank konvensional yang mencapai Rp 40,43 triliun (pangsa 90,87%) yang kemudian diikuti oleh bank syariah Rp3,06 triliun (pangsa 9,13%) (TABEL 4.1).

Berdasarkan golongan pemilik, DPK utamanya dipengaruhi oleh penghimpunan dana dari Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank serta Pemerintah Daerah. Namun, golongan pemilik perseorangan memiliki andil terbesar dalam penghimpunan dana.

DPK perseorangan masih memberikan andil terbesar yaitu 70,66%. DPK perseorangan terpantau tumbuh terkontraksi sebesar 0,99% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,49% (yoy). Penurunan penghimpunan DPK perseorangan sejalan dengan peningkatan konsumsi yang tercermin dari peningkatan kredit yang disalurkan ke rumah tangga. Selanjutnya, Kelompok nasabah Bukan Lembaga Keuangan yang memberikan andil terbesar kedua sebesar 17,94%, tumbuh sebesar 4,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,09% (yoy). (TABEL 4.2).

Berdasarkan lokasi kab/kota, pertumbuhan DPK dengan andil terbesar berada di Kota Jambi.

Daerah dengan pertumbuhan paling tinggi adalah Kota Jambi dengan pertumbuhan sebesar 3,11% (yoy), tumbuh meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,00% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK Kab. Muaro Jambi tercatat sebesar 15,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 10,14% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK di delapan kota/Kabupaten lainnya tercatat tumbuh terkontraksi. (TABEL 4.3).

#### 4.4.3 Perkembangan Kredit/Penyaluran Dana

Penyaluran kredit oleh bank umum pada triwulan IV 2023 sebesar Rp54,81 triliun, tumbuh sebesar 20,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2023 sebesar 6,20% (yoy) (GRAFIK 4.25). Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan penyaluran kredit terjadi pada kelompok bank swasta dan bank syariah. Pada triwulan laporan, posisi kredit yang disalurkan bank swasta sebesar Rp 12,23 triliun, tumbuh sebesar 117,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 78,66% (yoy). Selanjutnya, penyaluran kredit bank syariah pada triwulan laporan sebesar Rp5,93 triliun, tumbuh 33,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,78% (yoy). Sementara itu, bank pemerintah menyalurkan kredit sebesar Rp36,64 triliun atau berkontraksi sebesar 1,50% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi di triwulan sebelumnya sebesar 7,65% (yoy) (TABEL 4.4.).

Menurut jenis penggunaan, kredit terbesar adalah kredit konsumsi dengan pangsa sebesar 40,06%, diikuti oleh kredit modal kerja (35,04%) dan kredit investasi (24,90%). Pada triwulan IV 2023 kredit konsumsi tercatat sebesar Rp21,96 triliun atau tumbuh sebesar 7,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,48% (yoy).

Kredit modal kerja pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp19,21 triliun atau tumbuh sebesar 27,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,78% (yoy). Selanjutnya, kredit investasi pada triwulan IV 2023 mencapai Rp13,64 triliun, tumbuh sebesar 15,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,26% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar diberikan kepada kategori bukan lapangan usaha, sektor pertanian, serta sektor perdagangan. Pada triwulan laporan, sektor bukan lapangan usaha memiliki pangsa sebesar 40,06%, diikuti dengan pangsa sektor pertanian sebesar 28,50%, sektor perdagangan sebesar 20,17%, serta sektor industri pengolahan sebesar 4,19%. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian hanya memiliki pangsa 0,39% dari total kredit yang disalurkan (TABEL 4.4.).

Selanjutnya, *Loan to Deposits Ratio* (LDR)<sup>4</sup> pada triwulan laporan sebesar 126,79 atau mengalami peningkatan sebesar 15,95% (yoy) disebabkan oleh peningkatan penyaluran kredit pada triwulan laporan. Di sisi lain, DPK tercatat Rp43,23 triliun atau berkontraksi sebesar 2,64% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,66% (yoy). LDR digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban keuangannya. Semakin tinggi tingkat rasio LDR, hal ini menunjukkan maka semakin rendah tingkat likuiditas (GRAFIK 4.25)

LDR bank umum yang melebihi 100% tersebut mengindikasikan relatif tingginya sumber pendanaan kredit/pembiayaan yang berasal dari perbankan di luar Provinsi Jambi. Hal tersebut utamanya diakibatkan oleh beberapa pembiayaan proyek besar merupakan kewenangan kantor pusat bank.

---

<sup>4</sup>LDR perbankan adalah rasio antara penyaluran kredit bank umum dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum pada triwulan laporan.

**Tabel 4.1. Penghimpunan Dana Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta)**

URAIAN	2021		2022				2023			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>BANK KONVENSIONAL</b>	<b>40,108,253.33</b>	<b>40,551,237.94</b>	<b>41,157,761.06</b>	<b>39,739,974.09</b>	<b>40,578,290.22</b>	<b>40,261,655.68</b>	<b>39,965,295.39</b>	<b>39,211,389.63</b>	<b>40,428,978.79</b>	
1. GIRO	7,018,223.66	8,606,922.01	7,871,974.91	8,098,442.37	7,520,770.99	7,404,565.30	6,638,259.17	6,639,209.33	5,899,262.78	
2. TABUNGAN	22,009,017.23	21,891,569.19	22,567,008.55	22,018,284.24	23,121,584.13	23,646,807.68	22,004,013.22	21,766,339.43	22,395,860.90	
3. SIMPANAN BERJANGKA	11,081,012.43	10,052,746.75	10,718,777.59	9,623,247.48	9,935,935.10	9,210,282.69	11,323,023.00	10,805,840.87	12,133,855.11	
<b>BANK SYARIAH</b>	<b>2,662,703.17</b>	<b>3,042,967.32</b>	<b>3,202,941.18</b>	<b>3,349,377.80</b>	<b>3,822,069.51</b>	<b>3,580,851.06</b>	<b>3,479,232.09</b>	<b>3,591,756.75</b>	<b>4,062,765.36</b>	
1. GIRO	227,283.35	254,563.79	272,603.33	336,885.60	299,994.79	355,003.83	329,754.17	363,002.23	441,622.16	
2. TABUNGAN	1,583,876.79	1,710,149.43	1,820,141.38	1,884,533.35	2,074,806.45	1,986,004.97	1,962,047.23	2,037,843.43	2,247,905.75	
3. SIMPANAN BERJANGKA	851,543.03	1,078,254.10	1,110,196.47	1,127,958.86	1,447,268.26	1,239,842.26	1,187,430.68	1,190,911.09	1,373,237.46	
<b>JUMLAH</b>	<b>42,770,956.49</b>	<b>43,594,205.26</b>	<b>44,360,702.24</b>	<b>43,089,351.89</b>	<b>44,400,359.73</b>	<b>43,842,506.74</b>	<b>43,444,527.47</b>	<b>42,803,146.38</b>	<b>44,491,744.15</b>	
1. GIRO	7,245,507.01	8,861,485.80	8,144,578.25	8,435,327.97	7,820,765.79	13,571,972.86	6,968,013.34	7,002,211.56	6,340,884.94	
2. TABUNGAN	23,592,894.02	23,601,718.62	24,387,149.93	23,902,817.59	25,196,390.58	30,115,815.68	23,966,060.45	23,804,182.86	24,643,766.65	
3. SIMPANAN BERJANGKA	11,932,555.46	11,131,000.85	11,828,974.06	10,751,206.34	11,383,203.36	15,843,030.35	12,510,453.68	11,996,751.96	13,507,092.56	

Sumber: LBU Bank Indonesia

**Tabel 4.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik (Rp Juta)**

NO	GOLONGAN PEMILIK	2022		2023										
		IV	II	III				IV						
				NOMINAL	SHARE	YOY	ANDIL	NOMINAL	SHARE	YOY	ANDIL			
	<b>PENDUDUK / RESIDENTS</b>	<b>44,390,071</b>	<b>43,436,099</b>	<b>99.98%</b>	<b>-2.06%</b>	<b>-2.06%</b>	<b>42,794,927</b>	<b>99.98%</b>	<b>-0.66%</b>	<b>-0.66%</b>	<b>44,478,590</b>	<b>99.97%</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.20%</b>
1.	Pemerintah Pusat	469,127	546,918	1.26%	-0.77%	-0.01%	560,446	1.31%	8.83%	0.11%	403,717	0.91%	-13.94%	-0.15%
2.	Pemerintah Daerah (Pemda)	2,541,039	3,549,618	8.17%	-22.69%	-2.35%	3,276,950	7.66%	-26.92%	-2.80%	1,430,535	3.22%	-43.70%	-2.50%
3.	Badan Dan Lembaga Pemerintah	1,101	41,866	0.10%	971.05%	0.09%	36,407	0.09%	836.08%	0.08%	141,303	0.32%	12734.90%	0.32%
4.	BUMN Atau Pemerintah Campuran	238,125	22,887	0.05%	-93.08%	-0.69%	46,340	0.11%	-87.63%	-0.76%	686,890	1.54%	188.46%	1.01%
5.	BUMD	191,315	173,995	0.40%	-5.68%	-0.02%	244,733	0.57%	2.70%	0.01%	187,783	0.42%	-1.85%	-0.01%
6.	Lembaga Keuangan Non Bank	1,554,225	1,045,857	2.41%	-35.61%	-1.30%	730,127	1.71%	-31.20%	-0.77%	2,209,341	4.97%	42.15%	1.48%
7.	Bukan Lembaga Keuangan	7,643,225	7,738,115	17.81%	13.46%	2.07%	7,633,750	17.83%	16.09%	2.46%	7,981,598	17.94%	4.43%	0.76%
8.	Sektor Swasta Lainnya	418	8,426	0.02%	74.64%	0.01%	4,355	0.01%	-40.05%	-0.01%	137	0.00%	-67.31%	0.00%
9.	Perseorangan	31,751,497	30,308,418	69.76%	0.23%	0.16%	30,261,819	70.70%	1.49%	1.03%	31,437,288	70.66%	-0.99%	-0.71%
	<b>BUKAN PENDUDUK / NON RESIDENTS</b>	<b>10,289</b>	<b>8,428</b>	<b>0.03%</b>	<b>-20.82%</b>	<b>-0.01%</b>	<b>8,219</b>	<b>0.02%</b>	<b>-23.50%</b>	<b>-0.01%</b>	<b>13,154</b>	<b>0.04%</b>	<b>27.85%</b>	<b>0.01%</b>
	<b>PENDUDUK DAN BUKAN PENDUDUK</b>	<b>44,400,360</b>	<b>43,444,527</b>	<b>100.01%</b>	<b>-2.07%</b>	<b>-2.07%</b>	<b>42,803,146</b>	<b>100.01%</b>	<b>-0.66%</b>	<b>-0.67%</b>	<b>44,491,744</b>	<b>100%</b>	<b>0.21%</b>	<b>0.21%</b>

Sumber: LBU Bank Indonesia

**Tabel 4.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Lokasi Bank (Rp Juta)**

NO	KOTA/KABUPATEN	2023												
		I			II			III			IV			
		NOMINAL	SHARE	PERTUMBUHAN	YOY (%)	NOMINAL	SHARE	PERTUMBUHAN	YOY (%)	NOMINAL	SHARE	PERTUMBUHAN	YOY (%)	
1.	Kota Jambi	31,384,157	31,185,785	71.78	466,536	1.52	30,645,381	71.60	893,740	3.00	32,821,602.85	76.68	990,182	3.11
2.	Kab. Kerinci	2,049,648	2,131,049	4.91	(142,452)	(6.27)	2,100,719	4.91	(66,984)	(3.09)	2,085,778.60	4.87	(35,528)	(1.67)
3.	Kab. Bungo	2,205,928	2,173,987	5.00	(243,096)	(10.06)	2,212,605	5.17	(143,015)	(6.07)	2,115,542.96	4.94	(129,978)	(5.79)
4.	Tanjung Jabung Barat	2,507,499	2,420,113	5.57	(287,200)	(10.61)	2,330,186	5.44	(304,862)	(11.57)	2,205,491.52	5.15	(399,106)	(15.32)
5.	Kab. Merangin	1,481,953	1,460,737	3.36	(237,396)	(13.98)	1,485,556	3.47	(148,083)	(9.06)	1,478,418.32	3.45	(122,598)	(7.66)
6.	Kab. Batanghari	1,492,948	1,455,193	3.35	(203,829)	(12.29)	1,401,213	3.27	(217,255)	(13.42)	1,397,456.65	3.26	(160,025)	(10.27)
7.	Kab. Sarolangun	916,707	914,582	2.11	12,619	1.40	878,635	2.05	(30,567)	(3.36)	896,351.79	2.09	(9,138)	(1.01)
8.	Kab. Tebo	911,458	946,820	2.18	(155,025)	(14.07)	983,263	2.30	(116,743)	(10.61)	904,308.41	2.11	(31,611)	(3.38)
9.	Tanjung Jabung Timur	367,951	362,846	0.84	(122,417)	(25.23)	386,949	0.90	(109,705)	(22.09)	274,348.67	0.64	(53,887)	(16.42)
10.	Kab. Muaro Jambi	383,922	393,416	0.91	(3,915)	(0.99)	378,641	0.88	(42,730)	(10.14)	312,444.39	0.73	43,074	15.99
	<b>JUMLAH</b>	<b>43,702,171</b>	<b>43,444,527</b>	<b>100.00</b>	<b>(149,677.8)</b>	<b>(0.34)</b>	<b>42,803,146</b>	<b>100.00</b>	<b>(1,557,556)</b>	<b>(3.51)</b>	<b>42,803,146</b>	<b>100.00</b>	<b>(286,206)</b>	<b>(0.66)</b>

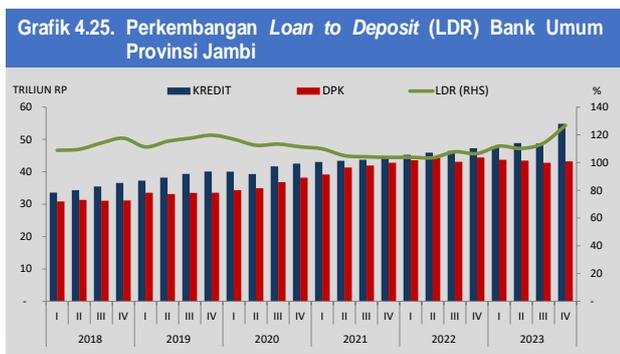
Sumber: LBU Bank Indonesia

**Tabel 4.4. Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta)**

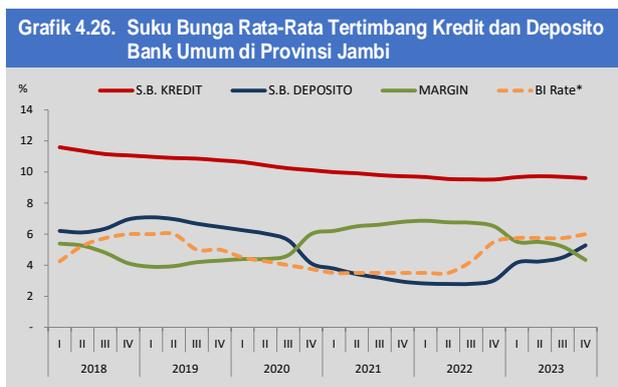
URAIAN	2021	2022				2023			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Kelompok Bank</b>	<b>44,384,752</b>	<b>45,251,650</b>	<b>45,932,075</b>	<b>46,428,422</b>	<b>47,271,816</b>	<b>47,846,412</b>	<b>48,878,923</b>	<b>48,772,867</b>	<b>54,810,684</b>
1. Bank Pemerintah	34,803,571	35,509,428	36,151,873	36,667,627	37,203,874	37,536,473	34,520,768	33,860,782	36,644,329
2. Bank Swasta*)	5,929,779	5,854,038	5,768,870	5,541,836	5,437,306	5,745,212	9,580,846	9,900,880	12,235,463
3. Bank Syariah	3,651,402	3,888,183	4,011,332	4,218,959	4,637,306	4,564,727	4,777,309	5,011,205	5,930,893
<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>44,384,752</b>	<b>45,251,650</b>	<b>45,932,075</b>	<b>46,428,422</b>	<b>47,271,816</b>	<b>47,846,412</b>	<b>48,789,226</b>	<b>48,772,867</b>	<b>54,810,684</b>
1. Modal Kerja	14,460,930	14,541,573	15,068,075	14,957,278	15,058,468	15,022,403	15,517,242	15,373,413	19,206,694
2. Investasi	10,295,930	10,939,201	11,084,996	11,452,231	11,845,976	12,237,029	12,500,777	12,284,179	13,646,643
3. Konsumsi	19,627,892	19,770,876	19,779,005	20,018,912	20,367,372	20,586,980	20,771,207	21,115,276	21,957,348
<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>44,384,752</b>	<b>45,251,650</b>	<b>45,932,075</b>	<b>46,428,422</b>	<b>47,271,816</b>	<b>47,846,412</b>	<b>48,789,226</b>	<b>48,772,867</b>	<b>54,810,684</b>
1. Pertanian/Peternakan/Kehutanan dan P.	10,586,234	11,242,393	12,266,039	12,595,837	13,040,023	13,152,826	13,690,107	12,701,048	15,618,565
2. Pertambangan dan Penggalian	145,307	140,468	155,185	151,402	162,840	148,223	158,752	137,406	213,931
3. Industri	2,451,909	2,239,994	1,461,918	1,221,847	1,348,665	1,671,087	1,711,990	1,990,015	2,297,099
4. LGA	13,501	12,336	23,447	18,056	20,137	21,589	23,225	23,783	14,548
5. Konstruksi	917,466	917,041	911,971	840,418	879,484	792,326	923,335	889,843	950,811
6. Perdagangan Hotel dan Restoran	8,933,756	9,244,381	9,384,394	9,476,913	9,566,159	9,497,801	9,473,465	9,613,003	11,052,947
7. Pengangkutan dan Komunikasi	286,340	269,106	512,965	589,522	287,001	277,088	312,980	394,706	542,726
8. Keuangan, Real estate dan Jasa Perusahaan	459,347	494,460	496,267	546,681	554,125	578,508	572,846	606,639	729,270
9. Jasa-jasa	962,752	920,596	940,884	968,832	1,046,011	1,119,984	1,301,147	1,433,440	
10. Bukan Lapangan Usaha	19,628,141	19,770,876	19,779,005	20,018,912	20,367,372	20,586,980	20,771,207	21,115,276	21,957,348

\*) Termasuk bank asing dan campuran

Sumber: LBU Bank Indonesia



Sumber: LBU Bank Indonesia



Sumber: LBU Bank Indonesia

Dilihat dari *spread* bunga, terlihat bahwa margin rata-rata tertimbang antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito perbankan di Provinsi Jambi relatif menurun dari 5,19% menjadi 4,33%. Penurunan margin bunga tersebut disebabkan oleh penurunan suku bunga kredit di tengah peningkatan suku bunga deposito (GRAFIK 4.26). Suku bunga rata-rata tertimbang kredit pada periode laporan tercatat sebesar 9,61%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 9,69%. Sementara itu suku bunga deposito mengalami peningkatan dari 4,50% pada triwulan III 2023 menjadi 5,28% pada triwulan IV 2023. Per Desember 2023 Bank Indonesia menetapkan BI Rate pada level 6,00%.

Berdasarkan *liaison* yang dilakukan KPwBI Provinsi Jambi, suku bunga kredit tersebut dirasa masih wajar, namun untuk kredit UMKM masih terlalu tinggi. Hal tersebut juga menjadi terasa lebih memberatkan bagi UMKM masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pelaku usaha berharap tingkat suku bunga kredit dapat menurun dalam rangka pendukung perkembangan sektor usaha yang lebih cepat.

Tabel 4.5. Perkembangan Non-Performing Loan (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi

NO	SEKTOR EKONOMI	2023											
		I			II			III			IV		
		KREDIT	NPL (RP)	NPL (%)									
1.	Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan	13,152,826	113,007	0.86	13,690,107	116,691	0.85	12,701,048.24	126,983.35	1.00	15,618,565	120,986.61	0.77
2.	Pertambangan dan Penggalan	287,414	6,904	2.40	297,719	6,950	2.33	277,099.65	7,905.12	2.85	213,931	5,962.33	2.79
3.	Industri	1,819,310	46,351	2.55	1,870,742	32,505	1.74	2,127,421.73	30,152.37	1.42	2,297,099	27,514.13	1.20
4.	LGA	1,692,676	319	0.02	1,735,216	63	0.00	23,783.48	62.94	0.26	14,548	113.25	0.78
5.	Konstruksi	813,915	71,273	8.76	946,560	70,259	7.42	913,626.21	68,539.15	7.50	950,811	67,786.72	7.13
6.	Perdagangan Hotel dan Restoran	9,175,539	334,076	3.64	9,280,906	321,901	3.47	9,332,165.58	331,618.80	3.55	11,052,947	298,119.62	2.70
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	9,497,801	3,742	0.04	9,473,465	3,572	0.04	394,706.01	9,120.12	2.31	542,726	6,023.47	1.11
8.	Keuangan, Real estate dan Jasa Perusahaan	1,391,676	32,406	2.33	1,428,873	23,980	1.68	606,638.69	31,807.53	5.24	729,270	33,138.07	4.54
9.	Jasa-jasa	328,469	40,316	12.27	366,686	38,205	10.42	1,301,147.25	33,048.52	2.54	1,433,440	22,609.32	1.58
10.	Bukan Lapangan Usaha	20,586,980	313,886	1.52	20,771,207	329,518	1.59	21,115,275.82	320,694.25	1.52	21,957,348	328,144.11	1.49
	<b>JUMLAH</b>	<b>58,746,607</b>	<b>962,279</b>	<b>1.64</b>	<b>59,861,481</b>	<b>943,644</b>	<b>1.58</b>	<b>48,792,913</b>	<b>959,932</b>	<b>1.97</b>	<b>54,810,684</b>	<b>910,398</b>	<b>1.66</b>

Sumber: LBU Bank Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



## BAB V

# PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Permintaan uang kartal meningkat pada triwulan IV 2023 tercermin dari peningkatan *net outflow* yang didorong adanya aliran uang masuk seiring adanya libur Panjang sekolah dan HBKN Natal serta tahun baru.



**Permintaan uang kartal meningkat pada triwulan IV 2023 tercermin dari peningkatan *net outflow* yang didorong adanya aliran uang keluar seiring adanya libur panjang sekolah dan libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru.**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman diperlukan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien.

Perkembangan pembayaran tunai di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 mengalami *net outflow* sebesar Rp2.078,518 miliar dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya *net outflow* mengalami kenaikan sebesar 11,14% (yoy). Di sisi sistem pembayaran nontunai, nilai kliring dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 berkontraksi masing-masing sebesar 13,89% (yoy) dan 17,18% (yoy). Secara triwulanan, pada triwulan IV 2023 nilai kliring mengalami peningkatan sebesar 1,24% (qtq), sementara volume kliring mengalami penurunan 3,28% (qtq). Selain kliring, nilai dan volume RTGS juga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 28,78% (yoy) dan 16,04% (yoy) atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,67% (qtq) dan 3,5% (qtq) secara triwulanan.

Selain penyelenggaraan sistem pembayaran tunai dan nontunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga mengadakan edukasi Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) secara berkala baik kepada pelajar/mahasiswa, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, serta bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan Pemda. Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga mendorong digitalisasi sektor transportasi. Seluruh kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan menciptakan *less cash society* di Provinsi Jambi. Implementasi elektronifikasi merupakan upaya mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai yang mudah, aman, praktis, nyaman, dan efisien.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Jambi bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya telah membentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi sebagai berikut: Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi, dan Kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil Indeks ETPD Semester II Tahun 2023, seluruh TP2DD di wilayah kerja Provinsi Jambi berhasil mempertahankan transaksi pemerintah daerah dalam kategori Tahap Digital.

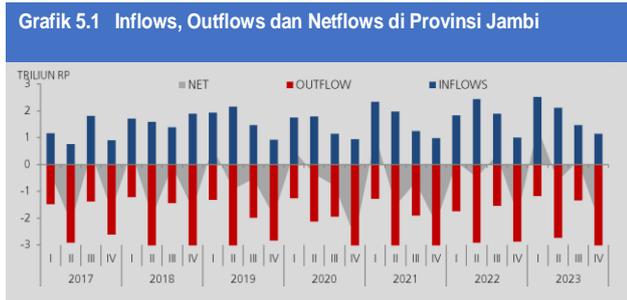
Sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga memfasilitasi pendaftaran *merchant* untuk memperoleh *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) kepada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Per Desember 2023 terdapat 296.672 *merchant* tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah memiliki QRIS. Jumlah ini naik sebesar 7,22% dibandingkan dengan triwulan III 2023. Sementara untuk jumlah user QRIS sebanyak 497.973 user atau naik sebesar 11,58% dibandingkan dengan triwulan III 2023. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan dan menciptakan *less cash society* di Provinsi Jambi.

## 5.1 PERKEMBANGAN TRANSAKSI TUNAI DAN NONTUNAI

Perkembangan sistem pembayaran di Provinsi Jambi tercermin dari jumlah transaksi tunai dan non tunai. Transaksi tunai terdiri atas aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*) dan aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*). Sedangkan transaksi nontunai Provinsi Jambi terdiri atas transaksi yang menggunakan infrastruktur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan *BI-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Transaksi pembayaran nontunai dapat dilakukan menggunakan instrumen pembayaran berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE).

Perkembangan transaksi tunai dan nontunai di Provinsi Jambi pada triwulan IV - 2023 ditunjukkan pada **TABEL 5.1.**

## 5.1.1 Perkembangan Transaksi Tunai



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

**Transaksi tunai di Provinsi Jambi pada triwulan IV-2023 menunjukkan net outflow sebesar Rp 136,493 miliar.** Total aliran uang kartal yang masuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi pada triwulan IV-2023 sebesar Rp2.078,518 miliar sementara total aliran uang kartal yang

diedarkan sebesar Rp3.221,979 miliar. Hal ini sejalan dengan adanya libur panjang sekolah dan libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Aliran kas masuk dan keluar di Provinsi Jambi sebagaimana **GRAFIK 5.1** merupakan aliran kas dari transaksi tarikan dan setoran bank melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi maupun yang ditransaksikan melalui Kas Titipan Bank Indonesia di Muara Bungo dan Kuala Tungkal dengan jumlah *outflow* selama triwulan IV-2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan *outflow* pada triwulan III-2023 yang berjumlah Rp1.334,379 miliar. Dari sisi *inflow*, pada triwulan IV-2023 tercatat lebih rendah dibandingkan *inflow* triwulan sebelumnya yang mencapai Rp1.143,460 miliar.

**Tabel 5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran melalui KPwBI Provinsi Jambi**

URAIAN	2021	2022				2023			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>NON TUNAI</b>									
<b>KLIRING</b>									
Nilai Kliring (juta Rp)	1.069.990	979.565	996.783	938.381	939.066	852.995	732.568	798.731	808.670
Δ Nominal (yoy)	(52.232)	(55.761)	(55.960)	(66.358)	(130.924)	(126.570)	(264.215)	(139.650)	(130.396)
% (yoy)	-4,65%	-5,39%	-5,32%	-6,60%	-12,24%	-12,92%	-26,51%	-14,88%	-13,89%
Δ Nominal (qtq)	65.251	(90.425)	17.218	(58.402)	685	(86.072)	(120.426)	66.163	9.939
% (qtq)	6,49%	-8,45%	1,76%	-5,86%	0,07%	-9,17%	-14,12%	9,03%	1,24%
Volume Kliring (lembar warkat)	22.666	20.353	18.915	19.672	18.623	17.161	14.372	15.946	15.423
Δ Nominal (yoy)	(6.013)	(5.085)	(3.458)	(2.058)	(4.043)	(3.192)	(4.543)	(3.726)	(3.200)
% (yoy)	-20,97%	-19,99%	-15,46%	-9,47%	-17,84%	-15,68%	-24,02%	-18,94%	-17,18%
Δ Nominal (qtq)	936	(2.313)	(1.438)	757	(1.049)	(1.462)	(2.789)	1.574	(523)
% (qtq)	4,31%	-10,20%	-7,07%	4,00%	-5,33%	-7,85%	-16,25%	10,95%	-3,28%
<b>CEK DAN BIRO GILYET KOSONG</b>									
Nominal (juta Rp)	22.487	21.850	23.707	25.574	22.583	21.097	22.537	19.405	33.673
Δ Nominal (yoy)	(14.258)	(5.206)	3.434	(1.300)	96	(753)	(1.171)	(6.169)	11.089
% (yoy)	-38,80%	-19,24%	16,94%	-4,84%	0,43%	-3,45%	-4,94%	-24,12%	49,10%
Δ Nominal (qtq)	(4.387)	(637)	1.857	1.867	(2.991)	(1.486)	1.440	(3.132)	14.268
% (qtq)	-16,32%	-2,83%	8,50%	7,87%	-11,69%	-6,58%	6,82%	-13,90%	73,53%
Lembar	501	449	456	525	403	454	424	345	434
Δ Nominal (yoy)	(93)	(112)	(22)	(15)	(98)	5	(32)	(180)	31
% (yoy)	-15,66%	-19,96%	-4,60%	-2,78%	-19,56%	1,11%	-7,02%	-34,29%	7,69%
Δ Nominal (qtq)	(39)	(52)	7	69	(122)	51	(30)	(79)	89
% (qtq)	-7,22%	-10,38%	1,56%	15,13%	-23,24%	12,66%	-6,61%	-18,63%	25,80%
<b>RTGS</b>									
Nilai RTGS (miliar Rp)	30.987.073	25.974.928	28.613.095	21.391.160	40.546.344	29.604.324	25.902.095	27.072.937	28.877.677
Δ Nominal (yoy)	2.962.129	9.034.099	9.084.070	315.420	9.559.271	3.629.396	(2.711.001)	5.681.777	(11.668.667)
% (yoy)	10,57%	53,33%	46,52%	1,50%	30,85%	13,97%	-9,47%	26,56%	-28,78%
Δ Nominal (qtq)	9.911.334	(5.012.145)	2.638.168	(7.221.936)	19.155.184	(10.942.020)	(3.702.229)	1.170.842	1.804.740
% (qtq)	47,03%	-16,17%	10,16%	-25,24%	89,55%	-26,99%	-12,51%	4,52%	6,67%
Volume RTGS (lembar warkat)	17.012	15.112	13.974	12.999	14.518	11.647	10.250	11.777	12.189
<b>TUNAI</b>									
NET INFLOWS/OUTFLOWS (JUTA RP)	(2.183.836)	102.649	(479.186)	357.003	(1.870.157)	1.337.915	(602.073)	136.493	(2.078.518)
Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp)	976.076	1.838.612	2.427.801	1.888.055	1.000.704	2.523.683	2.119.881	1.470.873	1.143.460
Δ Nominal (yoy)	31.560	(496.064)	462.869	638.845	24.628	685.071	(307.920)	(417.183)	142.757
% (yoy)	3,34%	-21,25%	23,56%	51,14%	2,52%	37,26%	-12,68%	-22,10%	14,27%
Δ Nominal (qtq)	(273.134)	862.536	589.189	(539.745)	(887.352)	1.522.979	(403.802)	(649.008)	(327.412)
% (qtq)	-21,86%	88,37%	32,05%	-22,23%	-47,00%	152,19%	-16,00%	-30,62%	-22,26%
Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp)	3.159.912	1.735.963	2.906.987	1.531.052	2.870.860	1.185.768	2.721.953	1.334.379	3.221.979
Δ Nominal (yoy)	(478.259)	461.195	(575.132)	(370.743)	(289.052)	(550.195)	(185.034)	(196.673)	351.118
% (yoy)	-13,15%	36,18%	-16,52%	-19,49%	-9,15%	-31,69%	-6,37%	-12,85%	12,23%
Δ Nominal (qtq)	1.258.117	(1.423.949)	1.171.024	(1.375.935)	1.339.808	(1.685.093)	1.536.185	(1.387.574)	1.887.599
% (qtq)	66,15%	-45,06%	67,46%	-47,33%	87,51%	-58,70%	129,55%	-50,98%	141,46%

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

### 5.1.2 Perkembangan Transaksi Nontunai

Nilai dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan IV - 2023 berkontraksi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 13,89% (yoy) dan 17,18% (yoy). Secara triwulanan, nilai kliring pada triwulan IV - 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,24% (qtq), namun volume kliring mengalami penurunan sebesar 3,28% (qtq).

Volume dan nilai kliring dimaksud telah memperhitungkan pertukaran warkat debit yang dikelola oleh Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) di Kabupaten Muara Bungo yang dikelola oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bungo. (GRAFIK 5.2).

Tren transaksi kliring dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya pilihan instrumen pembayaran digital sehingga penggunaan instrumen pembayaran Cek dan Giro oleh individu maupun korporasi semakin menurun.

Nilai dan volume transaksi RTGS di Provinsi Jambi pada triwulan III - 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 4,52% (yoy) dan 14,90% (yoy). Secara triwulanan, nilai dan volume RTGS juga mengalami peningkatan masing sebesar 4,52% (qtq) dan 14,90% (qtq).

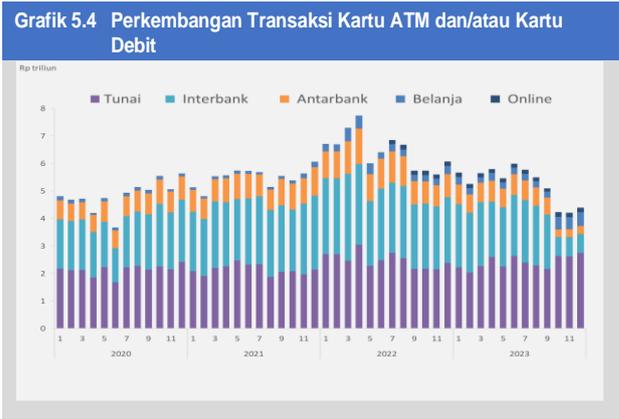


Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Perkembangan transaksi RTGS di Provinsi Jambi ditunjukkan pada GRAFIK 5.3. Peningkatan nilai dan volume kliring dan RTGS ini sejalan dengan peningkatan realisasi APBD pemerintah daerah di Provinsi Jambi.



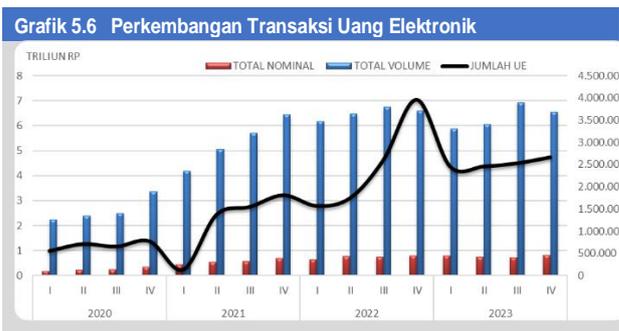
Sumber: Lapran Penerbit APMK (diolah)

Di Provinsi Jambi, penggunaan kartu ATM dan/atau kartu debit cenderung lebih banyak digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan pemindahbukuan (GRAFIK 5.5). Sementara penggunaan kartu kredit mayoritas digunakan untuk belanja (GRAFIK 5.5).

Sementara pada instrumen UE, tren peningkatan baik dari sisi jumlah maupun volume masih terus terjadi (GRAFIK 5.6). Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran non tunai semakin tinggi



Sumber: Lapran Penerbit APMK (diolah)



Sumber: Lapran Penerbit APMK (diolah)

## 5.2 PENYEDIAAN UANG LAYAK EDAR

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar atau mendorong *clean money policy*, Bank Indonesia aktif

melakukan layanan kas baik di dalam kantor (layanan penukaran) maupun di luar kantor (layanan kas keliling).

Layanan kas bagi masyarakat di luar kantor berupa layanan kas keliling di dalam kota dan di luar kota dilakukan dengan target lokasi di pasar tradisional/modern dan pusat-pusat keramaian lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah layak edar. Seluruh kegiatan dimaksud diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas uang Rupiah yang beredar di Provinsi Jambi.

Layanan kas bagi masyarakat untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran melalui loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi diberlakukan setiap hari Kamis. Selain itu, kegiatan penukaran juga dilakukan dengan melibatkan perbankan di wilayah kerja dengan menghimbau seluruh bank untuk membuka loket penukaran. Selama triwulan IV - 2023 telah dilakukan layanan kas keliling sebanyak 7 (tujuh) kali dan layanan penukaran uang sebanyak 9 (sembilan) kali.

(TABEL 5.2).

**Tabel 5.2 Kas Keliling dan Penukaran Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Jambi Triwulan I 2022**

BULAN		PELAKSANAAN	
		Kas Keliling	Penukaran
1	Oktober	3	3
2	November	2	4
3	Desember	2	2

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

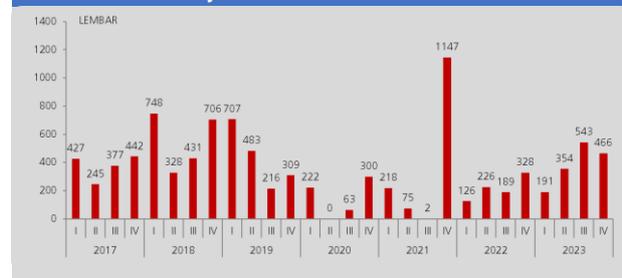
Selain melalui pelaksanaan kas keliling dan penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi membuka layanan penukaran uang melalui Kas Titipan di Muara Bungo dan Kuala Tungkal. Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan ke salah satu kantor cabang bank (selaku bank pengelola) untuk mencukupi kebutuhan kas perbankan di wilayah tersebut. Adanya Kas Titipan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang seluruh lapisan masyarakat dengan kualitas uang yang lebih baik. Melalui Kas Titipan, Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang diserap oleh perbankan dapat disetorkan kepada Bank Pengelola Kas Titipan, dan selanjutnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melakukan penarikan UTLE tersebut dan *dropping* Uang Layak Edar (ULE) kepada Bank Pengelola Kas Titipan. ULE di Bank Pengelola Kas Titipan akan diedarkan ke seluruh masyarakat melalui perbankan.

### 5.3 PERKEMBANGAN TEMUAN UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki simbol-simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara adalah mata uang Rupiah yang diatur dengan Undang Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemalsuan uang Rupiah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta dunia terhadap Rupiah, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan perekonomian. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan pemantauan serta mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan uang palsu.

Dalam rangka mempermudah pelaporan uang yang diragukan keasliannya oleh perbankan untuk dapat diklarifikasi lebih lanjut oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bank Indonesia mengimplementasikan aplikasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI CAC). Melalui aplikasi dimaksud, bank dapat melakukan pelaporan secara *online* atas temuan uang yang diragukan keasliannya untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan fisik uang yang diragukan keasliannya ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Jumlah uang Rupiah yang diragukan keasliannya pada triwulan IV - 2023 menurun dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi CBP yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mengidentifikasi keaslian uang Rupiah (GRAFIK 5.4).

**Grafik 5.7 Perkembangan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya di Provinsi Jambi**



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Dalam rangka penanggulangan peredaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi secara berkesinambungan bekerja sama dengan instansi yang berwenang dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Sebagaimana

ketentuan yang berlaku, uang Rupiah yang diragukan keasliannya akan diserahkan kepada Kepolisian Daerah Jambi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Selain itu, sebagai upaya mencegah peredaran uang palsu, secara berkala dilakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah ke berbagai lapisan masyarakat secara intensif agar masyarakat dapat lebih cermat dalam mengenali uang Rupiah, termasuk juga sosialisasi cara memperlakukan uang Rupiah yang baik melalui 5 Jangan (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi), serta edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah.

#### 5.4 INKLUSI KEUANGAN DAN ELEKTRONIFIKASI

Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) adalah gerakan penggunaan alat pembayaran nontunai yang dicanangkan Bank Indonesia sejak tanggal 14 Agustus 2014. GNNT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan nontunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih aktif dalam menggunakan nontunai di Indonesia. Dalam rangka mempercepat gerakan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia membentuk Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan.

Program elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai. Program elektronifikasi diharapkan dapat memperluas akses keuangan, memperkuat kesehatan fiskal dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Inklusi Keuangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan. Inklusi Keuangan dinilai sebagai salah satu faktor penting dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Inklusi Keuangan juga masuk dalam agenda prioritas Pemerintah Pusat. Pada bulan Juni 2012, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam strategi tersebut telah dicanangkan visi Inklusi Keuangan Indonesia, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Program inklusi keuangan yang turut didorong oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi adalah penyaluran Program Bantuan Sosial Non Tunai bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, Dinas Sosial Kab. Muaro Jambi, Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Timur, perbankan dan Kantor Pos di wilayah Provinsi Jambi. Salah satunya yaitu Program Sembako adalah pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan penambahan nominal bantuan dan jenis bahan pangan yang dapat dibelanjakan (sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin dan mineral). Namun mulai tahun 2023 terdapat perubahan mekanisme dari pemerintah dimana untuk penyalurannya tidak lagi dalam bentuk pengambilan sembako di e-warong namun dalam bentuk uang tunai melalui Kantor Pos.

Dinas Sosial Provinsi Jambi melalui para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bertanggung jawab melakukan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengajukan persetujuan kepada Kementerian Sosial untuk pembukaan e-warong yang akan menjadi lokasi penyaluran Program Sembako dimaksud. Perbankan bertanggung jawab untuk menyediakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi KPM sehingga kartu tersebut dapat digunakan sebagai: (i) identitas penerima bansos, (ii) rekening tabungan, (iii) uang elektronik *registered*, serta (iv) *e-wallet* untuk PKH, Program Sembako, dan bantuan pemerintah lainnya. Selain itu, perbankan juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi e-warong yang dapat diakuisisi menjadi agen Layanan Keuangan Digital/LKD sehingga dapat diberikan mesin EDC untuk melayani para KPM.

Sehubungan dengan perubahan kebijakan pemerintah terkait penyaluran Program Sembako dimana bansos tidak diberikan lagi dalam bentuk sembako melainkan uang tunai melalui kantor pos maupun agen bank, maka e-warong di Provinsi Jambi banyak yang sudah tidak beroperasi lagi.

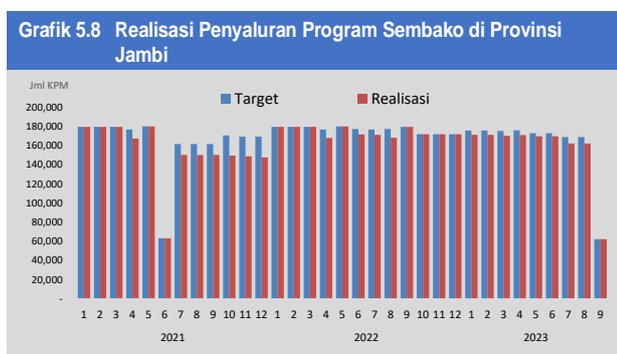
Dalam rangka memastikan kelancaran penggunaan KKS, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi selaku otoritas sistem pembayaran bertanggung jawab untuk

melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada KPM sehingga potensi kendala yang timbul atas penggunaan KKS dan mesin EDC di agen bank dapat dimitigasi sejak awal. Seluruh instansi yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penyaluran dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi, dan tepat kualitas (6T).

Pada penyaluran Program Sembako, KPM diberikan pilihan dan kendali untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan mempertimbangkan pedoman gizi seimbang yaitu karbohidrat untuk memberikan tenaga bagi tubuh untuk melakukan kegiatan, protein hewani dan protein nabati untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh, serta vitamin dan mineral untuk antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Diharapkan dalam jangka panjang pemenuhan gizi seimbang dapat mencegah terjadinya *stunting*. Bantuan tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MPASI pabrikan, mie instan, makanan kaleng, dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam bahan pangan yang diatur untuk Program Sembako.

Namun karena penyaluran Program Sembako dilakukan dalam bentuk uang tunai maka akan sangat sulit untuk memantau penggunaan dana bansos apakah sesuai dengan peruntukannya. Saat ini pemerintah melalui Kemensos sedang mempelajari serta mengkaji metode penyaluran Program Sembako selain agar efektif dan efisien juga mudah dalam pengawasan atas peruntukan dana Program Sembako.

Realisasi penyaluran Program Sembako sampai dengan Desember 2023 ditunjukkan pada (GRAFIK 5.6).



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Rerata penyaluran Program Sembako pada triwulan IV - 2023 telah diberikan kepada 167.810 KPM (97,82% dari total target 171.544 KPM).

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring bansos nontunai tahun 2023 yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat, temuan penting di lapangan dalam penyaluran Program Sembako diantaranya: masih terdapat permasalahan yang dialami oleh KPM saat melakukan pengambilan BSNT secara mandiri, seperti lupa PIN, salah memasukan PIN, dan kartu KKS terblokir, sebagian besar KPM merasa keberatan dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran bansos Program Sembako yang dialihkan ke Kantor Pos mengakibatkan KPM harus mengeluarkan tambahan biaya karena letak Kantor Pos yang cukup jauh; banyak e-warong yang sudah tidak aktif lagi sebagai akibat perubahan prosedur pengambilan bansos Program Sembako yang tidak lagi melalui e-Warong melainkan melalui Kantor Pos; serta masih terdapat sinyal komunikasi di wilayah responden yang hanya berkualitas bagus untuk beberapa operator. Dari hasil monitoring bansos juga ditemukan bahwa minat KPM masih sangat kecil terhadap alat pembayaran elektronik dalam bertransaksi serta masih kecilnya keinginan KPM untuk membuka rekening mandiri selain rekening bansos.

Berkaitan dengan elektronifikasi transaksi keuangan Pemda, menindaklanjuti SE Menteri Dalam Negeri No.910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan SE Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Realisasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Perbendaharaan Negara dan bank daerah tanggal 2 Mei 2018 berkaitan dengan penyaluran gaji melalui rekening PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri secara terpusat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berperan serta dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran penyaluran gaji melalui rekening dimaksud. Saat ini realisasi penyaluran gaji PNS telah mencapai 100% melalui rekening perbankan.

Acuan yang dapat digunakan untuk implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda di Provinsi Jambi saat ini antara lain surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi No.S-1226/Bakeuda-1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 yang mewajibkan rekanan Pemerintah Daerah untuk membuka rekening dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mewajibkan pembayaran gaji, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan honor Pegawai Tidak Tetap

(PTT) secara nontunai melalui rekening, serta surat dari Gubernur Jambi No.S-028/1415/SETDA.PSDA-2.3/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Implementasi Transaksi Nontunai Pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Provinsi Jambi.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya telah membentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi. (TABEL 5.3).

**Tabel 5.3 Daftar TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi Jambi**

NO.	DAERAH	NO. SURAT KEPUTUSAN (SK) TP2DD	TENTANG
1	Provinsi Jambi	No.171/KEP.GUBA/KEUDA-1/2021 tanggal 11 Februari 2021	Pem. bentukan Provinsi Jambi TP2DD
2	Kabupaten Kerinci	No.900/Kep.20/2021 tanggal 15 Februari 2021	Pem. bentukan Kabupaten Kerinci TP2DD
3	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	No.222/TAHUN 2021 tanggal 19 Maret 2021	Penetapan Kabupaten Tanjung Jabung Timur TP2DD
4	Kabupaten Muaro Jambi	No.238/Kep.Bup.BPKAD/2021 tanggal 19 April 2021	Pem. bentukan Kabupaten Muaro Jambi TP2DD
5	Kabupaten Sarolangun	No.183/BPKAD/2021 tanggal 10 Mei 2021	Pem. bentukan Kabupaten Sarolangun TP2DD
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	No.354/Kep.Bup.Eko/2021 tanggal 17 Mei 2021	Pem. bentukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat TP2DD
7	Kabupaten Merangin	No.60/BPERD/2021 tanggal 20 Mei 2021	Pem. bentukan Kabupaten Merangin TP2DD
8	Kota Sungai Penuh	No.900/Kep.135/2021 tanggal 4 Juni 2021	Pem. bentukan Kota Sungai Penuh TP2DD
9	Kabupaten Tebo	No.384/TAHUN 2021 tanggal 8 Juni 2021	Pem. bentukan Kabupaten Tebo TP2DD
10	Kabupaten Batang Hari	No.155/TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021	Pem. bentukan Kabupaten Batang Hari TP2DD
11	Kota Jambi	No.229/TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021	Pem. bentukan Kota Jambi TP2DD
12	Kabupaten Bungo	No.167/PEREKONOMIAN/TAHUN 2021 tanggal 11 Juli 2021	Pem. bentukan Kabupaten Bungo TP2DD

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

TP2DD dibentuk sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Melalui kolaborasi dan Kerjasama yang kuat antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Pemda dan Bank RKUD, pada Semester II 2023 seluruh TP2DD di Provinsi Jambi (12 TP2DD) telah berhasil mempertahankan transaksi pemerintah daerah masuk dalam kategori Digital.

Perluasan elektronifikasi pemerintah daerah di tahun 2023 terlihat dengan adanya 6 pemda yang telah memiliki Perkada yang mengatur implementasi Kartu Kredit

Indonesia (KKI) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan bank RKUD, dalam hal ini Bank Jambi. Bahkan salah satu pemda sudah masuk dalam tahap implementasi KKI yaitu Pemerintah Kota Jambi. Salah satu inovasi elektronifikasi pemerintah daerah yang sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah Program Pembayaran PBB melalui QRIS dinamis, dimana setiap SPT PBB sudah dilengkapi dengan QR code yang dapat di-scan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran.

Selain koordinasi dengan pemerintah daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan berhasil mengimplementasikan program pembayaran parkir bandara wajib menggunakan uang elektronik. Dan saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi sedang berkoordinasi dengan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal (ASDP) agar dapat mengimplementasikan program E-Ticketing pembelian tiket penumpang Kapal Ferry dari Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal. Hal ini bertujuan agar penggunaan alat pembayaran elektronik dapat semakin meluas di masyarakat.

## 5.5 PERKEMBANGAN QRIS

Berkaitan dengan implementasi GNNT di Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi secara berkala juga melaksanakan kegiatan edukasi GNNT kepada pelajar dan mahasiswa, serta kelompok masyarakat lainnya secara lebih luas. Pelajar dan mahasiswa merupakan target utama edukasi GNNT mengingat secara umum karakter kelompok penduduk muda (milenial) adalah melek teknologi, berani mencoba hal baru, dan cenderung memilih sesuatu yang praktis. Sektor kuliner, seperti *café* dan *foodcourt* saat ini menjadi sektor prioritas di Provinsi Jambi dalam meningkatkan perluasan implementasi transaksi nontunai, mempertimbangkan tingginya aktivitas kelompok milenial maupun keluarga di tempat kuliner. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan menciptakan *less cash society* di Provinsi Jambi.

Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap *smartphone* di Indonesia mendorong perusahaan teknologi dan keuangan memanfaatkan teknologi sebagai media pembayaran retail. Hal ini membuat layanan *mobile payment* di dalam *smartphone* menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat sekaligus untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Salah satu penggunaan teknologi dalam *mobile payment* yang

berkembang pesat saat ini adalah penggunaan *Quick Response Code*.

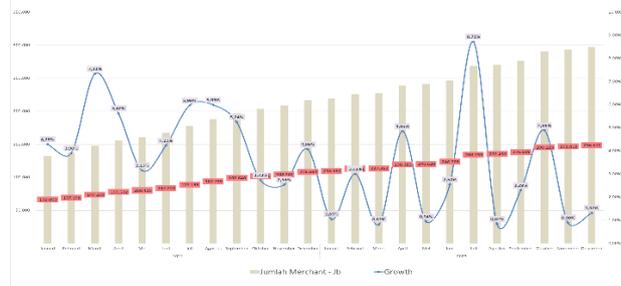
QR Code merupakan serangkaian kode yang memuat data/informasi antara lain identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. Pembayaran dengan QR Code memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan QR Code menampung informasi pembayaran yang banyak meskipun dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat.

Sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan penetapan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran nontunai sebagaimana diatur dalam PADG No.21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi memfasilitasi pendaftaran *merchant* untuk memperoleh QRIS melalui PJP di Provinsi Jambi. Penggunaan QRIS diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi *merchant* dan konsumen antara lain: (i) menerima pembayaran secara higienis karena pembayaran dilakukan menggunakan gawai konsumen sehingga tidak memerlukan uang kembalian dan bebas dari potensi risiko pencurian dan/atau uang palsu, (ii) transaksi cepat dan tercatat, serta (iii) murah dan bebas biaya bagi Usaha Mikro. Khusus untuk *merchant*, transaksi yang tercatat dapat digunakan sebagai basis membangun *credit profiling*.

Sejak QRIS diluncurkan, berbagai kemajuan cukup pesat telah dicapai. Saat ini terdapat 120 (seratus dua puluh) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bank maupun nonbank yang sudah mendapat izin QRIS dari Bank Indonesia. Perluasan *merchant* QRIS telah berlangsung di seluruh Indonesia dengan jumlah 5,78 juta *merchant* di tahun 2020 dan 14 juta *merchant* di akhir tahun 2021. Per Desember 2023 terdapat 296.672 *merchant* (GRAFIK 5.9), tumbuh 7,22% atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah Pengguna QRIS juga terus tumbuh positif pada

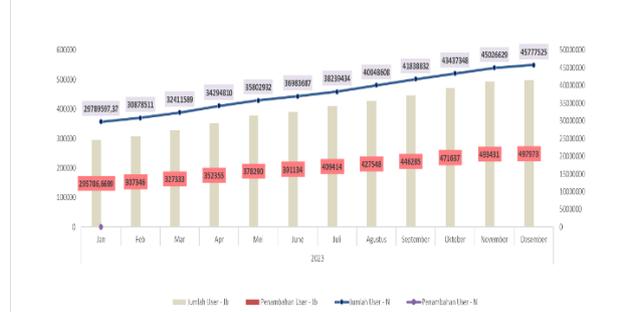
triwulan IV 2023 mencapai 497.973 pengguna (GRAFIK 5.10) atau lebih tinggi dari triwulan III 2023 yang mencapai 446.285 pengguna. Volume transaksi QRIS di Provinsi Jambi terus mengalami pertumbuhan, hingga Desember 2023 tercatat sebanyak 6.007.962 transaksi dengan nilai Rp883,46 Miliar (GRAFIK 5.10).

**Grafik 5.9 Perkembangan Merchant yang Memiliki QRIS di Provinsi Jambi**



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

**Grafik 5.10 Perkembangan QRIS-user di Provinsi Jambi**



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi QRIS oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, PJP dan berbagai *stakeholder* lainnya diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengetahui dan memahami QRIS sebagai kanal pembayaran nontunai, mekanisme dalam bertransaksi, keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan transaksi tunai, serta potensi risiko dan mitigasi yang dapat dilakukan oleh nasabah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan implementasi QRIS di Provinsi Jambi. Selanjutnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi akan terus melakukan implementasi QRIS di berbagai komunitas melalui koordinasi dengan PJP Berizin QRIS di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi.

## BOKS 2

# DORONG PROMOSI WISATA DAERAH, BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI MENYELENGGARAKAN KEGIATAN KENDURI BUDAYO 2023 BERTAJUK "BERWISATA DI JAMBI AJA"



Gambar 4.1. Seremoni pembukaan Kenduri Budaya 2023

Kinerja pariwisata yang berangsur pulih pasca pandemi, menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Melihat data historis, sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* pada sub sektor di bawahnya. Saat ini, kenaikan wisman dan pergerakan mobilitas wisnus berkontribusi pada membaiknya kinerja sektor ekonomi terkait pariwisata di antaranya akomodasi makanan minuman, perdagangan serta transportasi.

Meskipun demikian, akselerasi pemulihan kinerja pariwisata nasional dan daerah perlu terus didorong untuk tetap tahan dalam menghadapi sejumlah tantangan. Optimisme kebangkitan sektor pariwisata perlu terus dibangun melalui sinergi dari segenap pemangku kebijakan terkait.

Sebagai upaya dalam mendorong promosi wisata daerah, Bank Indonesia Jambi bersinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyelenggarakan kegiatan Kenduri Budaya 2023 yang dilaksanakan di Candi Muara Jambi (05/11/2023). Kenduri Budaya ini merupakan partisipasi bersama dalam Gerakan Bangsa Berwisata di

Indonesia (GWBI) khususnya untuk mempromosikan serta meningkatkan perhatian masyarakat akan kekayaan kebudayaan dan sejarah di Provinsi Jambi serta mendorong gerakan masyarakat "berwisata di Jambi aja".



Gambar 4.2. Sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi, Pj Bupati Muaro Jambi, unsur FORKOPIMDA, serta para pimpinan lembaga vertikal di wilayah Jambi. Gubernur Jambi, Al Haris, mengapresiasi Bank Indonesia Jambi atas upaya promosi wisata Candi Muaro Jambi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi. Pada kesempatan yang sama Pj Bupati Muaro Jambi, menyampaikan bahwa Kenduri Budaya 2023 mempermudah langkah dalam memperkenalkan destinasi wisata dan budaya masyarakat Muaro Jambi kepada khalayak luas, memotivasi pelaku pariwisata, dan generasi muda untuk terus menggali kekayaan budaya yang ada di Bumi Sailun Salimbai.



Gambar 4.3. Sambutan Gubernur Jambi



Gambar 4.4. Gubernur Jambi, unsur Forkopimda, dan Pimpinan Instansi Vertikal menghadiri Kenduri Budaya 2023



Gambar 4.5. Fashion Show karya desainer lokal Jambi

Kegiatan Kenduri Budaya 2023 tersebut turut dimeriahkan dengan adanya *fashion show* yang menampilkan karya terbaik desainer lokal Jambi yang menampilkan kreasi pakaian menggunakan kain batik Jambi sebagai bentuk dukungan dalam mendorong promosi wastra Jambi.



Gambar 4.6. Fashion Show karya desainer lokal Jambi

Ke depan, berbagai aspek dalam pengembangan pariwisata akan terus diterapkan sesuai dengan prinsip 3A dan 2P yaitu *Accessibility* (Aksesibilitas), *Attractions* (Daya Tarik), *Activities* (Aktivitas), *Promotion* (Promosi), dan *People* (Masyarakat), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Aksesibilitas** yaitu bagaimana destinasi wisata dapat menciptakan lingkungan yang ramah wisatawan sehingga dapat dinikmati dari berbagai lapisan masyarakat.
- b. **Daya tarik** adalah hal yang menjadikan minat para wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata. Salah satu aset berharga yang dimiliki oleh destinasi wisata adalah warisan bersejarah, seperti Candi Muaro Jambi. Selain daya tarik utama ini, peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi magnet bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Mereka menawarkan beragam produk cinderamata dan hidangan khas yang dapat memikat perasaan para pengunjung.

- c. **Aktivitas** di destinasi pariwisata melibatkan berbagai kegiatan yang memungkinkan pengunjung untuk menggali dan mengeksplorasi tempat wisata tersebut. Ini mencakup peluang untuk memahami sejarah, menikmati kuliner lokal, dan terlibat dalam beragam kegiatan positif.
- d. Pada aspek **promosi**, transformasi dapat ditempuh melalui promosi intensif melalui media *digital*, *online travel agent*, ataupun peran *influencer* yang menjadi sangat vital di era *society 5.0*
- e. Masyarakat di sekitar destinasi wisata, yang juga dikenal sebagai "**People**" memegang peran penting dalam seluruh proses pengembangan dan pengelolaan tempat wisata. Dengan partisipasi mereka yang kuat, mulai dari tahap pengembangan hingga pengelolaan, kita dapat memastikan bahwa mereka juga dapat merasakan manfaat dari hadirnya destinasi wisata tersebut.

Bank Indonesia Jambi berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam memajukan sektor pariwisata di Provinsi Jambi, khususnya Kawasan Wisata Candi Muara Jambi, melalui inisiatif digitalisasi transaksi pembayaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti penggunaan QRIS di wilayah wisata, peningkatan kualitas SDM melalui *coaching* dan *boothcamp* serta mendukung peningkatan fasilitas melalui penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).



Gambar 4.6. Penyerahan QRIS untuk transaksi di PADUKA



Gambar 4.7. Penyerahan bantuan Pogram Sosial Bank Indonesia

Ke depan, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik dan erat antara Bank Indonesia dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Provinsi Jambi serta juga melibatkan dinas-dinas terkait untuk bisa saling bersinergi bersama memajukan kawasan wisata Candi Muara Jambi guna mendorong ekonomi masyarakat sekitar dan menarik kunjungan wisatawan yang lebih besar.

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



## BAB VI

# KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

---

Berlanjutnya pertumbuhan positif kinerja ekonomi Provinsi Jambi di Triwulan IV 2023 memberikan dampak pada perbaikan serapan tenaga kerja di tengah peningkatan aktivitas produksi perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja ekonomi daerah turut mendorong perbaikan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani. Meskipun demikian, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi terpantau menunjukkan peningkatan.



**Data posisi Agustus 2023 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja<sup>5</sup> di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 1,80 juta orang atau tumbuh 0,25% dibandingkan Agustus 2022.** Peningkatan jumlah penduduk bekerja tersebut disertai dengan angka pengangguran yang tumbuh terkontraksi sebesar 1,02% (yoy) atau turun sebanyak 0,88 ribu orang atau menjadi 85,80 ribu orang. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2022 yang tercatat sebanyak 86,69 ribu orang. Berdasarkan penurunan jumlah pengangguran tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,53% pada Agustus 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 4,59%.

Sementara itu, dari sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan pada Maret 2023 menunjukkan penurunan. Hal tersebut tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin yang turun sebesar 3,14 ribu orang dibandingkan dengan September 2022. Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokan penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 2,34% (yoy) menjadi sebesar Rp599.588 per kapita per bulan.

## 6.1 KETENAGAKERJAAN DAERAH

Indikator ketenagakerjaan pada Agustus 2023 menunjukkan peningkatan potensi pasokan (*supply*) tenaga kerja. **Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 0,19% (yoy) dari 1.885 ribu orang pada Agustus 2022 menjadi 1.888 ribu orang pada Agustus 2023.** Peningkatan pasokan tenaga kerja tersebut turut disertai dengan peningkatan serapan

tenaga kerja yang lebih tinggi yang tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,75% atau lebih tinggi dari Agustus 2022 yaitu 67,84%. (TABEL 6.1).

Selanjutnya, sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 4,43 ribu orang atau meningkat 0,25% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan di angka 85,80 ribu orang pada Agustus 2023, dari sebelumnya 86,69 ribu orang pada Agustus 2022. Penurunan jumlah pengangguran tersebut berimplikasi pada penurunan TPT Agustus 2023 menjadi 4,53%, atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2022 sebesar 4,59%.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, TPT tertinggi terjadi pada penduduk yang berpendidikan terakhir dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,05%. Sementara itu, TPT terendah terjadi pada penduduk yang berpendidikan terakhir dari Sekolah Dasar (SD) sebesar 2,42% dari total penduduk yang menganggur. Meskipun demikian, TPT tetap mengalami perbaikan dengan peningkatan aspek ketenagakerjaan terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2023 dan peningkatan aktivitas ekonomi serta ekspansi yang dilakukan pelaku usaha yang menopang penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi.

Adapun kondisi tenaga kerja di Provinsi Jambi berdasarkan status pekerjaan belum mengalami perubahan signifikan. Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2023 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal dengan pangsa sebesar 59,73%.

<sup>5</sup> Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut

harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan kondisi pekerja yang sebagian besar berpendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Dasar ke bawah dengan pangsa sebesar 35,67% terhadap total penduduk yang bekerja. Meskipun demikian, Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2023 tercatat sebesar 1,08 juta atau terkontraksi sebesar 0,17% (yoy) dibanding Agustus 2022. Di sisi lain, perkembangan jumlah pekerja formal meningkat sebesar 0,88% (yoy), dari 719 ribu orang pada Agustus 2022 menjadi 726 ribu orang pada Agustus 2023 (TABEL 6.2).

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU)-nya, peningkatan jumlah tenaga kerja terutama dialami oleh LU administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (30,52%, yoy), LU aktivitas kesehatan & kegiatan sosial, dan aktivitas jasa lainnya (13,88%, yoy), LU informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, dan aktivitas profesional dan perusahaan

(9,59%), LU penyediaan akomodasi dan makan minum (7,47%, yoy), serta LU perdagangan besar dan eceran (5,43%, yoy). Berdasarkan pangasanya, sejalan dengan LU unggulan di Provinsi Jambi, mayoritas tenaga kerja diserap oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa sebesar 45,19%.

Selanjutnya, pekerja dengan latar belakang pendidikan menengah ke atas dan universitas terpantau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Agustus 2023, jumlah pekerja dengan latar belakang pendidikan SMA sebanyak 435 ribu orang atau meningkat 2,55% (yoy). Sementara itu, jumlah pekerja dengan latar belakang pendidikan universitas sebanyak 200 ribu orang atau meningkat sebesar 14,82% (yoy). Hal tersebut mencerminkan adanya perbaikan kualitas pekerja di Provinsi Jambi dari waktu ke waktu. (TABEL 6.3).

**Tabel 6.1 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (ribu orang)**

JENIS KEGIATAN UTAMA	2021		2022		2023	
	FEB	AGU	FEB	AGU	FEB	AGU
<b>ANGKATAN KERJA (RIBU JIWA)</b>	<b>1,832</b>	<b>1,841</b>	<b>1,849</b>	<b>1,885</b>	<b>1,852</b>	<b>1,888</b>
<b>BEKERJA</b>	<b>1,745</b>	<b>1,747</b>	<b>1,762</b>	<b>1,798</b>	<b>1,769</b>	<b>1,802</b>
PEKERJA PENUH	1,115	1,004	1,016	1,109	957	1,069
PEKERJA TIDAK PENUH	630	743	745	686	811	733
SETENGAH PENGANGGURAN	156	170	134	134	155	167
PARUH WAKTU	474	572	611	552	656	566
PENGANGGURAN	87	94	87	86.69	83	85.80
<b>TINGKAT PARTISIPASI ANKATAN KERJA (%)</b>	<b>67.30</b>	<b>67.17</b>	<b>68.86</b>	<b>67.84</b>	<b>67.88</b>	<b>68.75</b>
<b>TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)</b>	<b>4.76</b>	<b>5.09</b>	<b>4.70</b>	<b>4.59</b>	<b>4.50</b>	<b>4.53</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 6.2 Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang)**

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2021		2022		2023	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
<b>A PEKERJA FORMAL</b>						
1. BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	78	76	79	91	97	90
2. BURUH / KARYAWAN	572	588	607	629	609	636
<b>TOTAL PEKERJA FORMAL</b>	<b>650</b>	<b>664</b>	<b>686</b>	<b>719</b>	<b>705</b>	<b>726</b>
<b>B PEKERJA INFORMAL</b>						
1. BERUSAHA SENDIRI	343	380	347	441	360	455
2. BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	310	255	300	234	281	229
3. PEKERJA BEBAS	187	190	170	146	143	153
4. PEKERJA KELUARGA / TAK DIBAYAR	260	258	259	257	279	239
<b>TOTAL PEKERJA INFORMAL</b>	<b>1,100</b>	<b>1,083</b>	<b>1,075</b>	<b>1,078</b>	<b>1,063</b>	<b>1,076</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,745</b>	<b>1,747</b>	<b>1,762</b>	<b>1,798</b>	<b>1,769</b>	<b>1,802</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Secara sektoral, struktur lapangan kerja di Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap 814,40 ribu orang tenaga kerja atau 45,19% dari total penduduk yang bekerja. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian Provinsi Jambi, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pangsa terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan IV 2023. Meskipun demikian, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Agustus 2023 tersebut tumbuh terkontraksi sebesar 5,55% (yoy) sejalan dengan normalisasi harga komoditas pertanian unggulan Jambi, antara lain kelapa sawit, yang masih dalam tren harga tinggi di tahun lalu. Selain itu, berlanjutnya harga jual karet alam yang cenderung rendah diindikasikan menjadi salah satu pendorong beralihnya tenaga kerja ke LU lainnya.

Meskipun demikian, sektor Pertambangan dan Penggalian yang memiliki pangsa cukup besar di struktur ekonomi (15,22% pada triwulan III 2023) tercatat menyerap 60,35 ribu tenaga kerja baru di Provinsi Jambi atau tumbuh sebesar 6,55% dibandingkan Agustus 2022. Hal tersebut sejalan dengan kinerja sektor ini yang tumbuh positif pada triwulan III 2023 sebesar 0,68% (yoy) sejalan dengan peningkatan produksi batubara seiring dengan beroperasinya 14 lokasi tambang baru yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, adanya pemenuhan kebutuhan pasokan domestik, antara lain untuk memenuhi permintaan batubara dari PLTU Pulau Baai Bengkulu yang turut mendorong peningkatan kinerja sektor ini pada triwulan IV 2023.

Selanjutnya, LU perdagangan, LU penyediaan akomodasi dan makan minum, dan LU Pengangkutan dan Pergudangan, juga menyerap lebih banyak tenaga kerja pada Agustus 2023 dengan peningkatan tenaga kerja masing-masing sebesar 4,53% (yoy), 7,47% (yoy), dan 1,18% (yoy) (TABEL 6.4). Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja sebagian besar sektor masih dalam tren

peningkatan sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Jambi.

Tabel 6.3 Pekerja Berdasarkan Status Pendidikan (ribu orang)

NO	STATUS PENDIDIKAN	2022		2023	
		FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
1	SD KE BAWAH	674	691	671	643
2	SMP	335	340	325	329
3	SMA	396	424	411	435
4	SMK	141	132	146	154
5	DIPLOMA I/II/III	49	37	39	41
6	UNIVERSITAS	165	174	175	200
		<b>1,762</b>	<b>1,798</b>	<b>1,769</b>	<b>1,802</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.4 Pekerja berdasarkan Lapangan Usaha

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	2022		2023	
		FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	755.31	862.28	700.16	814.40
2	Pertambangan dan Penggalian	60.37	56.64	95.49	60.35
3	Industri Pengolahan	119.89	94.42	104.32	85.25
4	Pengadaan LGA, Treatment Air, Konstruksi, & Real Estate	76.30	93.08	98.36	94.81
5	Perdagangan Besar dan Eceran	301.70	260.55	289.88	272.34
6	Pengangkutan dan Pergudangan	65.17	62.67	68.38	63.41
7	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.43	90.86	79.66	97.65
8	Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan Aktivitas Profesional dan Perusahaan	31.00	40.88	58.22	44.80
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	81.37	74.38	76.85	97.08
10	Pendidikan	99.49	91.17	96.54	91.43
11	Aktivitas Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan Aktivitas Jasa Lainnya	76.66	70.90	100.80	80.74
	<b>TOTAL</b>	<b>1,761.66</b>	<b>1,797.83</b>	<b>1,768.65</b>	<b>1,802.26</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

### 6.1.1 Prospek Ketenagakerjaan

Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, **tingkat penggunaan tenaga kerja pada triwulan laporan masih tumbuh positif yang tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 4,50%**. Angka tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,80%. Berdasarkan lapangan usahanya, peningkatan penggunaan tenaga kerja utamanya terjadi pada LU konstruksi (SBT 1,96%), perdagangan besar dan eceran (SBT 1,29%), dan industri pengolahan (SBT 0,95%).

Pada triwulan I 2024, pelaku usaha memprakirakan adanya pengurangan penggunaan tenaga kerja. Hal

tersebut tercermin dari prakiraan nilai SBT yang tercatat terkontraksi sebesar 0,63%. Penurunan penggunaan tenaga kerja tersebut diperkirakan terjadi pada LU konstruksi (SBT -1,96 %) yang disebabkan oleh estimasi pengusaha sehubungan dengan tren penurunan aktivitas konstruksi pada Bulan Puasa/Ramadhan (GRAFIK 6.1).

## 6.2 KESEJAHTERAAN

### 6.2.1 Kemiskinan

**Penduduk miskin<sup>6</sup> Provinsi Jambi pada Maret 2023 tercatat sebanyak 280,68 ribu orang atau turun 3,14 ribu orang dibandingkan September 2022 dan turun 1,31 ribu orang dibandingkan Maret 2022.** Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 7,58% atau lebih rendah dibandingkan dengan September 2022 dan Maret 2022 yang masing-masing tercatat 7,70% dan 7,62%. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada Maret 2023, penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 10,19%, atau lebih rendah dibandingkan 10,48% pada September 2022. Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan turun dari 6,32% pada September 2022 menjadi 6,28% pada Maret 2023 (TABEL 6.5). Penurunan angka penduduk miskin tersebut salah satunya didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang kondusif dan melandainya tingkat inflasi di wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut juga didukung dengan Lapangan Usaha (LU) utama di Provinsi Jambi yang tumbuh terakselerasi pada triwulan I 2023, yaitu LU pertambangan dan penggalian sebesar 9,51% (yoy).

Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokan penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp599.688 per kapita per bulan, atau naik sebesar 2,34% dibandingkan dengan September 2022 (TABEL 6.6). Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2022, garis kemiskinan di Provinsi Jambi terpantau naik sebesar 9,86% dari sebelumnya Rp545.870 per kapita per bulan. Peranan

komoditi makanan terhadap pembentukan garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp452.478 per kapita per bulan (75,45%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp147.210 per kapita per bulan (24,55%). Pada Maret 2023, jenis komoditas makanan yang signifikan memengaruhi nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan relatif sama yaitu beras (16,61% di perkotaan dan 20,06% di perdesaan), rokok kretek filter (15,10% di perkotaan dan 17,61% di perdesaan), daging ayam ras (5,39% di perkotaan dan 3,77% di perdesaan), telur ayam ras (4,00% di perkotaan dan 3,20% di perdesaan), dan cabai merah (3,93% di perkotaan dan 4,00% di perdesaan). Sementara itu, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (6,35% di perkotaan dan 7,07% di perdesaan), bensin (4,66% di perkotaan dan 5,36% di perdesaan), listrik (3,33% di perkotaan dan 2,36% di perdesaan), Pendidikan (1,64% di perkotaan dan 1,15% di perdesaan), dan perlengkapan mandi (1,09% di perkotaan dan 0,96% di perdesaan).

Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan mencapai 75,45%, sedangkan di perdesaan sebesar 75,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya peran pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian harga komoditas pangan terutama beras, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras yang memiliki kontribusi terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Di samping angka kemiskinan, terdapat beberapa indikator lain yang digunakan dalam analisis kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan pada prinsipnya menunjukkan seberapa jauh selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka P1 yang semakin mendekati 0 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara, P2 memberikan gambaran mengenai seberapa jauh jarak

<sup>6</sup> Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

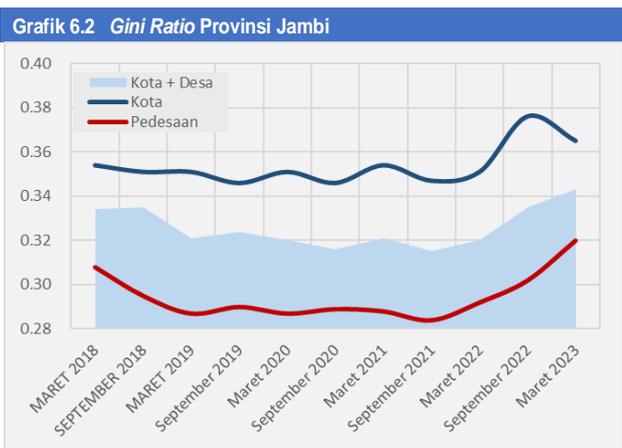
pengeluaran orang paling miskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di wilayah tersebut. Angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Pada Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan yaitu 1,195 lebih tinggi dibandingkan 1,193 pada September 2022. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,260. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Provinsi Jambi semakin menjauhi Garis Kemiskinan dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terpantau meningkat dari 0,237 pada September 2022, menjadi 0,287 pada Maret 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar di wilayah Provinsi Jambi (TABEL 6.7). Secara spasial, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Pada Maret 2023, nilai P1 untuk perkotaan sebesar 1,616, sementara di pedesaan lebih rendah yaitu 0,985. Sementara, nilai P2 untuk perkotaan sebesar 0,368 dan di pedesaan sebesar 0,246.

Selain angka kemiskinan serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, isu kemiskinan juga dapat dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Gini Ratio<sup>7</sup>. Pada Maret 2023, gini ratio Provinsi Jambi naik 0,008 poin dari 0,335 pada September 2022 menjadi 0,343 pada Maret 2023. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jambi pada Maret 2023 juga terpantau meningkat sebesar 0,015 poin dibandingkan Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,320. Hal tersebut mengindikasikan kondisi ketimpangan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Meskipun demikian, angka gini ratio tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 0,388. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Provinsi Jambi relatif lebih baik dibandingkan nasional (TABEL 6.8).

Berdasarkan wilayahnya, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,365, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,376. Namun demikian, angka tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 0,351. Sementara itu, Gini Ratio di daerah pedesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,320, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,302 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,292.

Berdasarkan distribusinya<sup>8</sup>, pada Maret 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah sebesar 20,60%, atau turun dibandingkan September 2022 dan Maret 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 20,87% dan 21,14% (GRAFIK 6.2). Hal ini menunjukkan Provinsi Jambi masih berada pada kategori ketimpangan rendah.



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

<sup>7</sup> Gini ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

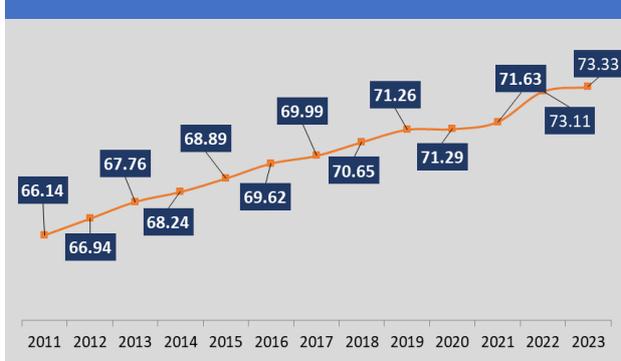
<sup>8</sup> Berdasarkan Bank Dunia, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya

<12%; ketimpangan sedang jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya 12%-17%; ketimpangan rendah jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya >17%.

Salah satu upaya dalam menekan tingkat ketimpangan adalah mengupayakan agar penduduk mendapatkan kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar dan mengembangkan potensinya, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, IPM Provinsi Jambi tercatat tumbuh 0,71% (yoy) menjadi 72,14 dibandingkan 2021 sebesar 71,63. Perbaikan IPM didorong oleh peningkatan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga aspek tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) komponen indeks pembentuk IPM yaitu Indeks Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Indeks Pengeluaran Per Kapita yang seluruhnya menunjukkan peningkatan. Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2013–2022. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Jambi rata-rata tumbuh sebesar 0,75% per tahun dan diperkirakan terus tumbuh sesuai dengan trennya.

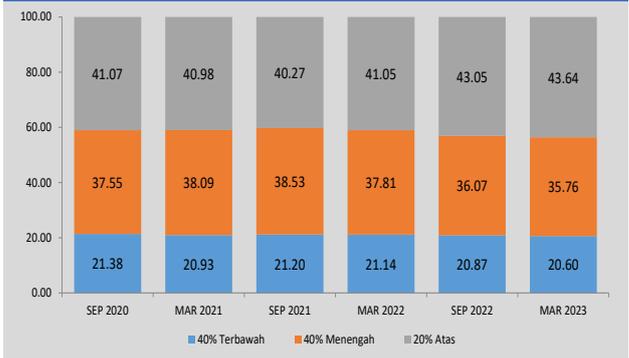
Peningkatan IPM Provinsi Jambi pada tahun 2022 mampu menjaga status pembangunan manusia Provinsi Jambi di level “tinggi”<sup>9</sup> (TABEL 6.9) dan (GRAFIK 6.3).

**Grafik 6.4** Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Grafik 6.3** Distribusi Pengeluaran Penduduk



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

## 6.2.2 Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2023 terpantau lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP)<sup>10</sup> tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa petani mengalami surplus di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data triwulan IV 2023 menunjukkan rerata NTP Provinsi Jambi sebesar 138,60 atau naik 0,31 poin dibanding rerata triwulan IV 2022 yang sebesar 138,29 (GRAFIK 6.4).

**Grafik 6.5** Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Perbaikan NTP disebabkan oleh peningkatan indeks yang diterima petani naik lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks yang dibayar petani. Rerata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada triwulan IV 2023 sebesar 163,57 atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 156,67. Di sisi lain, Indeks yang Dibayar Petani (Ib) pada triwulan IV 2023 sebesar 118,01, meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tercatat 113,29.

<sup>9</sup> Sangat tinggi jika IPM ≥ 80; tinggi jika 70 ≤ IPM < 80; sedang jika 60 ≤ IPM < 70; rendah jika IPM < 60

<sup>10</sup> Sejak Januari 2020, data NTP telah menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun Dasar 2018 dalam perhitungan data NTP

Berdasarkan kelompoknya, peningkatan NTP terjadi subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Rerata NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat pada triwulan IV 2023 tercatat paling tinggi yaitu 147,33, meskipun nilai ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 148,34. Selanjutnya, rerata NTP subsektor perikanan tercatat sebesar 111,84, meningkat dibandingkan triwulan IV 2022

sebesar 109,42. Lebih lanjut, rerata NTP subsektor hortikultura triwulan IV 2023 terpantau meningkat dengan rerata sebesar 119,39 dibanding triwulan IV 2022 sebesar 104,70.

Selain itu, rerata NTP subsektor tanaman pangan tercatat sebesar 113,17, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 103,17. Di sisi lain, subsektor peternakan terpantau berkontraksi sebesar 6,17% (yoy) dan berada di bawah 100 dengan rerata NTP sebesar 91,39 pada triwulan IV 2023.

**Tabel 6.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi**

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)				
	September 2021	Maret 2022	September 2022	Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022	Maret 2023
Kota	10.50	10.51	10.48	137.24	126.10	127.34	127.80	125.30
Pedesaan	6.28	6.19	6.32	156.61	153.75	152.03	156.03	155.39
<b>Kota + Desa</b>	<b>7.67</b>	<b>7.62</b>	<b>7.70</b>	<b>293.85</b>	<b>279.85</b>	<b>279.37</b>	<b>283.82</b>	<b>280.68</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 6.6 Garis Kemiskinan Provinsi Jambi**

Wilayah	Garis Kemiskinan											
	Maret 2022				September 2022				Maret 2023			
	Makanan	Non Makanan	Total	% GK Makanan	Makanan	Non Makanan	Total	% GK Makanan	Makanan	Non Makanan	Total	% GK Makanan
Kota	478,149	157,559	635,708	75.22	517,739	166,816	684,555	75.63	527,501	171,622	699,123	75.45
Pedesaan	380,967	122,845	503,812	75.62	410,425	130,842	541,267	75.83	417,580	135,140	552,720	75.55
<b>Kota + Desa</b>	<b>411,537</b>	<b>134,333</b>	<b>545,870</b>	<b>75.39</b>	<b>443,292</b>	<b>142,658</b>	<b>585,950</b>	<b>75.65</b>	<b>452,478</b>	<b>147,210</b>	<b>599,688</b>	<b>75.45</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi**

\	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan									
	Maret 2021		September 2021		Maret 2022		September 2022		Maret 2023	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
Kota	2.197	0.576	1.805	0.380	1.673	0.385	1.739	0.393	1.616	0.368
Desa	0.851	0.169	0.736	0.154	0.928	0.199	0.923	0.160	0.985	0.246
<b>Kota + Desa</b>	<b>1.293</b>	<b>0.302</b>	<b>1.088</b>	<b>0.228</b>	<b>1.174</b>	<b>0.260</b>	<b>1.193</b>	<b>0.237</b>	<b>1.195</b>	<b>0.287</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 6.8 Gini Ratio Provinsi Jambi**

Wilayah	Gini Ratio							
	September 2019	Maret 2020	September 2020	Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022	Maret 2023
Kota	0.346	0.351	0.346	0.354	0.347	0.351	0.376	0.365
Pedesaan	0.290	0.287	0.289	0.288	0.284	0.292	0.302	0.320
<b>Kota + Desa</b>	<b>0.324</b>	<b>0.320</b>	<b>0.316</b>	<b>0.321</b>	<b>0.315</b>	<b>0.320</b>	<b>0.335</b>	<b>0.343</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

**Tabel 6.9 Indeks Pembangunan Manusia menurut komponen**

KOMPONEN	TAHUN										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	70.35	70.43	70.56	70.71	70.76	70.89	71.06	73.33	73.38	73.61	73.84
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.17	12.38	12.57	12.72	12.85	12.90	12.93	12.98	13.04	13.05	13.13
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.80	7.92	7.96	8.07	8.15	8.23	8.45	8.55	8.60	8.68	8.81
Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah)	9,066	9,141	9,446	9,795	9,880	10,357	10,592	10,392	10,588	10,871	11,160
<b>IPM</b>	<b>67.76</b>	<b>68.24</b>	<b>68.89</b>	<b>69.62</b>	<b>69.99</b>	<b>70.65</b>	<b>71.26</b>	<b>72.29</b>	<b>72.62</b>	<b>73.11</b>	<b>73.33</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



## BAB VII

# PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan tetap kuat pada tahun 2024, yaitu tetap tumbuh pada rentang 4,50%-5,00%, ditopang terjaganya permintaan domestik dan perbaikan lapangan usaha (LU) utama yaitu LU konstruksi, pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.



**Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi.** Ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 3,0% pada 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya masing-masing sebesar 3,0% dan 2,8%. Perbaikan terutama ditopang lebih kuatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India sejalan dengan konsumsi dan investasi yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut juga dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Perkembangan ini mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia masih tinggi. Suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) diperkirakan baru mulai menurun pada semester II 2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi. *Yield US Treasury* kembali meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut menyebabkan menguatnya dolar AS secara global, menahan berlanjutnya aliran masuk modal asing, dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara emerging market. Kondisi ini memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia.

Sejalan dengan dinamika perkembangan global dan nasional, **perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan tetap kuat pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,50% sampai dengan 5,00%.** Dari sisi domestik, prakiraan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya seiring fenomena El Nino pada sepanjang tahun 2023 yang berdampak pada pergeseran periode tanam-panen komoditas tanaman pangan dan banjir di awal 2024 yang menyebabkan gangguan kelancaran distribusi komoditas unggulan Provinsi Jambi. Namun hal tersebut masih ditopang terjaganya permintaan domestik seiring terjaganya daya beli di tengah tekanan inflasi yang menurun dan diperkirakan kembali pada kisaran sasaran  $2.5\% \pm 1\%$  di sisa tahun 2024. Lebih lanjut meningkatnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja positif percepatan penyelesaian Pembangunan Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur yang lebih baik dari prakiraan awal.

Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan 1 tahun 2024 diperkirakan stabil. Berlanjutnya PSN JTTS Bayunglencir-Tempino seksi 3 dan 4, dan mulainya pembangunan JTTS Jambi-Rengat mendorong kinerja LU Konstruksi yang lebih tinggi serta perbaikan ekonomi global diperkirakan meningkatkan permintaan. Kinerja LU Perdagangan dan LU Industri yang masih optimis seiring dengan memasuki bulan Ramadhan serta peningkatan permintaan menjelang HBKN Idul Fitri. LU Pertanian diperkirakan tumbuh melambat, bias bawah terhadap proyeksi, hal tersebut dipengaruhi belum pulihnya curah hujan yang diperkirakan bertahan sampai April 2024 serta banjir yang melanda di beberapa wilayah berdampak terhadap panen raya. Menurut data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, luas lahan padi di Jambi yang terdampak banjir seluas 7.552,80 Ha dan puso atau gagal panen seluas 2.707,33 Ha, untuk luas lahan jagung yang terdampak seluas 33,50 Ha. Luas lahan cabai yang terdampak banjir seluas 51,50 Ha, terkena banjir seluas 7,20 Ha dan puso atau gagal panen seluas 4,90 Ha.

Namun demikian, pelarangan angkutan batubara jalur darat pada TW 1 2024 diperkirakan menahan kinerja LU Pertambangan. Pemberlakuan kebijakan daerah melalui Instruksi Gubernur Provinsi Jambi No.1/INGUB/DISHUB/2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara mengenai larangan operasional angkutan batu bara melalui jalur darat nasional telah menimbulkan dampak yang beragam terhadap perekonomian di Provinsi Jambi. Dari satu sisi, kebijakan ini memiliki dampak positif, khususnya dalam memperlancar distribusi logistik, utamanya untuk komoditas pangan. Hal tersebut berkontribusi pada efisiensi waktu dan biaya dalam distribusi barang-barang kebutuhan pokok, sehingga dapat membantu menstabilkan harga pangan di pasar lokal dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang terjangkau. Di sisi lain, kebijakan dimaksud juga membawa dampak negatif terhadap sektor lain dalam struktur perekonomian Jambi, khususnya bagi industri pertambangan batu bara. Batu bara merupakan salah satu komoditas unggulan dan utama bagi Provinsi Jambi. Dengan dibatasi jalur distribusi melalui darat, perusahaan-perusahaan batu bara menghadapi tantangan dalam mengangkut produk mereka ke pelabuhan Talang Duku Jambi. Dampak dari kebijakan dimaksud juga bisa mempengaruhi investasi dan kepercayaan investor terhadap bisnis pertambangan di Jambi. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengupayakan mitigasi agar meminimalisir dampak negatif yang berkelanjutan

yaitu melalui percepatan penyelesaian pembangunan jalur khusus batubara (Kab. Sarolangun - Kab. Batanghari - Kab. Muaro Jambi), himbauan pengangkutan batubara via sungai dan rencana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada *driver* batubara yang terdampak melalui anggaran BTT Provinsi Jambi 2024.

Beberapa kebijakan Pemerintah diperkirakan akan menopang terjaganya konsumsi domestik di Jambi melalui beberapa program yaitu pemberian sembako kepada 334.891 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 751.152 KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 453.608 KPM, Prakerja kepada 14.383 pekerja, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 44.133 KPM / 1.397 desa. Hal tersebut diharapkan dapat menjaga kinerja konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan sepanjang tahun 2024.

Sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi domestik, kegiatan investasi di Provinsi Jambi diperkirakan melanjutkan kinerja positif didukung berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur di Provinsi Jambi, antara lain (1) Infrastruktur Konektivitas (penyelesaian jalan tol Palembang-Jambi seksi 3 Bayung Lencir-Tempino sepanjang 15,4 km untuk jalan utama dan 1,8 km untuk jalan akses, jalan strategis di Kab. Tebo, Batanghari, Sarolangun dan Muaro Jambi sepanjang 27.3 km dan perluasan bandara Depati Parbo di Kota Sungai Penuh); (2) Infrastruktur Pendidikan (penyelesaian pembangunan 9 Gedung Universitas Jambi, pembagunan 2 sekolah dan renovasi 38 unit sekolah); (3) Infrastruktur Kesehatan (sanitasi pembangunan pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan SPAM untuk 6.220 KK); (4) pemugaran Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi dan pengembangan Wisata Alam - Konservasi); (5) Infrastruktur Irigasi dan Pengendalian Bencana (Daerah irigasi Batang Asai sepanjang 3,6 km dan pengendali banjir Sungai Batanghari – Kab. Tebo sepanjang 500 m). Selain itu, kinerja positif investasi sejalan dengan berlanjutnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, air dan gas.

**Di sisi eksternal, ketidakpastian kinerja ekspor barang dan jasa diperkirakan masih berlanjut** sejalan dengan risiko resesi yang membayangi perekonomian global yang berpotensi mengurangi aktivitas perdagangan dunia, terutama transaksi menuju negara maju. Harga komoditas global yang diperkirakan belum dapat kembali ke level harga

tahun 2022 berisiko berdampak pada menurunnya neraca perdagangan Provinsi Jambi. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia serta dapat berisiko menahan perdagangan sepanjang tahun 2024.

Sementara itu, **pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 diperkirakan tumbuh terakselerasi pada rentang 4,50% sampai dengan 5,00%**. Hal ini dengan mempertimbangkan stimulus kebijakan fiskal Tiongkok yang terbatas mulai berdampak di tahun 2024 disertai dengan rilis data pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik dari prakiraan, yaitu rilis pertumbuhan ekonomi yang kuat dan rilis inflasi yang lebih rendah dibandingkan prakiraan.

Hal ini juga didukung oleh **stance kebijakan moneter Bank Indonesia untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 2,5%±1% di tahun 2024**. Lebih lanjut, sinergi kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi yang semakin erat dalam menunjang pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi diperkirakan akan memberikan dampak positif pada pengendalian inflasi di Provinsi Jambi.

## 7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

### 7.1.1 Prospek Permintaan

Kebijakan Pemerintah yang mendorong percepatan belanja transfer guna mengendalikan inflasi di daerah diyakini dapat mendorong pertumbuhan permintaan domestik, terutama pada komponen konsumsi rumah tangga. **Konsumsi rumah tangga diperkirakan termoderasi dari tahun sebelumnya**. Ketidakpastian global yang diperkirakan tetap tinggi serta ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang dibayangi potensi resesi, berisiko meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan aktivitas konsumsi. Meski demikian, masih berlanjutnya berbagai insentif pemerintah di tahun 2024, seperti pemberian sembako, BPNT, PKH, Prakerja, BLT dan kenaikan Upah Minimum Provinsi Jambi tahun 2024 diperkirakan dapat menjaga daya beli masyarakat.

**Permintaan domestik untuk minyak kelapa sawit (CPO) juga diprediksi tetap kuat** seiring dengan berlanjutnya upaya Pemerintah untuk memastikan kecukupan pasokan

minyak goreng domestik melalui pengetatan rasio ekspor CPO dari 1:6 menjadi 1:4 yang sudah berlaku sejak 1 Mei 2023, permintaan yang meningkat menjelang Ramadan dan implementasi program mandat B35 di 2024. Perkembangan harga tandan buah segar (TBS) yang lebih rendah dan penyesuaian pemberian insentif fiskal berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, di tengah risiko kenaikan harga pangan dan bahan bakar.

Sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, **konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan meningkat dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024.** Hal ini didorong oleh peningkatan anggaran belanja pemerintah dan realisasi belanja infrastruktur sebelum pergantian kepemimpinan Presiden RI. Selain itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah perlu didukung oleh kegiatan dan acara yang mendorong pertumbuhan sektor MICE. Prospek ekonomi yang lebih baik diperkirakan akan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan target penerimaan, seperti pajak terkait kendaraan bermotor dan sektor perhotelan dan restoran.

Di sisi lain, **implementasi sistem *online single submission* oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jambi diharapkan akan memberikan dampak positif dan mendukung iklim investasi di Provinsi Jambi.** Realisasi investasi yang sempat tertunda pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan akan dipercepat dan menjadi prioritas pada tahun 2023 dan 2024. Peluang investasi pada proyek-proyek strategis di Provinsi Jambi, berpotensi mendorong peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN. Lebih lanjut, berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Jambi, antara lain Stadion Pijoan, Islamic Center dan pembangunan *drainase* utama di Kota Jambi juga turut mendorong terjaganya kinerja investasi di Provinsi Jambi. Selain itu, keberlanjutan kebijakan B30 yang ditingkatkan menjadi B35 oleh Pemerintah berpotensi meningkatkan kapasitas dan investasi industri pengolahan di Provinsi Jambi.

Dalam konteks eksternal, diperkirakan bahwa **kinerja ekspor barang dan jasa akan mengalami pertumbuhan positif**, meskipun terbatas dibayangi risiko pelemahan ekonomi global. Beberapa sektor utama yang menjadi komoditas kebutuhan global, seperti batubara dan minyak nabati, diharapkan tetap menjadi penopang ekspor. Gangguan rantai pasok seiring mengeringnya Kanal Panama

diharapkan menjadi berkah yang tersembunyi dan mendorong peningkatan harga komoditas unggulan Provinsi Jambi.

Meskipun optimis, **secara umum diperkirakan permintaan eksternal pada tahun 2024 belum dapat pulih sepenuhnya** dipengaruhi berlanjutnya ketidakpastian dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, sinergi dan inovasi untuk mendorong akselerasi permintaan domestik akan menjadi kunci untuk tetap bertahan dan bangkit di tengah gejala ekonomi global. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendorong terus berlanjutnya perbaikan ekonomi Provinsi Jambi sepanjang tahun 2024.

### 7.1.2 Prospek Penawaran

**Secara sektoral, penguatan kinerja ekonomi Provinsi Jambi terutama ditopang oleh kinerja lapangan usaha (LU) utama yaitu LU konstruksi, pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.** Pertumbuhan yang terjadi di sektor-sektor ini memberikan dampak positif dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat. Kinerja yang kuat dalam sektor-sektor tersebut juga diprakirakan berdampak positif pada sektor perdagangan seiring terjaganya permintaan domestik Lebih lanjut, terjaganya permintaan baik dari domestik maupun global diperkirakan akan berdampak positif pada seluruh lapangan usaha.

**Kinerja impresif LU Konstruksi** yang kembali melanjutkan tren pertumbuhan positif didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta antara lain meliputi proyek pemerintah pusat terkait pengerjaan drainase utama dan preservasi jalan nasional, rehabilitasi SD, SMP dan Madrasah, dimulainya proyek pemerintah daerah terkait Pembangunan Stadion Pijoan dan *Islamic Center*, serta berlanjutnya proyek swasta pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro.

Kinerja LU Pertanian utamanya ditopang oleh perbaikan subsektor perkebunan seiring penguatan produktivitas kebun kelapa sawit paska *replanting* yang mulai memasuki usia produktif, masuknya masa panen dan bertambahnya jumlah tanaman sawit yang memasuki usia produktif. Lebih lanjut, curah hujan tinggi yang berlangsung sepanjang tahun 2023 diprakirakan masih memberikan dampak positif pada terjaganya produktivitas pada level tinggi sampai dengan tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, **LU Industri Pengolahan juga akan melanjutkan tren peningkatan.** Terjaganya permintaan eksternal terutama yang berasal dari negara mitra dagang diperkirakan mendorong pertumbuhan *output* LU Industri Pengolahan. Konflik geopolitik yang berkepanjangan berpotensi menahan kinerja LU Industri Pengolahan lebih tinggi karena terdapat potensi disrupsi rantai pasokan sehingga impor bahan modal akan terganggu. Dari sisi domestik, adanya rencana peningkatan volume biodiesel di tahun 2024 seiring dengan peningkatan kadar biodiesel dari B30 menjadi B35 diperkirakan akan memperkuat permintaan komoditas CPO domestik untuk mendukung implementasi B35.

**Kinerja LU Perdagangan tetap kuat ditopang daya beli masyarakat** meski mengalami moderasi dibandingkan tahun sebelumnya. Harga komoditas utama yang tidak setinggi tahun sebelumnya juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan luar negeri dan turut menahan kinerja LU Perdagangan. Meski demikian, tetap terjaganya permintaan komoditas utama di tengah berlanjutnya krisis geopolitik dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja LU Pertambangan dan Penggalan domestik juga diperkirakan akan menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 meskipun tumbuh melambat. Kebijakan *win-win solutions* dari pengusaha batu bara untuk mematuhi INGUB Provinsi Jambi terkait Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara serta beroperasinya jalan khusus angkutan batubara yang diperkirakan selesai di tahun 2024 berpotensi mendorong peningkatan produksi batubara yang menopang kinerja LU Pertambangan.

Prospek pertumbuhan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang menunjukkan optimisme pelaku usaha. Kegiatan dunia usaha pada triwulan I tahun 2024 diperkirakan oleh para pelaku usaha tetap akan mengalami pertumbuhan positif seiring berlanjutnya perbaikan ekonomi di tengah peningkatan mobilitas masyarakat serta faktor cuaca yang mendukung produksi komoditas utama daerah. Lebih lanjut, kinerja LU Pertambangan dan penggalan tahun 2024, khususnya komoditas batubara diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2023 didukung intensifnya angkutan batubara via sungai, rampungnya pengerjaan jalur alternatif

distribusi batubara tahap 1 serta implementasi larangan operasional batubara yang diperkirakan berkurang.

Selain itu, LU perdagangan, LU akomodasi makan minum, dan LU konstruksi yang berkaitan erat dengan konsumsi domestik baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah serta PMTDB diperkirakan akan tumbuh dan menjadi kunci kinerja perekonomian di tahun 2024. Namun demikian, mencermati perkembangan global dan domestik saat ini, terdapat beberapa risiko yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari proyeksi (*downside risk*) yaitu:

1. Dinamika perekonomian global yang dibayangi risiko stagflasi hingga resesi dapat mengganggu harga komoditas dan ratan pasok global.
2. Ketegangan geopolitik di antara negara-negara produsen energi di wilayah Eropa Timur dan Timur tengah berisiko mendorong kekurangan pasokan energi primer dan ketidakpastian pasar global, yang mendorong harga di pasar global berfluktuasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga energi primer di dalam negeri.
3. Risiko meningkatnya tekanan *imported inflation* seiring bertambahnya kebijakan restriksi pangan di berbagai negara menahan daya beli masyarakat.
4. Faktor struktural berkurangnya lahan tanam, khususnya lahan perkebunan karet yang berisiko berdampak pada penurunan produksi.

## 7.2 PROYEKSI INFLASI

**Dengan mencermati berbagai perkembangan indikator perekonomian terkini, laju inflasi pada tahun 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya didukung kegiatan sinergi dan inovasi pengendalian inflasi untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan strategis.** Sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional  $2.5\% \pm 1\%$  pada paruh pertama tahun 2024.

**Inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2024 diperkirakan menurun** didukung sinergi kebijakan lintas lembaga yang menunjang pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Lebih lanjut, melambatnya inflasi juga diperkirakan dipengaruhi

oleh berkurangnya dampak kebijakan penyesuaian harga BBM karena risiko minim gejolak harga minyak dunia karena permintaan minyak dunia pada 2024 cenderung melemah sejalan dengan tren perlambatan pertumbuhan global.

Namun demikian, meningkatnya permintaan domestik yang diiringi berlanjutnya ketidakpastian global berisiko mendorong laju inflasi komoditas primer di Provinsi Jambi. Tetap kuatnya permintaan domestik akan berdampak pada naiknya tekanan inflasi pangan (beras, daging ayam ras dan hortikultura), serta barang dan jasa pada kelompok transportasi, pakaian dan alas kaki, rekreasi, perumahan dan listrik, serta penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan bobot terbesar hasil SBH 2022.

Lebih lanjut, **terdapat beberapa risiko tekanan inflasi** yaitu 1) risiko *force majeure* bencana alam maupun perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan jalur distribusi pangan; 2) risiko struktural berkurangnya luas lahan pertanian secara berkepanjangan perlu diwaspadai karena berisiko menahan ketersediaan pasokan dan mendorong kelangkaan barang sehingga merambat pada peningkatan harga; 3) peningkatan permintaan domestik terhadap pangan strategis (beras dan pangan substitusi lainnya) secara signifikan (*pent-up demand*) sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung; 4) kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu yang tidak dapat dikelola optimal; 5) kenaikan harga pakan ternak yang berisiko mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras; 6) kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10% pada 1 Januari 2024 juga menahan perlambatan inflasi *administered price* lebih lanjut; dan 7) berlanjutnya kebijakan moneter yang agresif di berbagai negara perlu di waspadai karena berisiko memberikan tekanan pada nilai tukar yang juga berimbas pada *imported inflation*. Adapun, dengan mencermati hal-hal tersebut laju inflasi Provinsi Jambi pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun bias atas terhadap kisaran sasaran inflasi nasional yaitu sebesar  $2.5\% \pm 1\%$ .

### 7.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Bank Indonesia Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan sinergi pengendalian inflasi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

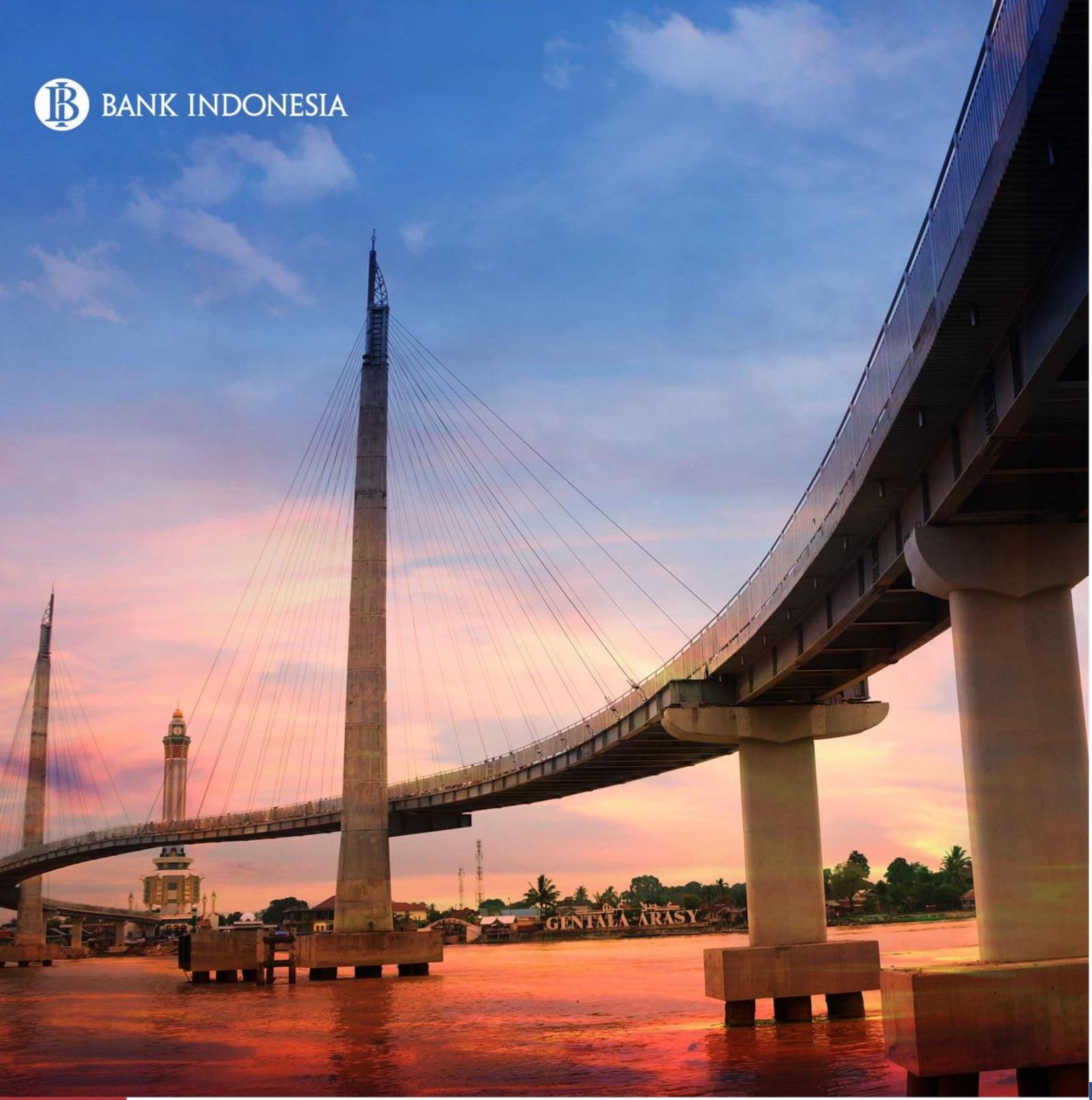
1. Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan *multiplier effect* terhadap pemulihan ekonomi.
2. Mendorong realisasi program peremajaan/*replanting* perkebunan sawit dan karet untuk mendorong produktivitas TBS dan karet petani yang merupakan komoditas unggulan daerah. Selain itu, melakukan upaya untuk mendorong pengembangan hilirisasi industri karet dan kelapa sawit yang terintegrasi meliputi industri inti dan penunjang lainnya melalui kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pengembangan.
3. Mendorong petani untuk melakukan diversifikasi usaha pertanian agar tidak hanya memiliki satu jenis usaha pertanian namun bervariasi, sehingga bisa lebih tahan terhadap fluktuasi harga *output*, misalnya berupa usaha perkebunan sawit yang terintegrasi dengan peternakan sapi.
4. Mendorong Pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan panen, mendorong ekspor, serta perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
5. Optimalisasi peluang ekspor batubara, TBS, dan karet di pasar global maupun pasar domestik seiring dengan penguatan harga komoditas dan peningkatan permintaan di pasar internasional serta domestik.
6. Mendorong pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau. Bank Indonesia akan mendukung dan memperkuat kolaborasi dan sinergi antar lembaga sehingga pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau di Jambi dapat semakin terakselerasi. Selain itu, perlu dilakukan inisiasi penyusunan *green economy index* Provinsi Jambi mengacu pada *green economy index* nasional yang telah selesai disusun oleh Bappenas pada Agustus 2022. Penguatan aspek regulasi dan optimalisasi anggaran disertai adanya kemudahan perizinan diharapkan dapat mengakselerasi lahirnya berbagai proyek berbasis hijau di Jambi.
7. Melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) kepada eksportir dalam penyelesaian transaksi bilateral untuk efisiensi biaya transaksi dan pengurangan ketergantungan terhadap USD.

8. Memfasilitasi dan mendorong upaya penyediaan jalur pengangkutan khusus komoditas batubara untuk menekan biaya operasional pelaku usaha dan memastikan kelancaran distribusi.
9. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi *go digital* dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
10. Mendorong peningkatan nilai tambah hasil tambang antara lain melalui hilirisasi pengolahan *coal bed methane* dan proses likuifikasi batubara sebagai alternatif pengganti gas alam cair (LPG).
11. Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, mempersiapkan *clean and clear project* seperti peraturan/perizinan, pajak/retribusi, pembebasan lahan, dan infrastruktur.

Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui 7 program penguatan GNPIP 2024 sesuai dengan koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi Efektif), yaitu:

1. Penyelenggaraan Operasi Pasar, Gelar Pangan Murah, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP);
2. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) bahan pangan melalui penguatan peran TPID;
3. Penguatan Pasokan Pangan Strategis melalui Gerakan Tanam dan Program *Urban Farming* Putri Pinang Masak (Pangan UTama IestaRI di Pekarangan menINGkatkan ketAhanan paNGan MASyaraAKat) "Kampung Inflasi" di Kota Jambi, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jambi;
4. Penyaluran Subsidi Ongkos Angkut untuk perbaikan efisiensi dan manajemen stok pangan;
5. Penyaluran Sarana dan Prasarana Pertanian untuk peningkatan produktivitas pertanian dan mitigasi risiko cuaca, serta *pilot project digital farming* pada Klaster Bawang Merah di Kabupaten Bungo;
6. Sinergi peningkatan pasokan Cabai Merah di Kota Jambi dengan memanfaatkan lahan tidur, melalui gerakan Payo Menanam.
7. Peningkatan pasokan bawang merah di Kabupaten Bungo melalui peresmian dukungan PSBI gudang penyimpanan sesuai SNI dan pemanfaatan digital farming sisi hulu yang mampu mendukung peningkatan produksi hingga sekitar 43%.
8. Penguatan Data dan Informasi melalui:
  - 1) Pemanfaatan data survei yang dihasilkan oleh BPS, Bank Indonesia, Disperindag, dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai *early warning indicator*;
  - 2) Pelaksanaan *capacity building* surveyor di lingkup wilayah Provinsi Jambi; serta
  - 3) *Pilot Project* aplikasi CIPTANI sebagai aplikasi digitalisasi pertanian; dan
9. Penguatan koordinasi dan komunikasi melalui:
  - 1) Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - 2) *Capacity Building* TPID; serta
  - 3) Iklan layanan masyarakat dalam mendorong penggunaan produk pangan olahan dan diversifikasi produk pangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is intentionally left blank*



## LAMPIRAN

### Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2021	2022				2023			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.127.430	20.255.750	20.914.210	20.804.320	21.600.570	21.767.973	23.315.688	24.372.013	24.028.784
B	Pertambangan dan Penggalian	9.787.270	10.633.500	13.666.550	15.004.630	14.009.430	13.289.178	10.861.592	11.409.397	9.864.968
C	Industri Pengolahan	6.098.690	6.214.780	6.909.440	6.987.980	6.876.480	6.756.065	7.177.368	7.644.533	7.648.218
D	Pengadaan Listrik dan Gas	43.390	45.080	46.510	49.640	49.850	49.886	55.703	57.566	58.071
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	85.770	84.180	85.350	88.720	93.510	92.676	96.861	98.148	93.952
F	Konstruksi	4.949.710	4.810.810	4.601.170	4.743.810	4.872.120	4.983.995	5.093.454	5.516.983	5.827.109
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.541.790	7.392.770	8.192.710	8.652.290	9.356.180	8.939.057	9.598.408	9.718.430	10.538.349
H	Transportasi dan Pergudangan	1.663.820	1.593.190	1.897.420	1.983.110	2.413.500	2.128.000	2.266.852	2.371.806	2.612.766
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	702.930	673.210	709.700	740.960	777.920	752.093	777.033	816.098	844.455
J	Informasi dan Komunikasi	2.430.510	2.456.520	2.565.450	2.566.690	2.588.010	2.603.747	2.728.339	2.733.995	2.843.894
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.512.660	1.610.070	1.504.740	1.683.450	1.626.960	1.670.705	1.686.108	1.677.800	1.637.214
L	Real Estate	1.005.340	1.009.690	1.030.830	1.042.860	1.067.970	1.074.584	1.076.880	1.091.769	1.124.522
M, N	Jasa Perusahaan	754.080	793.850	937.920	902.720	924.500	947.378	1.120.699	1.132.263	1.165.514
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.626.450	2.235.350	2.594.360	2.549.940	2.542.610	2.052.086	3.031.195	2.302.362	2.949.876
P	Jasa Pendidikan	2.186.850	2.068.420	2.106.860	2.167.030	2.242.700	1.986.768	2.398.188	2.202.171	2.446.693
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	934.140	808.880	766.870	834.770	874.150	770.008	877.370	922.703	970.210
R, S, T, U	Jasa lainnya	541.220	545.710	598.430	598.980	637.720	622.303	728.863	703.853	729.712
	<b>PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO</b>	<b>61.992.050</b>	<b>63.231.760</b>	<b>69.128.520</b>	<b>71.401.900</b>	<b>72.554.180</b>	<b>70.486.503</b>	<b>72.890.600</b>	<b>74.771.888</b>	<b>75.384.306</b>

### Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2021	2022				2023			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.138.420	10.338.005	10.756.988	11.056.376	11.116.509	10.877.802	11.534.326	11.859.824	11.416.827
B	Pertambangan dan Penggalian	9.212.175	9.007.648	9.709.406	10.096.224	9.716.752	9.954.192	9.599.781	10.165.370	9.049.975
C	Industri Pengolahan	3.903.710	3.841.446	4.152.273	4.204.120	3.992.876	3.910.787	4.143.174	4.390.929	4.380.892
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22.717	23.419	23.835	24.859	24.903	24.943	27.417	28.173	28.467
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	55.058	53.880	54.510	56.456	54.938	54.163	55.777	56.397	53.915
F	Konstruksi	3.229.303	3.098.516	2.914.155	2.940.965	2.965.375	3.022.585	3.096.753	3.350.519	3.448.627
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.846.497	3.654.197	3.927.109	4.079.311	4.197.175	3.977.859	4.254.812	4.296.043	4.615.645
H	Transportasi dan Pergudangan	1.202.943	1.140.913	1.300.647	1.302.615	1.433.830	1.302.380	1.345.881	1.421.374	1.536.624
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	453.439	431.384	452.284	470.069	491.868	474.612	489.707	513.104	529.914
J	Informasi dan Komunikasi	1.615.325	1.635.840	1.710.259	1.717.613	1.730.495	1.745.204	1.829.204	1.831.100	1.898.444
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	896.769	949.222	856.092	939.076	903.440	924.653	937.823	930.073	900.818
L	Real Estate	600.996	589.861	590.929	591.816	605.585	607.995	608.362	614.821	625.377
M, N	Jasa Perusahaan	413.356	414.432	464.136	445.736	449.079	455.321	537.768	534.814	544.045
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.290.239	1.110.229	1.275.867	1.255.309	1.256.102	1.002.751	1.468.944	1.137.309	1.434.174
P	Jasa Pendidikan	1.368.438	1.304.769	1.315.559	1.329.727	1.371.770	1.206.060	1.443.432	1.328.574	1.479.053
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	618.617	540.641	506.736	545.760	565.626	493.452	560.740	590.495	607.830
R, S, T, U	Jasa lainnya	389.859	385.086	414.983	409.630	430.439	409.384	462.906	447.211	460.785
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>39.257.862</b>	<b>38.519.490</b>	<b>40.425.769</b>	<b>41.465.661</b>	<b>41.306.760</b>	<b>40.444.143</b>	<b>42.396.806</b>	<b>43.496.127</b>	<b>43.011.411</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Berlaku Menurut Penggunaan (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN (1)	2021		2022				2023			
	III (8)	IV (9)	I (10)	II (11)	III (12)	IV (13)	I (14)	II (15)	III (16)	IV (17)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.181.430	26.960.330	27.150.210	28.742.440	28.637.320	29.863.410	29.848.883	31.240.455	30.330.463	31.943.880
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	329.250	348.680	348.110	376.340	384.570	381.580	382.372	419.277	422.473	476.599
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.728.490	6.437.640	2.443.190	4.600.530	4.761.900	7.147.410	2.720.144	5.399.645	4.305.420	7.587.778
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	12.455.360	14.389.000	13.681.510	13.308.900	14.120.320	14.525.820	15.399.832	15.396.043	15.876.575	16.858.108
5 Perubahan Inventori	541.560	308.970	781.290	769.500	283.040	305.250	1.048.656	766.927	536.897	269.252
6 Ekspor Barang dan Jasa	38.601.470	46.732.190	41.437.050	45.959.940	49.573.770	50.834.970	45.317.133	44.333.247	48.927.503	50.095.921
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	22.415.270	33.184.760	22.609.590	24.629.110	26.359.020	30.504.260	24.230.517	24.664.994	25.627.443	31.847.232
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>59.422.290</b>	<b>61.992.050</b>	<b>63.231.770</b>	<b>69.128.540</b>	<b>71.601.900</b>	<b>72.554.180</b>	<b>70.486.503</b>	<b>72.890.600</b>	<b>74.771.888</b>	<b>75.384.306</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Keterangan:

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Konstan Menurut Penggunaan (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN (1)	2021		2022				2023			
	III (8)	IV (9)	I (10)	II (11)	III (12)	IV (13)	I (14)	II (15)	III (16)	IV (17)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.590.122	17.479.367	17.323.795	17.659.058	17.221.216	18.001.801	17.895.996	18.683.145	18.065.901	18.504.365
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	212.762	222.665	218.901	229.354	229.859	228.822	228.822	247.948	248.556	277.107
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.801.900	3.800.801	1.473.575	2.716.321	2.797.250	4.134.676	1.589.192	3.094.717	2.477.393	4.282.534
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8.446.437	9.789.559	9.132.466	8.670.199	9.057.730	9.194.132	9.687.614	9.711.601	9.796.345	10.102.739
5 Perubahan Inventori	327.865	210.162	505.004	475.295	147.845	158.408	543.596	396.233	276.761	139.855
6 Ekspor Barang dan Jasa	26.706.018	31.014.228	25.035.327	27.088.012	29.252.961	29.491.902	26.295.112	26.330.740	28.503.123	27.874.136
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	15.669.956	23.258.919	15.169.577	16.412.471	17.241.199	19.902.980	15.794.229	16.067.579	15.871.952	18.169.325
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>39.415.148</b>	<b>39.257.862</b>	<b>38.519.490</b>	<b>40.425.769</b>	<b>41.665.661</b>	<b>41.306.760</b>	<b>40.444.143</b>	<b>42.396.806</b>	<b>43.496.127</b>	<b>43.011.611</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Keterangan:

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi Tahun Dasar 2018

IHK KOTA JAMBI KOMODITI	2022			2023											
	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
<b>UMUM</b>	<b>114,63</b>	<b>114,00</b>	<b>114,90</b>	<b>115,94</b>	<b>115,69</b>	<b>115,50</b>	<b>115,66</b>	<b>116,25</b>	<b>116,33</b>	<b>116,90</b>	<b>116,37</b>	<b>116,85</b>	<b>117,43</b>	<b>118,36</b>	<b>118,66</b>
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	117,74	115,29	117,92	121,54	120,74	120,31	119,87	120,17	121,94	123,06	121,28	122,45	123,91	126,65	127,32
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	105,51	105,51	105,51	105,54	105,54	105,54	105,60	105,63	105,82	105,92	105,92	105,92	105,92	105,95	105,95
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	111,34	111,42	111,41	111,64	111,77	111,54	111,49	112,64	112,26	112,18	112,04	112,02	111,95	111,75	111,69
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	115,08	115,20	115,78	117,43	117,20	117,11	117,18	117,40	117,31	117,38	117,31	117,58	117,72	117,72	117,70
KESEHATAN	112,65	112,65	112,66	112,96	113,31	113,40	113,34	113,39	113,88	113,89	113,96	113,96	114,70	114,32	114,75
TRANSPORTASI	125,80	125,81	126,14	122,97	123,31	122,88	124,79	126,89	123,26	125,13	125,31	125,84	126,96	127,67	128,24
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	100,89	100,85	100,71	100,66	100,46	100,46	100,46	100,46	100,46	100,46	100,46	100,70	100,61	100,30	100,38
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	122,83	122,83	122,83	122,83	122,83	122,83	122,84	122,84	122,86	122,86	122,86	122,85	123,12	123,21	123,21
PENDIDIKAN	105,40	105,40	105,40	105,40	105,54	105,54	105,54	105,54	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	110,34	110,34	110,34	110,45	110,45	110,50	110,64	110,72	111,20	111,20	111,20	111,57	111,57	111,57	111,57
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	118,98	120,39	121,17	124,27	123,18	123,77	124,65	124,70	124,94	124,62	124,83	125,02	124,97	126,33	126,87

Sumber: BPS Provinsi Jambi

### Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Bungo Tahun Dasar 2018

IHK KABUPATEN BUNGO KOMODITI	2022			2023											
	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
<b>UMUM</b>	<b>113,44</b>	<b>113,42</b>	<b>114,19</b>	<b>115,07</b>	<b>115,25</b>	<b>115,11</b>	<b>115,42</b>	<b>115,59</b>	<b>115,73</b>	<b>116,08</b>	<b>115,69</b>	<b>116,09</b>	<b>116,14</b>	<b>117,08</b>	<b>117,44</b>
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	116,44	116,13	117,97	120,53	121,14	120,44	120,28	121,47	121,92	122,88	121,60	122,56	122,38	125,38	126,40
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	112,67	112,67	113,07	113,20	113,27	113,26	113,30	113,31	113,34	113,29	113,30	113,27	113,27	113,27	113,29
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	106,78	106,99	106,99	107,05	107,02	106,99	107,39	107,38	107,40	107,50	107,46	107,45	107,48	106,95	106,96
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	114,54	114,64	114,81	114,96	114,94	114,89	115,00	114,95	114,84	114,91	114,89	114,98	115,14	115,07	114,92
KESEHATAN	106,02	106,13	106,77	107,09	107,09	107,09	107,13	107,13	107,82	108,36	108,48	109,52	109,69	109,69	109,69
TRANSPORTASI	120,83	120,82	121,25	120,81	120,59	120,85	122,08	120,17	120,53	120,61	120,65	120,40	120,71	120,53	120,78
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	102,54	102,54	102,54	102,52	102,87	102,87	102,86	103,10	102,77	102,77	102,77	102,87	102,87	102,87	102,91
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	109,37	109,37	110,25	110,25	110,54	110,54	110,54	110,60	110,50	110,50	110,50	110,50	110,78	110,78	110,78
PENDIDIKAN	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	105,07	105,07	105,63	105,63	107,48	107,48	107,48	107,48
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	105,62	105,62	105,70	105,70	105,75	105,75	105,75	105,75	105,75	105,75	105,75	106,53	106,53	106,64	106,64
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	131,16	131,61	133,06	135,02	134,91	135,67	137,69	137,92	137,40	137,20	137,29	137,37	138,11	140,42	140,83

Keterangan:

\* Sejak Tahun 2020 perhitungan IHK menggunakan SBH Tahun Dasar 2018 dan terdapat penyesuaian jumlah kebm pok pengeluaran menjadi kebm pok sebelumnya 7 kebm pok

Sumber: BPS Provinsi Jambi

## DAFTAR ISTILAH

### **Ekspor**

Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

### **Impor**

Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

### **PDRB atas dasar harga berlaku**

Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian.

### **PDRB atas dasar harga konstan**

Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.

### **Bank pemerintah**

Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

### **Bank swasta**

Perbankan yang sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sebelum dilakukannya program rekapitalisasi perbankan.

### **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito.

### ***Net Interest Margin (NIM)***

Selisih bersih antara biaya bunga operasional dengan pendapatan bunga operasional.

### ***Loan to Deposits Ratio (LDR)***

Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihipung.

### ***Non Performing Loan (NPL)***

Jumlah kredit yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan.

### ***Cash inflows***

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

### ***Cash outflows***

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

### ***Net cashflows***

Selisih bersih antara jumlah *cash inflows* dan *cash outflows* pada periode yang sama terdiri dari *netcash outflows* bila terjadi *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan *cash inflows*, dan *netcash inflows* bila terjadi sebaliknya.

### ***Administered prices***

kelompok barang yang pergerakan harganya ditentukan oleh pemerintah baik secara keseluruhan maupun sebagian.

## TIM PENYUSUN

- PENANGGUNG JAWAB** : **Warsono**  
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi  
**Robby Fathir Nashary**  
Deputi Kepala Perwakilan
- KOORDINATOR PENYUSUN** : **Aji Wira Tama**  
Analisis
- TIM PENYUSUN** : **Lidya Susilo**  
**Nabila Inas Salma**  
**Muhamad Yusuf Palupi**  
**Nurchahaya Elisabet Sitinjak**  
**Radita Ristiana**  
**Fildzah Fajrina**  
**Akhmad Yudha Pahlevi**